

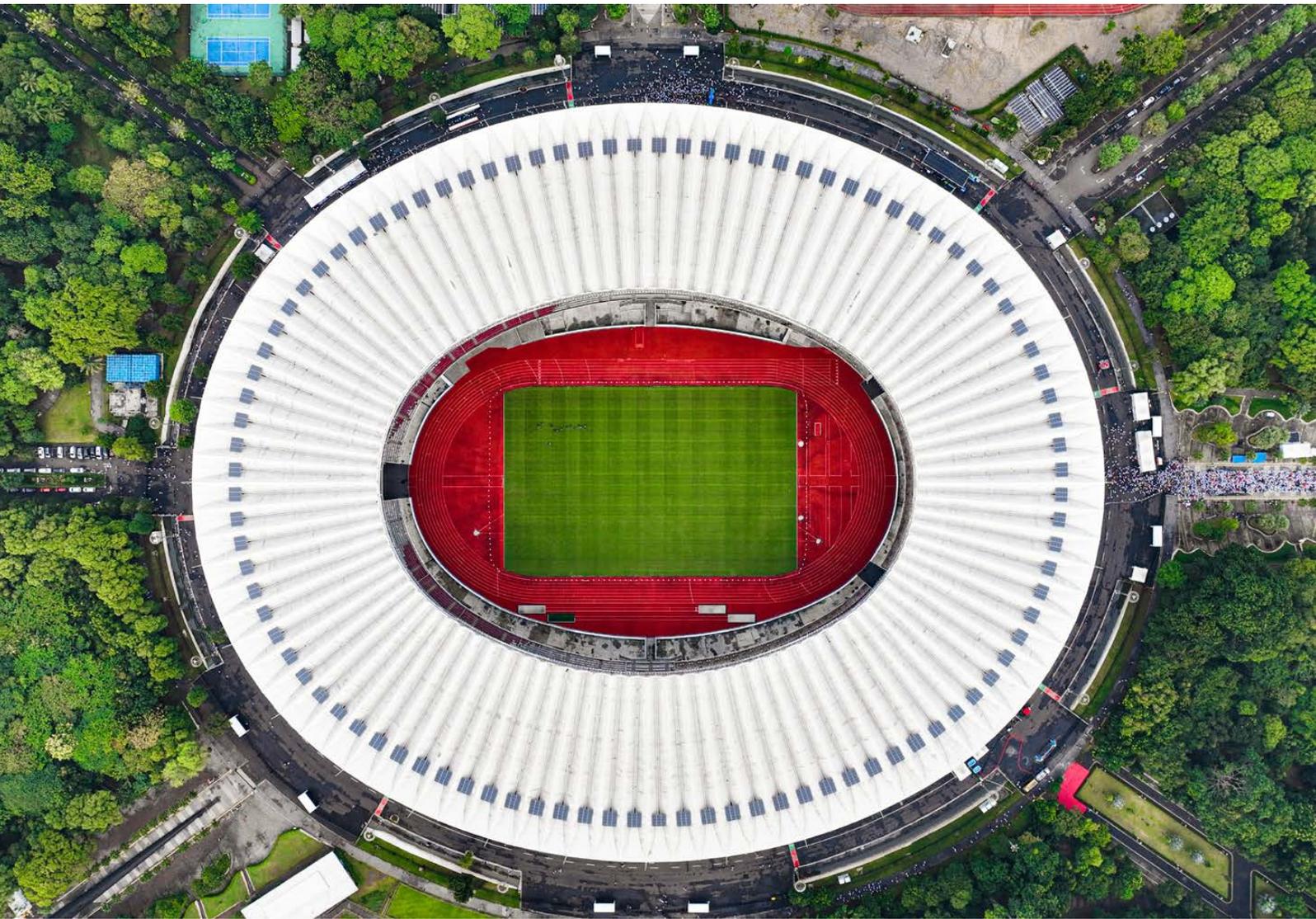


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

November 2024





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

November 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas
(*trust and integrity*)



Profesionalisme
(*professionalism*)



Keunggulan
(*excellence*)



Mengutamakan
kepentingan umum
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim
(*coordination and teamwork*)
yang belandaskan keluhuran
nilai-nilai agama (religi).



Visi & Misi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi November 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, dimana pada edisi November 2024 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan III 2024, triwulan IV 2024, dan prospek keseluruhan tahun 2024.

Pada triwulan III 2024, ekonomi Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,93% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,90% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta didorong oleh kuatnya konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Sementara itu, konsumsi Pemerintah dan LNPRT tumbuh signifikan didorong oleh meningkatnya belanja khususnya yang melalui APBN serta tingginya aktivitas pilkada. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan terutama bersumber dari kinerja LU perdagangan, LU jasa keuangan, dan LU konstruksi. LU Industri Pengolahan juga mencatatkan pertumbuhan positif. LU utama lainnya yaitu LU jasa keuangan serta LU infokom juga tumbuh positif.

Ke depan, ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh tinggi dalam kisaran 4,6%-5,4%, yang utamanya didukung oleh solidnya permintaan domestik. Adapun inflasi diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%. Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, OPD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kalangan pelaku usaha, narasumber dalam berbagai Focus Group Discussion dan pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, November 2024
Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

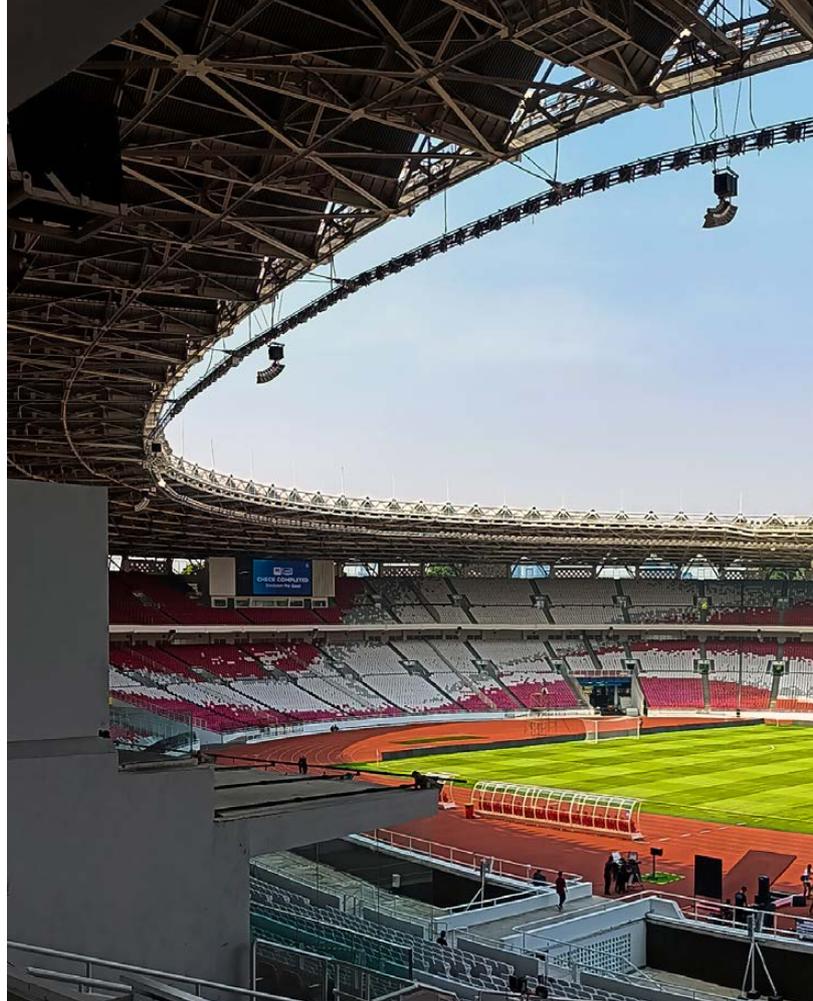
ttd.

Arlyana Abubakar
Direktur Eksekutif



Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	103



Bab I	
Perekonomian Global & Nasional	1
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
C. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

Bab II	
Ekonomi Makro Regional	7
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024	9
B. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2024	18

BOKS 1	
Resiliensi Konsumsi Rumah Tangga Jakarta	25

Bab III	
Keuangan Pemerintah	27
a. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2024	29
B. Realisasi Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	29
C. Belanja Daerah APBD	31
D. Pembiayaan Daerah APBD	32
E. Realisasi Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DKI Jakarta	32

Bab IV	
Inflasi	37
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan III 2024	39
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan IV 2024	42
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan III 2024	44

BOKS 2	
Menjaga Stabilitas Harga Hingga Ujung Terluar Jakarta	47



Bab V			
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	49		
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum	51		
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	56		
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	61		
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	64		
E. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Lainnya	67		
Bab VI			
Sistem Pembayaran	69		
A. Kondisi Umum	71		
B. Perkembangan Sistem Pembayaran di Provinsi DKI Jakarta	71		
C. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	75		
BOKS 3			
Strategi Penguatan Pengawasan PJP LR dan KUPVA BB di Era Digitalisasi Melalui Asesmen yang Robust	79		
Bab VII			
Ketenagakerjaan & Kesejahteraan	83		
A. Ketenagakerjaan	85		
B. Kemiskinan	88		
C. Upah Tenaga Kerja	90		
Bab VIII			
Prospek Perekonomian	93		
A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	95		
B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	97		

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	4
Tabel 3.1	Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta	34
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Kumulatif APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2024	35
Tabel 3.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta	36
Tabel 3.4	Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan III 2024	36
Tabel 5.1	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	51
Tabel 5.2	Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan	58
Tabel 5.3	Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi	59
Tabel 6.1	Perkembangan Transaksi Uang Kartal	71
Tabel 6.2	Persebaran KUPVA BB	75
Tabel 6.3	Perkembangan Transaksi PJP LR	77
Tabel 7.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	85
Tabel 7.2	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	86
Tabel 7.3	Profil Kemiskinan DKI Jakarta	88
Tabel 8.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))	95
Tabel 8.2	Proyeksi PDB Nasional	97
Tabel 8.3	Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024	102

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan III 2024 (% yoy)	4
Gambar 1.2	Peta Inflasi Daerah Bulan Agustus 2024 (% yoy)	5
Gambar B2.1	Bazar Pangan Murah di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu	47
Gambar B2.2	Pemberian Bantuan Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Layanan Penukaran Uang	48
Gambar B3.2	Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga	81

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.25	Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta	14
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.26	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan Jakarta	15
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.27	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan di Jakarta	15
Grafik 1.4	<i>Purchasing Manager's Index</i> (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.28	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi dan KKB di Jakarta	15
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Secara Triwulanan	9	Grafik 2.29	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri Pengolahan serta Transportasi dan Pergudangan	15
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2024 Sisi Pengeluaran	9	Grafik 2.30	Perkembangan DPK di Jakarta	15
Grafik 2.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2024 Sisi Pengeluaran	10	Grafik 2.31	Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta	16
Grafik 2.4	TPK Hotel Berbintang di Jakarta	10	Grafik 2.32	Pertumbuhan LU Konstruksi dan PMTB	16
Grafik 2.5	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran	10	Grafik 2.33	Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta	16
Grafik 2.6	Impor Barang Modal	10	Grafik 2.34	Perkembangan Niai Impor Besi dan Baja di Jakarta	16
Grafik 2.7	Impor Besi dan Baja	10	Grafik 2.35	Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi di Jakarta	16
Grafik 2.8	Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta	11	Grafik 2.36	Perkembangan Kinerja Industri Pengolahan Jakarta	17
Grafik 2.9	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	11	Grafik 2.37	Perkembangan Produksi Mobil Jakarta	17
Grafik 2.10	Ekspor Luar Negeri Barang	11	Grafik 2.38	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri Jakarta	17
Grafik 2.11	Ekspor Spare Part Otomotif	11	Grafik 2.39	Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku dan Barang Modal Jakarta	18
Grafik 2.12	Impor Jakarta Menurut Jenisnya	12	Grafik 2.40	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Industri Pengolahan Jakarta	18
Grafik 2.13	Impor Jakarta Menurut Komoditasnya	12	Grafik 2.41	Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Industri Pengolahan Jakarta	18
Grafik 2.14	Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga (APBN) di Jakarta	12	Grafik 2.42	Pertumbuhan LU Infokom, Transgud, dan Jasa Perusahaan	18
Grafik 2.15	Pertumbuhan Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)	12	Grafik 2.43	Perkiraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha	19
Grafik 2.16	Konsumsi Listrik Kategori Sosial di Jakarta	12	Grafik 2.44	Impor Barang Konsumsi	19
Grafik 2.17	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	13	Grafik 2.45	Penyaluran Kredit Konsumsi RT	19
Grafik 2.20	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	13	Grafik 2.46	Konsumsi Listrik RT	19
Grafik 2.18	Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan	13	Grafik 2.47	Penyaluran Kredit Investasi	20
Grafik 2.19	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan III 2024	13	Grafik 2.48	Impor Barang Modal	20
Grafik 2.21	Pertumbuhan LU Perdagangan dan Konsumsi RT	14	Grafik 2.49	Ekspor Mobil CBU	21
Grafik 2.22	Penjualan e-commerce Jakarta	14	Grafik 2.50	Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta	21
Grafik 2.23	Perkembangan Ekspor Produk Unggulan Jakarta	14	Grafik 2.51	Pertumbuhan Impor ke Jakarta Berdasarkan Jenisnya	21
Grafik 2.24	Perkembangan Ekspor Otomotif CKD Jakarta	14			

Daftar Grafik

Grafik 2.52	Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)	21	Grafik 3.17	Realisasi Total Belanja APBN di DKI Jakarta	33
Grafik 2.53	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan	22	Grafik 3.18	Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)	33
Grafik 2.54	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta	22	Grafik 3.19	Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)	33
Grafik 2.55	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Jakarta	22	Grafik 4.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39
Grafik 2.56	Perkembangan Penyaluran Kredit	22	Grafik 4.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39
Grafik 2.57	Perkembangan KKB dan KPR Jakarta	22	Grafik 4.3	Perkembangan Harga Beras	40
Grafik 2.58	Perkiraan SKDU LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan Jakarta	22	Grafik 4.4	Perkembangan Stok Beras	40
Grafik 2.59	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Industri Pengolahan	23	Grafik 4.5	Perkembangan Harga Cabai Merah	40
Grafik 2.60	Perkembangan Nilai Impor Besi dan Baja di Jakarta	23	Grafik 4.6	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	40
Grafik 2.61	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri di Jakarta	23	Grafik 4.7	Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta	40
Grafik B1.1	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga DKI Jakarta	25	Grafik 4.8	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	41
Grafik B1.2	Komposisi Pekerja Jakarta vs Nasional	26	Grafik 4.9	Inflasi Kelompok Pengeluaran Agustus-Oktober 2024	42
Grafik B1.3	Kontribusi Pendapatan per Kelompok Masyarakat	26	Grafik 4.10	Perkembangan Harga Cabai Merah	42
Grafik 3.1	Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah	29	Grafik 4.11	Perkembangan Harga Cabai Rawit	43
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw III 2024	29	Grafik 4.12	Perkembangan Harga Bawang Merah	43
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah	29	Grafik 4.13	Inflasi tahunan Kelompok Pengeluaran	43
Grafik 3.4	Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer	30	Grafik 4.14	Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa	44
Grafik 3.5	Pertumbuhan Komponen PAD	30	Grafik 4.15	Inflasi Jakarta dan Nasional	44
Grafik 3.6	Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw III 2024	30	Grafik 5.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	51
Grafik 3.7	Perkembangan PBB DKI Jakarta	30	Grafik 5.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	52
Grafik 3.8	Perkembangan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, serta LU Akmamin	30	Grafik 5.3	Komposisi DPK Jakarta	52
Grafik 3.9	Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor	30	Grafik 5.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	52
Grafik 3.10	Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil	31	Grafik 5.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	52
Grafik 3.11	Perkembangan BPHTB dan LU Real Estate DKI Jakarta	31	Grafik 5.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	53
Grafik 3.12	Realisasi Kumulatif Belanja Daerah	31	Grafik 5.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	53
Grafik 3.13	Perkembangan Capaian Tahun 2024 Komponen Belanja Daerah	31	Grafik 5.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	53
Grafik 3.14	Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya	31	Grafik 5.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	53
Grafik 3.15	Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi	32	Grafik 5.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	54
Grafik 3.16	Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta	32	Grafik 5.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	54
			Grafik 5.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	54
			Grafik 5.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	54

Daftar Grafik

Grafik 5.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	55	Grafik 5.41	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	62
Grafik 5.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	55	Grafik 5.42	NPL Kredit Rumah Tangga	63
Grafik 5.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	55	Grafik 5.43	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	63
Grafik 5.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	55	Grafik 5.44	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	63
Grafik 5.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	55	Grafik 5.45	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	63
Grafik 5.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	56	Grafik 5.46	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	63
Grafik 5.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	56	Grafik 5.47	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	64
Grafik 5.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	57	Grafik 5.48	Komposisi DPK	64
Grafik 5.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	57	Grafik 5.49	Komposisi DPK Rumah Tangga	64
Grafik 5.23	Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta	57	Grafik 5.50	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	64
Grafik 5.24	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	58	Grafik 5.51	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	64
Grafik 5.25	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	58	Grafik 5.52	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	65
Grafik 5.26	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	58	Grafik 5.53	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	65
Grafik 5.27	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	59	Grafik 5.54	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	65
Grafik 5.28	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	59	Grafik 5.55	NPL Kredit UMKM	65
Grafik 5.29	Pertumbuhan kredit Korporasi	59	Grafik 5.56	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	65
Grafik 5.30	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	60	Grafik 6.1	Perkembangan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> Uang Kartal	71
Grafik 5.31	NPL pada Sektor Korporasi	60	Grafik 6.2	<i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> per Pecahan	71
Grafik 5.32	Perkembangan DPK Korporasi	60	Grafik 6.3	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	72
Grafik 5.33	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	60	Grafik 6.4	Perkembangan Nilai Transaksi RTGS	72
Grafik 5.34	Komposisi DPK Korporasi	60	Grafik 6.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS	72
Grafik 5.35	Indeks Harga Saham Gabungan BEI	61	Grafik 6.6	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	72
Grafik 5.36	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	61	Grafik 6.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	72
Grafik 5.37	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	61	Grafik 6.8	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet	73
Grafik 5.38	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	62	Grafik 6.9	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet dan ATM	73
Grafik 5.39	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	62	Grafik 6.10	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	73
Grafik 5.40	Komposisi Kredit RT dan Non RT	62	Grafik 6.11	Pangsa Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	73
			Grafik 6.12	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	74
			Grafik 6.13	Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik	74

Daftar Grafik

Grafik 6.14	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS di DKI Jakarta	74	Grafik 7.13	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	88
Grafik 6.15	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Jenis Usaha	74	Grafik 7.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	88
Grafik 6.16	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Wilayah	74	Grafik 7.15	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	88
Grafik 6.17	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	75	Grafik 7.16	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta	89
Grafik 6.18	<i>Market Share</i> Valuta Asing	75	Grafik 7.17	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya	89
Grafik 6.19	Perkembangan Transaksi PJP LR	76	Grafik 7.18	Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan	89
Grafik B3.1	Kasus Anomali Trafik Internet di Indonesia	79	Grafik 7.19	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	89
Grafik B3.2	Insiden Siber Berdasarkan Sektor	79	Grafik 7.20	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	89
Grafik 7.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	85	Grafik 7.21	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	89
Grafik 7.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	85	Grafik 7.22	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	90
Grafik 7.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	85	Grafik 7.23	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	90
Grafik 7.4	Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86	Grafik 7.24	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	90
Grafik 7.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86	Grafik 7.25	Perkembangan UMP DKI Jakarta	90
Grafik 7.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86	Grafik 7.26	UMP Provinsi di Indonesia	91
Grafik 7.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	86	Grafik 8.1	Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia	95
Grafik 7.8	Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	87	Grafik 8.2	Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia	95
Grafik 7.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	87	Grafik 8.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024	98
Grafik 7.10	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	87	Grafik 8.4	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024	100
Grafik 7.11	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	87	Grafik 8.5	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024	100
Grafik 7.12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	88	Grafik 8.6	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024	101

Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut, disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2% dengan tren melambat. Sejalan dengan tren inflasi global yang menurun, kebijakan moneter di negara-negara maju melonggar. Di Amerika Serikat, perubahan politik diperkirakan akan membawa arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan strategi ekonomi yang fokus pada orientasi domestik (*inward-looking policy*). Hal ini mencakup penerapan tarif perdagangan yang lebih tinggi serta kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Kondisi tersebut berpotensi menambah risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan mendorong kenaikan kembali tingkat inflasi dunia. Di sisi lain, laju penurunan inflasi di AS diprediksi akan berlangsung lebih lambat, sehingga ruang untuk penurunan suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) kemungkinan akan lebih terbatas. Pada saat yang sama, peningkatan kebutuhan pembiayaan defisit fiskal AS turut mendorong kenaikan *yield US Treasury*, baik untuk tenor jangka pendek maupun panjang. Perubahan kebijakan ini juga menyebabkan penguatan nilai tukar dolar AS menguat secara signifikan, serta pergeseran preferensi investor global yang kembali mengalokasikan portofolionya ke pasar AS. Dampaknya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang berbagai negara meningkat, disertai arus keluar investasi portofolio asing, termasuk dari negara-negara *Emerging Market* (EM). Untuk menghadapi risiko tersebut, diperlukan penguatan kebijakan guna memperkuat ketahanan eksternal dan memitigasi dampak negatif dari memburuknya kondisi ekonomi global terhadap negara-negara EM, termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat, berkontribusi terhadap stabilitas eksternal yang terjaga. Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap konsisten dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Pada triwulan III 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK triwulan III 2024 tercatat deflasi $-0,12\%$ (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi $1,84\%$ (yoy). Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Memasuki triwulan IV 2024, IHK pada Oktober 2024 tercatat sebesar $1,71\%$ (yoy), tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$. Instrumen moneter pasar terbuka seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta pencapaian target inflasi. Transmisi kebijakan berjalan efektif, dengan pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 yang tetap kuat, mencapai $10,92\%$ (yoy). Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang lebih baik, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Sistem ekonomi dan keuangan menunjukkan ketahanan yang baik. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Triwulan III 2024 terus bertumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Stabilitas sistem pembayaran terjaga, didukung oleh struktur yang semakin baik dan infrastruktur yang lebih tangguh.

Ringkasan Eksekutif

Ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,93% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (4,90%; yoy). Pertumbuhan tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,95% (yoy). Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Konsumsi RT tetap resilien dan tumbuh tinggi didorong oleh konsumsi hotel dan restoran sejalan dengan tingginya jumlah wisman dan wisnus yang datang ke Jakarta karena masifnya pelaksanaan MICE dan *event* serta berlangsungnya periode libur anak sekolah. Selanjutnya, investasi juga masih tumbuh baik sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitalahun Pemerintah maupun swasta seperti MRT dan LRT Jakarta. Perbaikan ekspor juga berlanjut yang terutama didorong oleh perbaikan ekspor barang khususnya mesin dan pesawat mekanik serta pakaian jadi. Adapun Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2024 masing-masing didorong oleh meningkatnya belanja khususnya yang melalui APBN serta tingginya aktivitas partai politik dan organisasi sosial jelang kampanye pilkada di Jakarta.

Dari sisi lapangan usaha (LU) utama DKI Jakarta, meningkatnya pertumbuhan terutama didorong oleh kinerja LU perdagangan, LU jasa keuangan dan LU konstruksi. LU perdagangan tumbuh meningkat yang tercermin antara lain dari tingginya indeks penjualan ritel. LU jasa keuangan juga turut menopang pertumbuhan didorong oleh penyaluran kredit di Jakarta yang masih tetap tumbuh tinggi. LU Konstruksi juga masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan masih terus berlanjutnya proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitalahun di Jakarta. LU utama lainnya yaitu LU industri pengolahan serta LU informasi dan komunikasi (infokom) juga tumbuh positif yang masing-masing didorong oleh perbaikan kinerja di industri kimia, barang dari logam, dan makanan minuman serta tingginya penggunaan data dan internet di Jakarta.

Memasuki triwulan IV 2024, ekonomi DKI Jakarta diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT sejalan dengan berlangsungnya HBKN Natal dan Tahun Baru serta pilkada serentak. Kinerja investasi juga diprakirakan masih tumbuh meningkat seiring dengan masih masuknya investasi untuk proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitalahun. Adapun kinerja ekspor juga diprakirakan terus membaik didorong oleh semakin membaiknya ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor termasuk Jepang. Selain itu, perbaikan ekspor juga ditopang oleh ekspor komoditas lainnya termasuk komoditas pendukung ekspor otomotif (plastik dan bahan kimia). Dari sisi LU, masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama didorong oleh meningkatnya LU perdagangan, LU konstruksi, LU industri pengolahan. LU lainnya seperti jasa keuangan juga diprakirakan akan tumbuh meningkat didorong oleh akselerasi penyaluran kredit di akhir tahun.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan III 2024 secara kumulatif tercatat sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh lebih tingginya capaian dari seluruh komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Demikian juga halnya dengan capaian realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebesar 52,53% dari pagu keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian yang lebih tinggi tersebut didorong oleh realisasi komponen baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal.

Ringkasan Eksekutif

Kinerja APBN di DKI Jakarta dari sisi Pendapatan pada triwulan III 2024 telah mencapai 92,61% dari total pagu anggaran, tumbuh sebesar 0,95% (yoy). Dari sisi belanja, realisasi mencapai 73,78% dari pagu anggaran, tumbuh sebesar 34,55% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang.

Inflasi yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,23% (yoy). Capaian inflasi ini lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 1,84% (yoy). Terkendalnya inflasi Jakarta tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 yaitu emas perhiasan, angkutan udara, beras, sewa rumah dan upah asisten rumah tangga. Memasuki triwulan IV 2024, perkembangan inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2024 tercatat menurun dengan inflasi sebesar 1,58% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,70% (yoy). Ke depan, inflasi IHK DKI Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali di dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024.

Intermediasi perbankan tetap kuat dan didukung oleh ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh kondisi likuiditas bank yang memadai seiring penguatan strategi *funding* dari sumber pendanaan lainnya di tengah perlambatan DPK. Implementasi berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia turut mendukung tetap kuatnya fungsi intermediasi perbankan. Ketahanan bank tetap terjaga ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah dan cenderung turun.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi masih tumbuh tinggi seiring dengan membaiknya kinerja korporasi. Profitabilitas korporasi nonkeuangan meningkat sejalan dengan meningkatnya penjualan. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) kredit korporasi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga tetap baik meskipun untuk kelas menengah bawah perlu menjadi perhatian. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang masih terjaga pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit sektor UMKM meningkat dengan risiko kredit yang mulai turun. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran mengonfirmasi menguatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan III 2024, arus kas tercatat *net outflow* dan transaksi pembayaran nontunai tumbuh menguat sejalan dengan menguatnya perekonomian di DKI Jakarta. Dari sisi industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami peningkatan pada triwulan III 2024 sebesar 37,51% (yoy), sedangkan dari sisi industri Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), kenaikan tercatat sebesar 72,98% (yoy). Seluruh jenis transaksi remitansi meningkat baik *incoming* (ke dalam negeri), *outgoing* (ke luar negeri) dan domestik (di dalam wilayah Indonesia).

Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2024 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,34% pada Maret 2024, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 4,44%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2024 berada pada level 9,03%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Untuk keseluruhan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,6-5,4% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan *event* di Jakarta, berlangsungnya pemilu dan pilkada serentak, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan *event*; membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD, serta meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara, terhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara terkait isu uji keamanan produk, serta masih berlangsungnya tensi geopolitik. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati dan dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global serta peningkatan ketegangan tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan.

Inflasi IHK DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan akan tetap terkendali pada sasaran 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Tabel Indikator

INDIKATOR	2021					2022					2023					2024		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
Ekonomi Makro Regional																		
Produk Domestik Regional Bruto (% ,yoy)	-1,94	10,92	2,42	3,63	3,56	4,61	5,61	5,93	4,85	5,25	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96	4,78	4,90	4,93
Berdasarkan Lapangan Usaha:																		
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,34	6,26	3,25	7,33	4,12	-0,16	3,11	4,38	2,60	2,51	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19	6,98	5,62
2 Pertambangan dan Penggalian	-6,38	-2,15	-9,77	2,73	-4,06	0,45	-5,07	-7,78	-9,34	-5,42	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43	4,52	-6,26
3 Industri Pengolahan	-0,96	25,28	11,93	11,15	11,06	9,64	6,83	4,95	2,66	5,95	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53	2,46	1,33
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-6,88	-8,63	-18,61	-30,59	-16,30	-13,27	2,83	-0,20	3,67	-2,38	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,77	10,07	1,33	2,53	4,07	-0,35	-0,65	0,93	2,11	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22	0,59	0,28
6 Konstruksi	-5,33	5,34	-1,40	2,53	0,09	0,75	4,80	3,36	-1,81	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27	6,55	5,65
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,08	13,93	3,64	6,38	5,46	6,87	8,25	9,65	6,41	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,39	6,87	7,99
8 Transportasi dan Pergudangan	-0,48	41,45	7,78	9,55	12,77	3,46	1,47	11,82	11,92	7,19	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48	6,15	7,10
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,44	45,24	6,78	7,12	8,99	6,14	6,29	13,63	11,26	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56	7,57	7,31
10 Informasi dan Komunikasi	7,84	2,52	2,70	5,74	4,65	6,17	7,14	6,09	8,39	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,43	4,19	4,27
11 Jasa keuangan dan Asuransi	-7,32	9,90	4,88	-5,01	0,13	0,57	2,54	-1,01	3,02	1,28	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02	10,99	6,09
12 Real Estate	0,38	3,79	0,53	2,44	1,77	2,51	2,36	2,45	0,85	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31	1,35	1,64
13 Jasa Perusahaan	-4,57	4,48	-1,99	1,62	-0,21	3,91	5,53	7,27	6,63	5,84	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,57	3,57	3,65
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	-1,22	1,32	-7,00	-4,52	-2,82	-4,01	0,59	5,56	6,25	2,01	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16	-5,96	0,93
15 Jasa Pendidikan	0,01	3,66	-1,76	1,51	0,82	0,10	-0,52	0,76	-0,76	-0,11	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69	0,96	6,97
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,92	14,02	1,90	4,01	8,10	14,73	15,66	6,51	1,53	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09	6,71	3,36
17 Jasa Lainnya	-9,59	5,32	-5,14	2,82	-1,90	13,10	15,02	18,28	14,77	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45	3,87	6,09
Berdasarkan Permintaan:																		
1 Konsumsi																		
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,58	8,22	4,34	3,58	3,54	4,09	5,12	7,62	5,74	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25	5,28	5,26
b. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-4,62	2,24	0,56	2,19	0,10	5,99	6,03	6,68	6,28	6,25	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70	9,69	11,99
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,154	22,13	6,77	-2,04	9,82	-15,90	-9,79	-9,93	-4,48	-9,41	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30	-5,62	10,81
3 PMTB	-6,75	5,48	1,22	5,10	1,05	4,85	5,71	6,37	1,23	4,48	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36	4,66	4,27
4 Perubahan Inventori	-123,36	-87,76	79,74	-93,80	-101,72	268,06	-36,83	3,34	72,67	1028,62	-277,9	37,25	209,14	44,75	-8,82	-75,78	-12,18	38,88
5 Ekspor	-10,27	23,31	19,82	19,32	11,36	8,54	10,96	17,60	13,19	12,60	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23	7,06	13,40
6 Impor	-5,71	22,84	18,61	17,54	12,45	5,63	6,52	13,73	7,87	8,48	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30	5,32	13,50
Ekspor																		
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,760	2,716	2,871	2,995	11,341	2,938	2,657	2,934	2,940	11,469	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694	2,856	3,875
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	802	916	856	981	3,555	779	716	901	924	3,320	849	764	809	922	3,344	820	894	1,032
Impor																		
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	14,186	15,513	16,135	18,367	64,201	18,922	18,608	20,187	19,295	77,012	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409	16,597	20,637
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	7,592	7,612	7,649	8,107	30,960	8,218	8,142	8,134	8,271	32,765	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269	8,047	9,541
Indeks Harga Konsumen	106,36	106,60	106,59	107,58	107,58	108,49	109,67	111,50	112,11	112,11	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81	105,10	104,97
Laju Inflasi Tahunan (% ,yoy)	1,11	1,01	1,14	1,53	1,53	2,00	2,88	4,61	4,21	4,21	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18	2,23	1,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

Tabel Indikator

INDIKATOR	2021					2022					2023					2024		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
Perbankan																		
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	3.454	3.505	3.667	3.864	3.864	3.849	3.887	3.910	4.321	4.321	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461	4.539	4.560	4.505
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	1.704	1.750	1.805	1.751	1.751	1.784	1.949	1.965	2.006	2.006	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324	2.401	2.522	2.572
- Modal Kerja	908	954	971	967	967	990	1.110	1.105	1.120	1.120	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353	1.434	1.461
- Investasi	590	588	624	570	570	578	615	621	645	645	640	672	703	749	749	783	818	834
- Konsumsi	207	208	211	214	214	216	224	238	241	241	240	244	253	260	260	265	270	277
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	-10,4	-3,4	2,4	1,6	1,6	4,7	11,4	8,8	14,6	14,6	12,7	8,0	11,6	15,83	15,8	19,41	19,90	17,30
- Modal Kerja	-13,5	-5,2	1,0	4,1	4,1	9,1	16,3	13,9	15,7	15,7	14,2	6,9	11,9	17,5	17,50	19,6	20,8	18,2
- Investasi	-5,9	0,4	5,8	-2,6	-2,6	-1,9	4,6	-0,4	13,3	13,3	10,7	9,3	13,2	16,0	16,00	22,3	21,6	18,5
- Konsumsi	-8,7	-5,3	-0,8	2,2	2,2	4,4	7,6	13,0	12,5	12,5	11,0	9,2	6,2	7,8	7,80	10,6	10,6	9,7
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	141	140	148	139	139	139	143	140	144	144	140	144	146	150	150	149	147	150
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek(%)	49,35	49,93	49,24	45,32	45,32	46,36	50,13	50,25	46,42	46,42	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68	52,90	55,31	57,10
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	2,40	2,32	2,19	1,97	1,97	1,94	1,70	1,62	1,42	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33	1,34	1,22	1,20
Sistem Pembayaran																		
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	12,89	12,47	12,85	15,50	15,50	21,80	16,82	17,56	18,43	18,43	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,35	21,20	22,79
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	11,41	10,61	10,56	13,42	13,42	18,58	15,55	16,94	20,11	20,11	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,53	19,50	78,96
- Nominal Transaksi E-Commerce (Rp Triliun)	18,80	20,16	21,76	22,42	83,15	22,20	23,12	25,27	28,48	82,23	21,55	20,59	22,86	24,45	89,46	22,21	20,00	20,71
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	1,17	1,30	1,64	3,16	3,16	3,42	3,60	3,90	4,28	4,28	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28	5,43	5,03
- Volume Transaksi UE (Juta)	705	814	735	949	3.203	1.049	1.151	1.391	1.587	2.978	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513	2.811	2.868
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	32	38	40	54	164	56	67	90	97	187	103	127	136	151	518	165	190	207

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

BAB 1

PEREKONOMIAN GLOBAL & NASIONAL

Ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut, disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2% dengan tren melambat. Sejalan dengan tren inflasi global yang menurun, kebijakan moneter di negara-negara maju melonggar. Di Amerika Serikat, perubahan politik diperkirakan akan membawa arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan strategi ekonomi yang fokus pada orientasi domestik (*inward-looking policy*). Hal ini mencakup penerapan tarif perdagangan yang lebih tinggi serta kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Kondisi tersebut berpotensi menambah risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan mendorong kenaikan kembali tingkat inflasi dunia. Di sisi lain, laju penurunan inflasi di AS diprediksi akan berlangsung lebih lambat, sehingga ruang untuk penurunan suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) kemungkinan akan lebih terbatas. Pada saat yang sama, peningkatan kebutuhan pembiayaan defisit fiskal AS turut mendorong kenaikan *yield US Treasury*, baik untuk tenor jangka pendek maupun panjang. Perubahan kebijakan ini juga menyebabkan penguatan nilai tukar dolar AS secara signifikan, serta pergeseran preferensi investor global yang kembali mengalokasikan portofolionya ke pasar AS. Dampaknya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang berbagai negara semakin besar, disertai arus keluar investasi portofolio asing, termasuk dari negara-negara *Emerging Market* (EM). Untuk menghadapi risiko tersebut, diperlukan penguatan kebijakan guna memperkuat ketahanan eksternal dan memitigasi dampak negatif dari memburuknya kondisi ekonomi global terhadap negara-negara EM, termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat, berkontribusi terhadap stabilitas eksternal yang terjaga. Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap konsisten dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 menurun menjadi 1,71% (yoy), terkenal dalam sasaran 2,5±1%. Instrumen moneter pasar terbuka seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta pencapaian target inflasi. Transmisi kebijakan berjalan efektif, dengan pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 yang tetap kuat, mencapai 10,92% (yoy). Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang lebih baik, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Sistem ekonomi dan keuangan menunjukkan ketahanan yang baik. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Triwulan III 2024 terus bertumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Stabilitas sistem pembayaran terjaga, didukung oleh struktur yang semakin baik dan infrastruktur yang lebih tangguh.



**Pertumbuhan
Ekonomi Nasional (yoy)**



4,95%
Triwulan III 2024

5,05%
Triwulan II 2024

**Inflasi
IHK Nasional (yoy)**



1,84%
Triwulan III 2024

2,51%
Triwulan II 2024

**Capital Adequacy Ratio
(CAR)**
Perbankan Nasional

26,85%
Triwulan III 2024

**BI 7-Days
Reverse Repo Rate**

6,00%
September 2024

A. PEREKONOMIAN GLOBAL¹

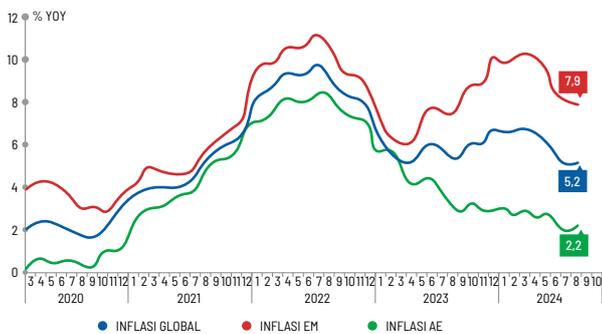
Pada tahun 2024, ekonomi global diprakirakan akan tumbuh sebesar 3,2%, meskipun dengan kecenderungan perlambatan akibat ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah, yang meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Negara-negara maju cenderung menyelaraskan kebijakan moneter yang lebih longgar, seiring dengan penurunan tren inflasi global. Ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan peningkatan, ditandai oleh penurunan tingkat pengangguran di tengah prospek inflasi yang lebih terkendali, yang memperkuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) lebih rendah dari proyeksi awal, memicu kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun serta indeks dolar AS (DXY).

Ke depan, diperkirakan tren penurunan suku bunga kebijakan negara-negara maju, terutama AS, akan berlanjut. Selain itu, mengingat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut dan berdampak pada ketidakpastian global, diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ekonomi global, mendorong aliran masuk modal asing, dan memperkuat stabilitas nilai tukar demi menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Tabel 1.1 Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)

NEGARA	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,2
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,7
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5	2,6
Kawasan Euro	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,8
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9	0,3
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,2
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,8
India (Fiscal Year for CF)	4,8	-6,6	8,3	6,8	7,7	7,0
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,1	4,8
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,3	2,1
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	3,2	2,8
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,6	4,3	5,4	2,0	2,7

Sumber: IMF WEO.
*Proyeksi Bank Indonesia



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

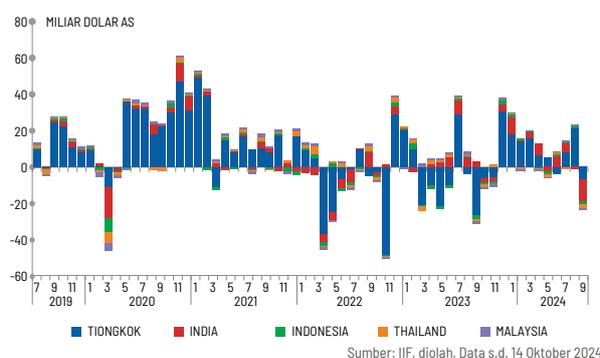
Grafik 1.1 Inflasi Global

B. PEREKONOMIAN NASIONAL²

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 tercatat sebesar 4,95% (yoy) terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor nonmigas di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh Industri Pengolahan Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik, utamanya didorong oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun, dan peningkatan konsumsi LNPRT dengan diselenggarakannya pilkada serentak pada triwulan IV 2024.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2024 menurun sehingga mencapai 1,71% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada September 2024 yang sebesar 1,84% (yoy) dan terjaga dalam sasaran 2,5±1%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi di seluruh komponen. Inflasi inti tercatat sebesar 2,21% (yoy), sementara inflasi *volatile food* (VF) didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, terus menurun menjadi 0,89% (yoy) dari 1,43% (yoy) pada bulan sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP, dan pengaruh *base effect* harga pangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia



Sumber: IIF, diolah. Data s.d. 14 Oktober 2024

Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

1 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter November 2024

2 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus November 2024

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

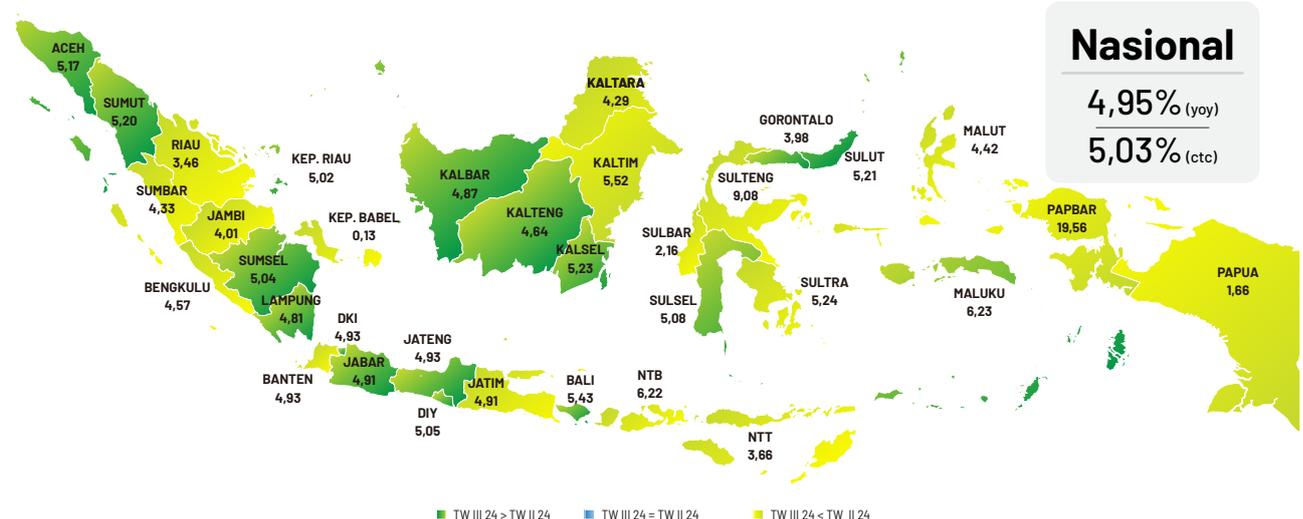
KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023	2024		
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	-2,63	2,01	4,35	5,52	5,40	4,50	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91	4,93	4,91
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	10,62	-4,21	1,62	5,91	5,03	5,99	5,72	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29	9,98	11,69
Konsumsi Pemerintah	3,27	2,12	4,25	-6,60	-4,61	-2,50	-4,72	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90	1,42	4,62
Investasi (PMTDB)	4,45	-4,96	3,80	4,08	3,09	4,98	3,33	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79	4,43	5,15
Investasi Bangunan	5,37	-3,78	2,32	2,58	0,92	0,07	0,11	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04	5,46	5,31	6,02
Investasi Nonbangunan	1,83	-8,44	8,42	8,63	9,71	19,32	12,11	12,53	7,93	8,30	4,45	1,60	5,34	-0,64	2,08	2,98
Ekspor	-0,48	-8,42	17,99	14,40	16,32	19,09	14,95	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50	8,28	9,09
Impor	-7,13	-17,60	24,86	16,06	13,06	25,73	6,49	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77	8,57	11,47
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,04	5,11	5,05	4,95

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023	2024		
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,61	1,77	1,87	1,16	1,68	1,95	4,51	2,25	0,43	2,02	1,49	1,12	1,30	-3,54	3,25	1,69
Pertambangan dan Penggalian	1,22	-1,95	4,00	3,82	4,01	3,22	6,46	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31	3,17	3,46
Industri Pengolahan	3,80	-2,93	3,39	5,07	4,01	4,83	5,64	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13	3,95	4,72
Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	7,04	9,33	8,05	2,31	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35	5,39	5,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	1,35	4,46	4,26	2,84	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44	0,84	0,03
Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	4,83	1,02	0,63	1,61	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59	7,29	7,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,60	-3,79	4,63	5,73	4,43	5,37	6,55	5,52	4,92	5,25	5,10	4,09	4,85	4,58	4,86	4,82
Transportasi dan Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	15,79	21,27	25,80	16,99	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,65	9,56	8,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	6,58	9,80	17,83	13,81	11,97	11,55	9,89	10,94	7,89	10,01	9,39	10,17	8,33
Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,15	8,06	6,95	8,75	7,74	7,13	8,02	8,51	6,74	7,59	8,39	7,66	6,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,64	1,50	0,87	3,76	1,93	4,48	2,88	5,24	6,56	4,77	3,91	7,90	5,49
Real Estat	5,76	2,32	2,78	3,78	2,16	0,63	0,39	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54	2,16	2,32
Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	5,96	7,92	10,79	10,42	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63	7,96	7,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	-0,03	-0,33	-1,29	-1,52	12,48	1,78	2,52	2,09	8,15	-6,24	1,61	1,50	18,88	2,79	3,94
Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	-1,41	-1,06	4,46	0,42	0,59	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78	7,34	2,38	2,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	4,52	6,50	-1,71	2,47	2,74	4,77	8,27	2,91	3,09	4,66	11,64	8,56	7,64
Jasa lainnya	10,57	-4,10	2,12	8,25	9,26	9,13	11,14	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92	8,85	9,95
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11	5,05	4,95

Sumber: BPS, diolah



Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan III 2024 (% yoy)

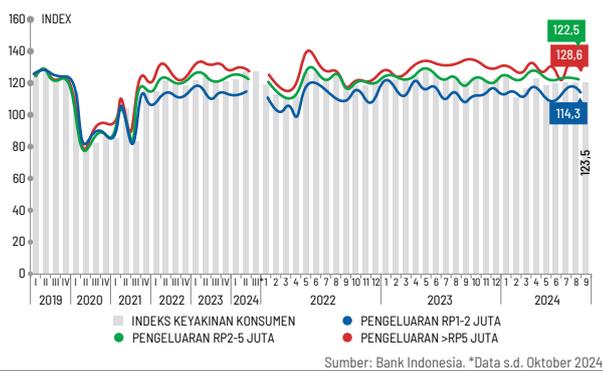
Sumber: BPS, diolah

terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi. Secara spasial, sebagian besar daerah mengalami penurunan inflasi pada Oktober 2024. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,19% (yoy) utamanya disebabkan inflasi daging babi, beras, dan emas perhiasan. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,71% (yoy) yang didorong oleh deflasi komoditas beras, angkutan udara, ikan layang/ikan benggol, tomat serta bahan bakar rumah tangga.

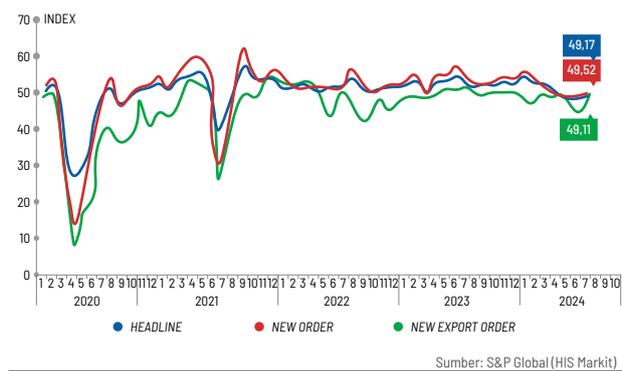
Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada Oktober 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Oktober 2024 yang tinggi sebesar 25,58%. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada September 2024 tercatat sebesar 26,78% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan (Non-Performing Loan/NPL) pada September 2024 terjaga rendah, sebesar 2,21% (bruto)

dan 0,78% (neto). Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

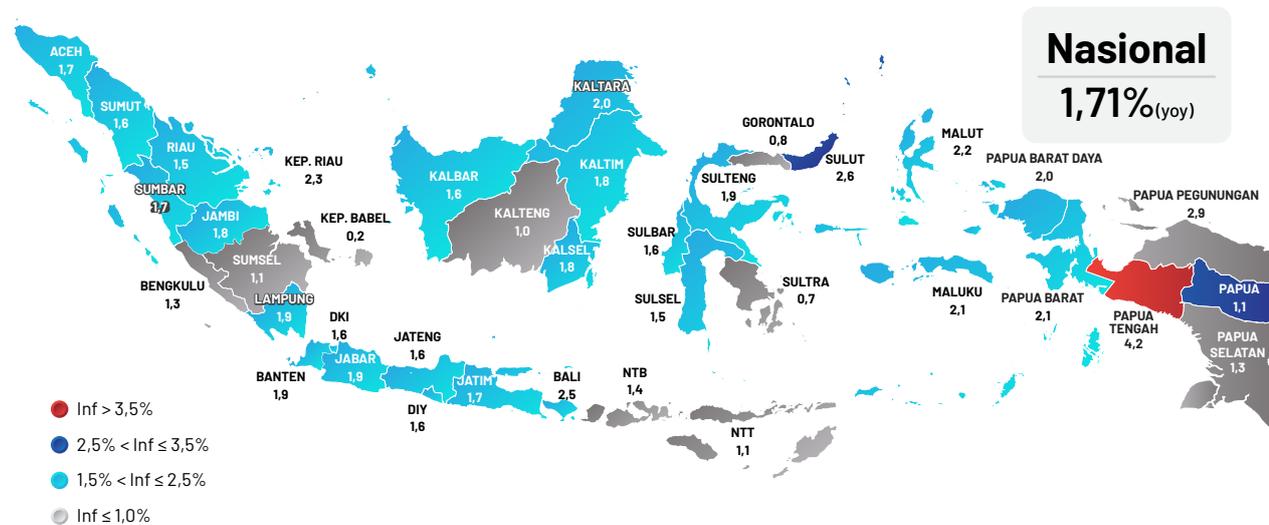
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 21,13% (yoy) sehingga mencapai Rp 16.682,58 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 59,30% (yoy) mencapai 339 juta transaksi. Transaksi *digital banking* tercatat 1.960,80 juta transaksi atau tumbuh sebesar 37,10% (yoy), sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 27,0% (yoy) mencapai 1.365,4 juta transaksi. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 11,4% (yoy) menjadi 558,8 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 19,6% (yoy) mencapai 39,7 juta transaksi. Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 183,9% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 54,1 juta dan



Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur



Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Oktober 2024 (% yoy)

Sumber : BPS, diolah

jumlah merchant 34,7 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,8% (yoy) menjadi Rp 1.070,6 triliun. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas untuk berbagai jenis penggunaan. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemenuhan kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Keputusan ini tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar Rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap *pro growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan padat karya, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, melalui:

1. Penguatan strategi operasi moneter *pro-market* untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan:
 - a. mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SVUBI) sebagai instrumen moneter *pro-market*;

- b. memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
 - c. memperkuat strategi transaksi *term-repo* dan *swap valas* yang kompetitif; dan
 - d. memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement (repo)* antarpelaku pasar.
2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*, dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM;
4. Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 30 Juni 2025 meliputi:
 - a. Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan
 - b. Kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000; dan
5. Penguatan literasi dan edukasi pengguna dan merchant QRIS khususnya pada wilayah-wilayah destinasi utama pariwisata guna memperkuat akseptasi QRIS Antarnegara.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.

Bank Indonesia memperkuat dan memluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB 2

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,93% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (4,90%; yoy). Pertumbuhan tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,95% (yoy). Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Konsumsi RT tetap resilien dan tumbuh tinggi didorong oleh konsumsi hotel dan restoran sejalan dengan tingginya jumlah wisman dan wisnus yang datang ke Jakarta karena masifnya pelaksanaan MICE dan event serta berlangsungnya periode libur anak sekolah. Selanjutnya, investasi juga masih tumbuh baik sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitalahun Pemerintah maupun swasta seperti MRT dan LRT Jakarta. Perbaikan ekspor juga berlanjut yang terutama didorong oleh perbaikan ekspor barang khususnya mesin dan pesawat mekanik serta pakaian jadi. Adapun Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2024 masing-masing didorong oleh meningkatnya belanja khususnya yang melalui APBN serta tingginya aktivitas partai politik dan organisasi sosial jelang kampanye pilkada di Jakarta.

Dari sisi lapangan usaha (LU) utama DKI Jakarta, meningkatnya pertumbuhan terutama didorong oleh kinerja LU perdagangan, LU jasa keuangan dan LU konstruksi. LU perdagangan tumbuh meningkat yang tercermin antara lain dari tingginya indeks penjualan ritel. LU jasa keuangan juga turut menopang pertumbuhan didorong oleh penyaluran kredit di Jakarta yang masih tetap tumbuh tinggi. LU Konstruksi juga masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan masih terus berlanjutnya proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitalahun di Jakarta. LU utama lainnya yaitu LU industri pengolahan serta LU informasi dan komunikasi (infokom) juga tumbuh positif yang masing-masing didorong oleh perbaikan kinerja di industri industri kimia, barang dari logam, dan makanan minuman serta tingginya penggunaan data dan internet di Jakarta.

Memasuki triwulan IV 2024, ekonomi DKI Jakarta diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT sejalan dengan berlangsungnya HBKN Natal dan Tahun Baru serta pilkada serentak. Kinerja investasi juga diprakirakan masih tumbuh meningkat seiring dengan masih masuknya investasi untuk proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitalahun. Adapun kinerja ekspor juga diprakirakan terus membaik didorong oleh semakin membaiknya ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor termasuk Jepang. Selain itu, perbaikan ekspor juga ditopang oleh ekspor komoditas lainnya termasuk komoditas pendukung ekspor otomotif (plastik dan bahan kimia). Dari sisi LU, lebih tingginya perekonomian Jakarta terutama didorong oleh meningkatnya LU perdagangan, LU konstruksi, LU industri pengolahan. LU lainnya seperti jasa keuangan juga diprakirakan akan tumbuh meningkat didorong oleh akselerasi penyaluran kredit di akhir tahun.



Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (yoy)



4,93%
Triwulan III 2024

4,90%
Triwulan II 2024

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)



5,26%
Triwulan III 2024

5,28%
Triwulan II 2024

Pertumbuhan Investasi (yoy)



4,27%
Triwulan III 2024

4,61%
Triwulan II 2024

Pertumbuhan Ekspor (yoy)



13,40%
Triwulan III 2024

7,07%
Triwulan II 2024

A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III 2024

Ekonomi DKI Jakarta tumbuh meningkat pada triwulan III 2024, yaitu sebesar 4,93% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,90% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2024 sehingga turut menjadi penopang pertumbuhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama didorong oleh kinerja LU perdagangan, LU jasa keuangan dan LU konstruksi. LU utama lainnya seperti industri pengolahan dan infokom juga masih tumbuh positif. Meskipun tumbuh meningkat, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2024 berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,95% (yoy) (Grafik 2.1).

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, ekonomi DKI Jakarta yang tumbuh meningkat pada triwulan III 2024 terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya, yaitu sebesar 59,12%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 5,26% (yoy). Konsumsi RT memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian DKI Jakarta triwulan III 2024, yakni 3,10% (Grafik 2.2). Dengan pangsa

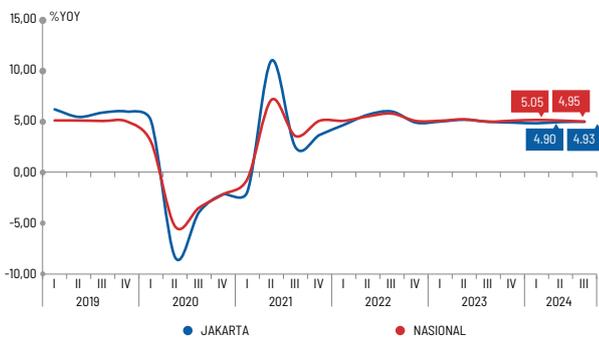
sebesar 37,96%, Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga tercatat tumbuh positif menjadi sebesar 4,27% (yoy) pada triwulan III 2024 dan berkontribusi sebesar 1,63%. Adapun konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 11,99% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 0,26% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,69% (yoy). Konsumsi Pemerintah dengan pangsa sebesar 10,11% tumbuh tinggi mencapai 10,81% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh terkontraksi -5,62% (yoy), sehingga memberikan kontribusi sebesar 1,04%.

Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh meningkat dari 7,07% (yoy) pada triwulan II 2024 menjadi 13,40% (yoy) pada triwulan III 2024. Adapun ekspor memiliki pangsa sebesar 64,41% dan menyumbang 7,99% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2024. Kinerja impor pada triwulan III 2024 juga tumbuh meningkat menjadi sebesar 13,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,30%, yoy), sehingga memberikan kontribusi sebesar -9,33% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Secara keseluruhan, komponen Net Ekspor mencatatkan defisit dengan kontribusi sebesar -1,34% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2024 seiring dengan lebih tingginya peningkatan impor dibandingkan ekspor.

Konsumsi Rumah Tangga (RT)

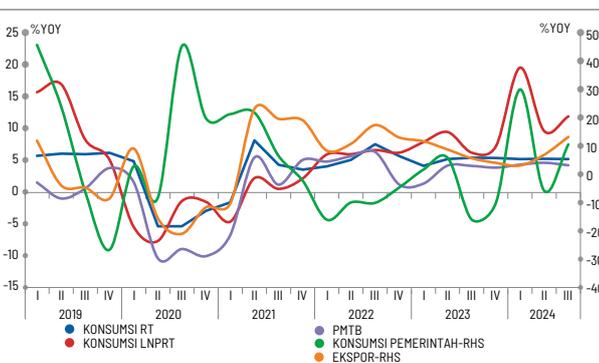
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III 2024. Konsumsi RT pada triwulan III 2024 tetap resilien dan tumbuh tinggi, yaitu sebesar 5,26% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,28%; yoy) (Grafik 2.4). Dengan perkembangan tersebut, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar yaitu 3,10% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2024 (Grafik 2.3). Pertumbuhan terutama didorong oleh konsumsi hotel dan restoran sejalan dengan tingginya jumlah wisman dan wisnus yang datang ke Jakarta karena masifnya pelaksanaan MICE dan event serta berlangsungnya periode libur anak sekolah. Perkembangan tersebut tercermin dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jakarta pada triwulan III 2024 yang meningkat dari 49,27% menjadi 53,66% (Grafik 4). Tingginya TPK didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta yang tumbuh mencapai 52,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (39,53% yoy).

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara ke Jakarta tidak terlepas dari masifnya pelaksanaan MICE dan event di Jakarta pada triwulan III 2024 yaitu antara lain berupa konser musik internasional dan pameran seperti konser Bruno Mars, We The Fest, dan Jakarta Fair Kemayoran. Tingginya pertumbuhan juga tercermin dari Indeks Penjualan Eceran (IPE), yang tumbuh sebesar 23,66% (yoy) yang terutama didorong oleh penjualan barang rekreasi (16,27% yoy) dan bahan bakar kendaraan (21,98% yoy) (Grafik 2.5).



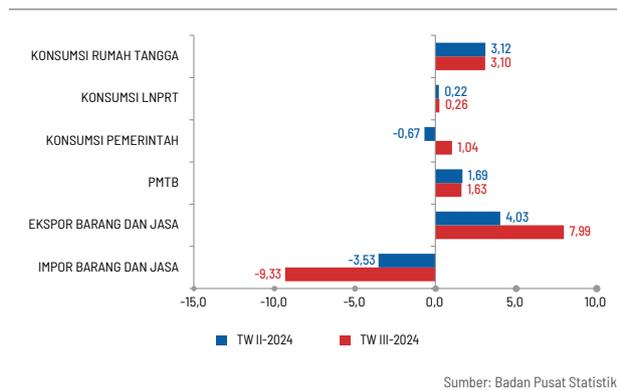
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Secara Triwulanan

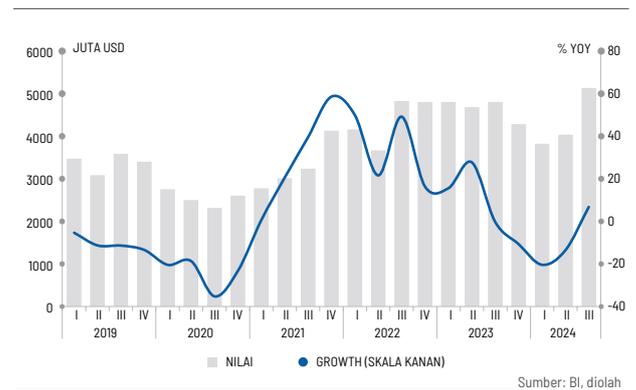


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

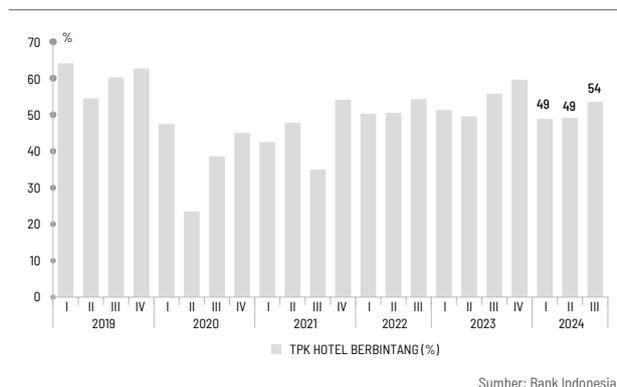
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2024 Sisi Pengeluaran



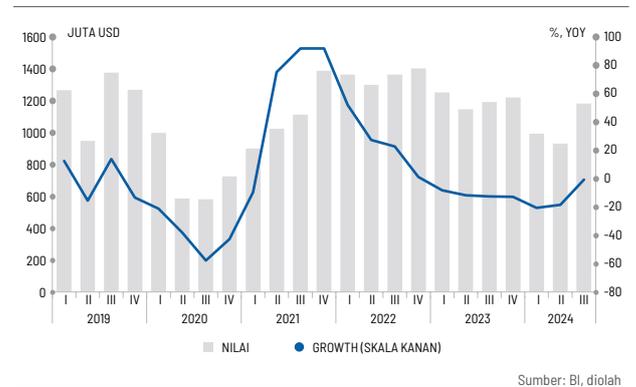
Grafik 2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2024 Sisi Pengeluaran



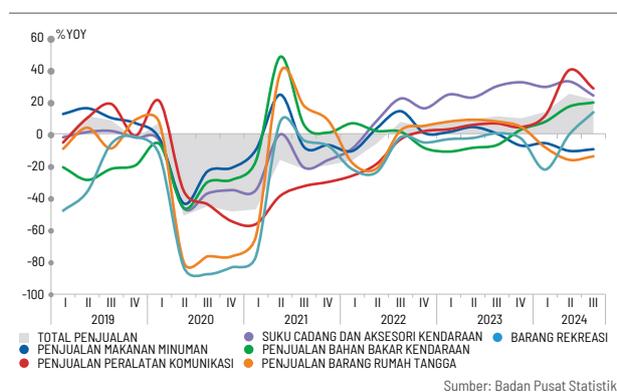
Grafik 2.6 Impor Barang Modal



Grafik 2.4 TPK Hotel Berbintang di Jakarta



Grafik 2.7 Impor Besi dan Baja



Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

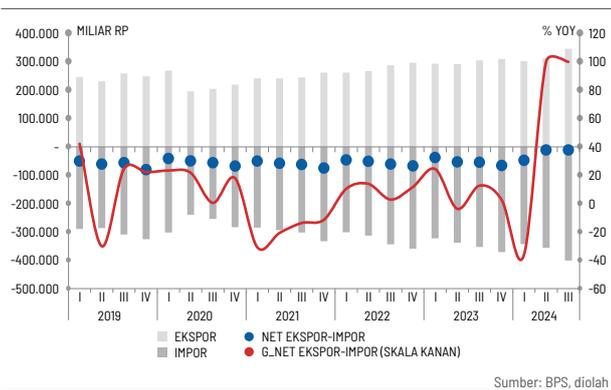
Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga didorong oleh investasi yang masih tetap tumbuh baik. Investasi pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,27% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (4,66%;yoy) sehingga memberikan andil sebesar 1,63% terhadap perekonomian Jakarta (Grafik 2 dan 3). Peningkatan terutama didorong oleh investasi bangunan sejalan dengan berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitaluh Pemerintah, seperti MRT, LRT, dan jalan tol. Perkembangan ini tercermin dari belanja modal Pemerintah baik yang melalui APBN maupun APBD. Belanja modal Pemerintah yang melalui APBN pada triwulan III 2024 tumbuh tinggi

mencapai 155,32% (yoy) atau menyerap 69,96% dari pagu APBN 2024. Sementara itu, belanja modal yang melalui APBD tercatat tumbuh mencapai 228,36% (yoy) atau menyerap 13,39% dari pagu. Meningkatnya investasi juga tercermin dari peningkatan investasi pelaku usaha berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia serta impor barang modal yang tumbuh positif sebesar 6,68% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi (-13,65%; yoy) (Grafik 2.6 dan 2.7).

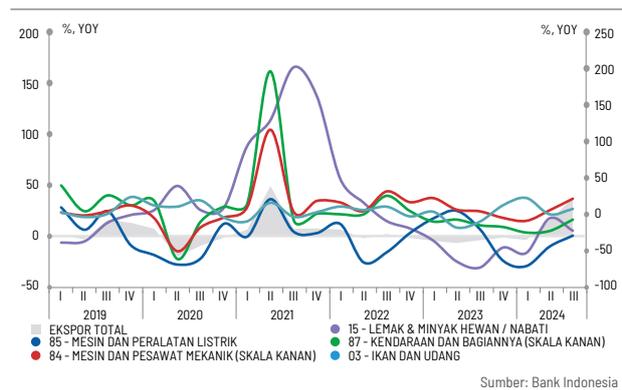
Net Ekspor

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2024 masih ditopang oleh kinerja pertumbuhan yang relatif positif dari net ekspor. Pada triwulan III 2024, net ekspor DKI Jakarta mencatat pertumbuhan yang positif meskipun tumbuh melambat.

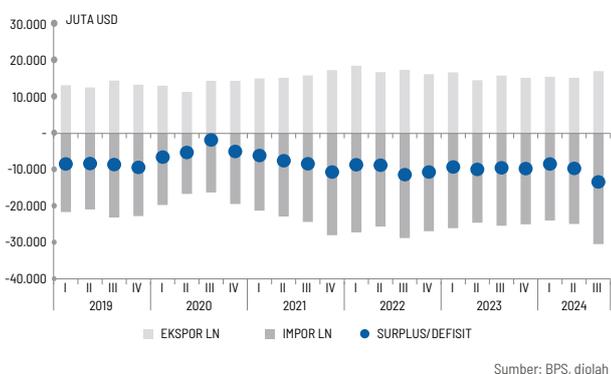
Net ekspor DKI Jakarta mencatatkan defisit sebesar Rp55,45 triliun pada triwulan III 2024, lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp44,29 triliun. Kinerja tersebut mencatatkan pertumbuhan net ekspor sebesar 99,89% (yoy) (Grafik 2.8). Dari sisi neraca perdagangan luar negeri, DKI Jakarta mencatatkan defisit net ekspor, yakni sebesar sebesar USD13,30 miliar pada triwulan III 2024. Defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit neraca perdagangan pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD9,58 miliar (Grafik 2.9). Jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui DKI Jakarta tercatat tumbuh



Grafik 2.8 Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta



Grafik 2.10 Ekspor Luar Negeri Barang



Grafik 2.9 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta



Grafik 2.11 Ekspor Spare Part Otomotif

positif sebesar 7,47% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Sama halnya dengan kinerja ekspor, kinerja impor luar negeri juga tumbuh tinggi mencapai 20,03% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,44% (yoy).

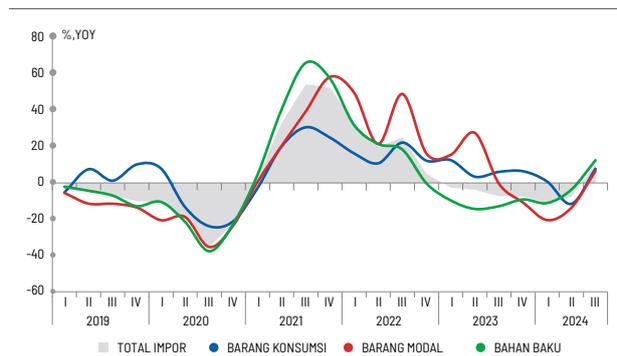
Ekspor

Perbaikan ekspor juga berlanjut pada triwulan III 2024 sehingga turut menjadi penopang pertumbuhan. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 13,40% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,06% (yoy) sehingga memberikan kontribusi sebesar 7,99% terhadap perekonomian Jakarta (Grafik 2.2 dan 2.3). Meningkatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh perbaikan ekspor barang dan meningkatnya ekspor jasa. Berdasarkan komoditasnya, perbaikan ekspor barang ke luar negeri terutama didorong oleh komoditas mesin dan pesawat mekanik yang tumbuh sebesar 22,04% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,89% (yoy), serta pakaian jadi yang tumbuh mencapai 58,88% dari sebelumnya yang tumbuh negatif -15,40% (yoy) (Grafik 2.10). Ekspor otomotif yang menjadi salah satu ekspor unggulan Jakarta, pada triwulan III 2024 juga mengalami perbaikan. Berdasarkan data dari Gaikindo, ekspor *spare part* mobil pada triwulan III 2024 membaik menjadi -0,15% (yoy) dari triwulan II 2024 yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar -56,38% (yoy) (Grafik 2.11).

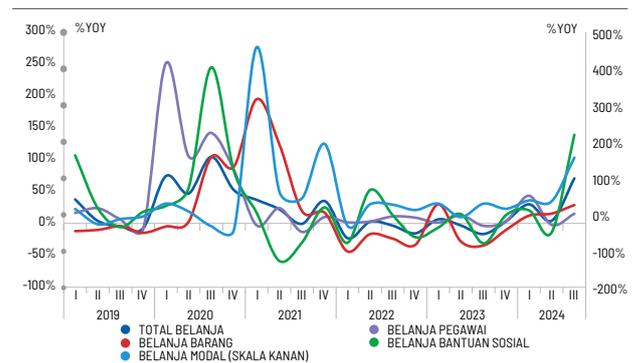
Dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada triwulan III 2024 juga tumbuh meningkat yang tercermin dari meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta yang tumbuh mencapai 52,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (39,53% yoy).

Impor

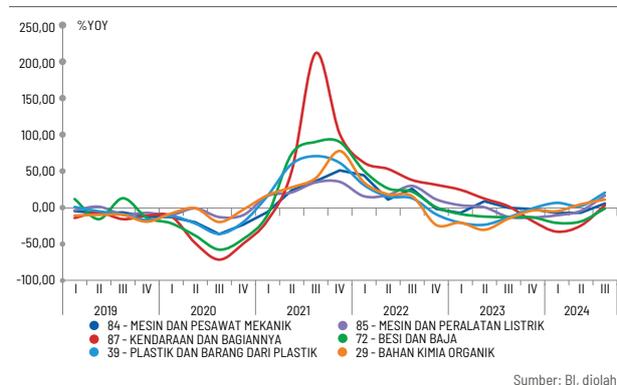
Sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor, kinerja impor juga tumbuh meningkat. Impor pada triwulan III 2024 tumbuh mencapai 13,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,32%, yoy), yang terutama didorong oleh meningkatnya impor barang. Berdasarkan jenisnya, meningkatnya impor barang terjadi pada seluruh jenis barang baik barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal. Impor barang konsumsi tumbuh sebesar 7,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif (-11,53%; yoy). Impor bahan baku juga tumbuh mencapai 12,56% (yoy) setelah sebelumnya juga mengalami kontraksi -3,66% (yoy). Adapun impor barang modal juga tumbuh 6,68% (yoy) setelah pada triwulan lalu tumbuh negatif (-13,65%; yoy) (Grafik 2.12). Berdasarkan komoditasnya, meningkatnya impor barang terutama bersumber dari peningkatan impor plastik dan barang dari plastik dari 2,96% (yoy) menjadi 21,42% (yoy), impor mesin dan peralatan listrik dari -3,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 17,62% (yoy), serta impor bahan kimia organik dari 5,33% (yoy) menjadi 11,80% (yoy) (Grafik 2.13). Sementara itu, impor jasa pada triwulan III 2024 tumbuh melambat dari 32,19% (yoy) pada triwulan II 2024 menjadi 24,34% (yoy) yang disebabkan oleh



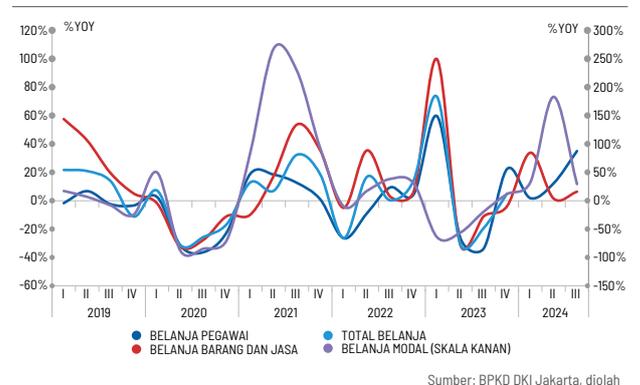
Grafik 2.12 Impor Jakarta Menurut Jenisnya



Grafik 2.14 Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga (APBN) di Jakarta



Grafik 2.13 Impor Jakarta Menurut Komoditasnya



Grafik 2.15 Pertumbuhan Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)

normalisasi perjalanan ke luar negeri pasca tingginya perjalanan haji dan umroh pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri yang berlangsung pada triwulan II 2024.

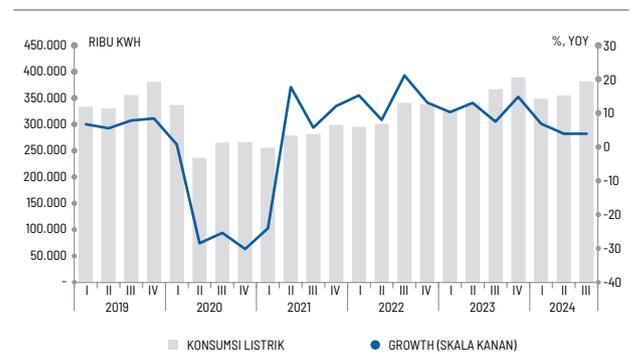
Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi pada triwulan III 2024. Konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 10,81% (yoy) pada triwulan III 2024 setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi -5,62% (yoy)(Grafik 2.2). Dengan pangsa sebesar 10,11%, Konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi sebesar 1,04% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2024, setelah pada triwulan sebelumnya berkontribusi negatif (-0,67%) (Grafik 2.3). Tingginya pertumbuhan konsumsi Pemerintah terutama didorong oleh meningkatnya belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial khususnya yang melalui APBN. Belanja pegawai yang melalui APBN pada triwulan III 2024 tumbuh 15,07% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -2,40% (yoy) atau menyerap 21,97% dari pagu. Adapun belanja barang dan jasa juga tumbuh 28,91% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2024 (15,43%; yoy) atau menyerap 25,87% dari pagu. Belanja bansos juga tumbuh signifikan mencapai 139,14% (yoy) setelah pada triwulan lalu mengalami kontraksi -13,90% (yoy). Belanja modal juga tumbuh tinggi mencapai 155,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,57% (yoy) atau menyerap 69,96% dari pagu (Grafik 2.14). Dari sisi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi total belanja pada triwulan III 2024 juga tumbuh 8,77% (yoy), meskipun

melambat dibandingkan triwulan lalu (62,66%; yoy) Pertumbuhan terutama bersumber dari belanja pegawai dan belanja modal yang masing-masing tumbuh 35,10% (yoy) dan 29,47% (yoy)(Grafik 2.15).

Konsumsi LNPRT

Konsumsi LNPRT tumbuh terakselerasi jelang periode kampanye pilkada di Jakarta. Konsumsi LNPRT pada triwulan III 2024 tumbuh mencapai 11,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 9,69% (yoy) (Grafik 2.2). Capaian tersebut tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi listrik kategori sosial di DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,99% (yoy) (Grafik 2.16). Kinerja konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi sejalan dengan tingginya aktivitas partai politik dan organisasi sosial jelang kampanye pilkada di Jakarta.



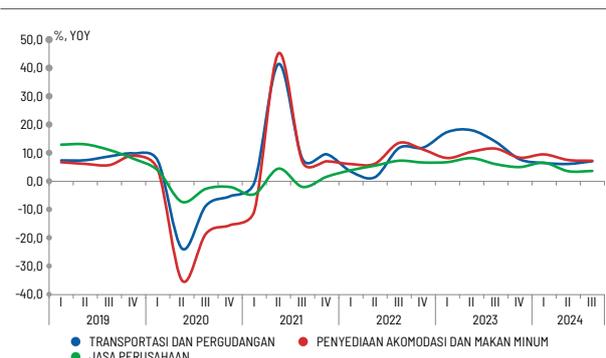
Grafik 2.16 Konsumsi Listrik Kategori Sosial di Jakarta

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

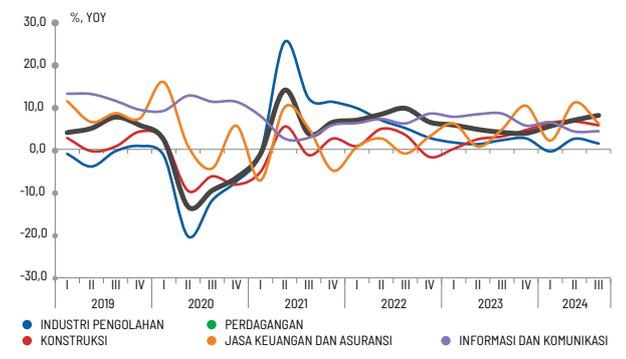
Dari sisi Lapangan Usaha utama Jakarta, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi. LU utama lainnya yaitu LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh baik. Selain 5 (lima) LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), serta LU Jasa Perusahaan tumbuh meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 2.17 dan 2.18). Pada triwulan III 2024, LU Perdagangan masih menjadi ponopang utama perekonomian Jakarta, disusul oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Infokom dengan porsi masing-masing sebesar 17,95%, 11,56%, 11,32%, 10,62%, dan 9,24% (Grafik 2.17).

LU utama tersebut di atas juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan laporan, utamanya LU Perdagangan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 1,25% (yoy), 0,63% (yoy), dan 0,61% (yoy). (Grafik 2.19). Selanjutnya, LU Infokom dan LU Industri Perdagangan juga turut memberikan kontribusi sebesar 0,59% (yoy) dan 0,15% (yoy) (Grafik 2.20). LU lainnya seperti LU Akmamin memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,36% (yoy) seiring dengan banyaknya penyelenggaraan MICE dan event di Jakarta seperti Jakarta Fair, We The Fest, Pestapora, The 90's Festival, Jakarta

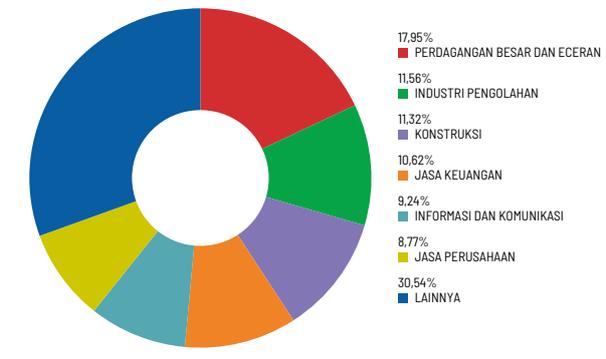
Sneaker Day, Indonesia International Smart City, China International E-Commerce, hingga konser berbagai artis internasional seperti Niki Zefanya dan Bruno Mars. LU Transgud dan LU Jasa Perusahaan juga masing-masing memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,30% (yoy) dan 0,30% (yoy) didukung oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan di Jakarta, serta banyaknya penyelenggaraan event yang melibatkan jasa Event Organizer (EO).



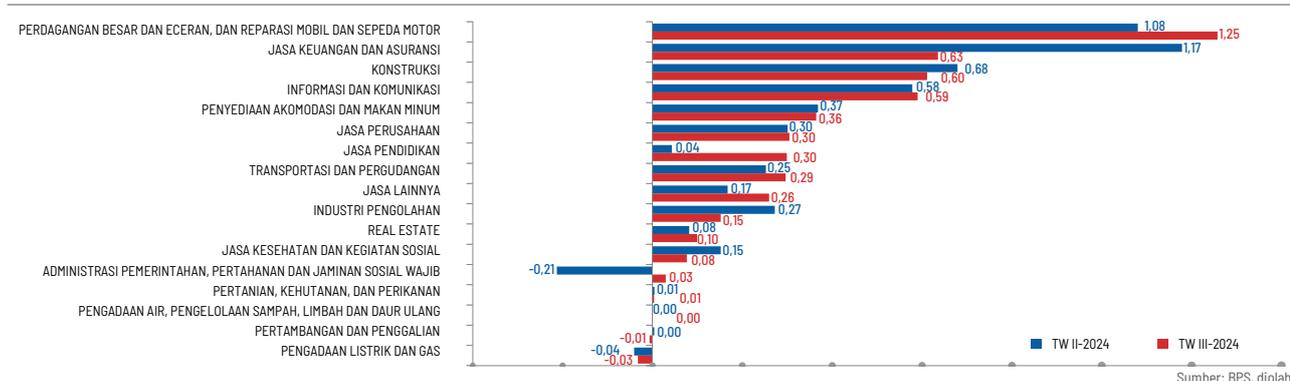
Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.18 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan



Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.17 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama



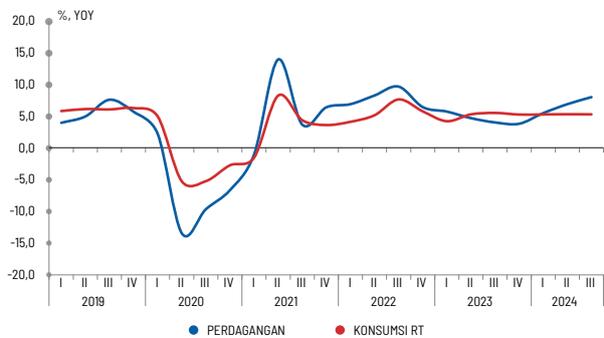
Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.19 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan III 2024



Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.20 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

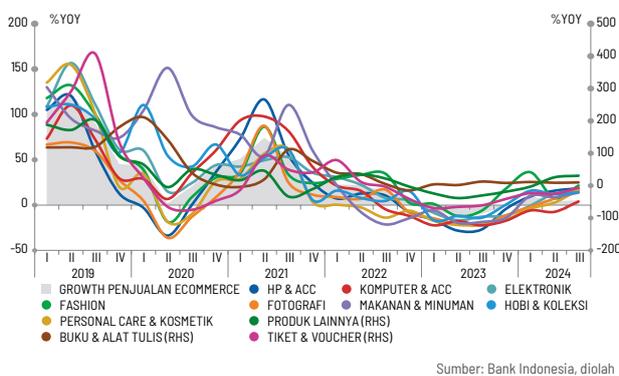
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan dengan kontribusi 1,25% (yoy) menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2024, mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,99% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (6,87%; yoy) (Grafik 2.21). Peningkatan kinerja LU Perdagangan seiring dengan permintaan masyarakat yang juga meningkat, tercermin dari indeks ritel Jakarta yang berada pada level tinggi, begitu pula dengan penjualan *e-commerce* di Jakarta yang pada periode laporan tumbuh 5,52% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (4,27%; yoy), peningkatan penjualan pada *e-commerce* terutama pada produk *fashion*, fotografi, elektronik, *personal care* dan kosmetik, serta buku dan alat tulis sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru anak sekolah dan perguruan tinggi yang berlangsung pada triwulan III 2024. Meningkatnya kinerja LU Perdagangan tergambar pula dari kinerja perdagangan luar negeri melalui ekspor produk unggulan yakni kendaraan dan bagiannya, mesin dan pesawat mekanik, serta ikan dan udang yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar -7,17% (yoy), 22,04% (yoy), dan 7,83% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar -22,96% (yoy), 5,89% (yoy), dan 0,41% (yoy). Jika dilihat secara keseluruhan, nilai ekspor Jakarta tumbuh 37,78% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 15,34% (yoy) (Grafik 2.23).



Sumber: BPS, diolah

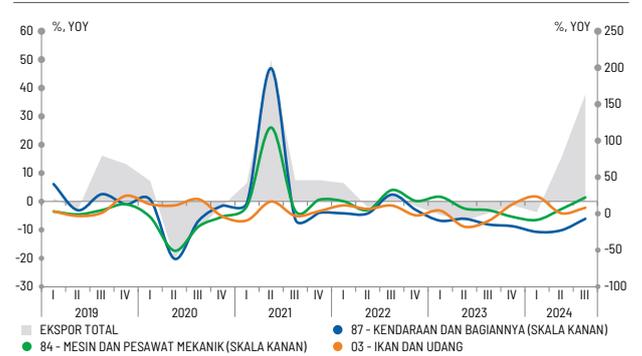
Grafik 2.21 Pertumbuhan LU Perdagangan dan Konsumsi RT



Sumber: Bank Indonesia, diolah

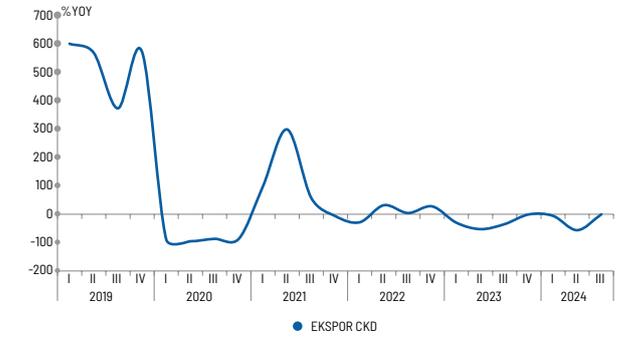
Grafik 2.22 Penjualan e-commerce Jakarta

Dari sisi ekspor otomotif, ekspor mobil dalam bentuk *completely knocked down* (CKD) Jakarta meski masih berkontraksi -0,27% (yoy) namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi dalam (-56,38%; yoy), hal ini seiring dengan terus membaiknya kinerja ekspor otomotif Jakarta sejak April 2024 dimana ekspor ke beberapa negara tujuan utama a.l. Jepang, Meksiko, Uruguay, dan Ecuador kembali berlanjut, serta minimalnya dampak tensi geopolitik di Timur Tengah terhadap rute ekspor barang otomotif Jakarta yang saat ini dapat melewati jalur alternatif yakni Jeddah dan Damma. Pada saat yang sama, penjualan mobil di Jakarta juga tercatat sebesar 35,71ribu unit atau meski masih berkontraksi -10,49% (yoy) namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -12,98% (yoy) (Grafik 2.25).



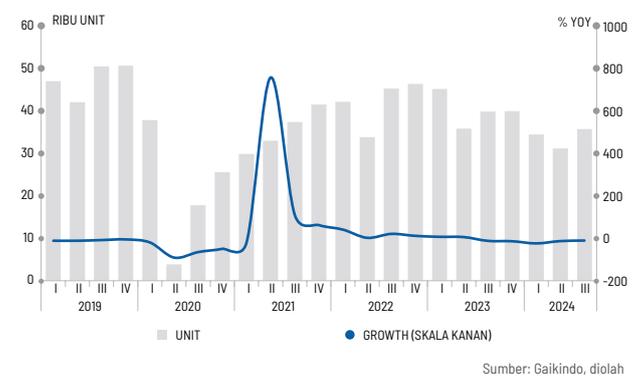
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.23 Perkembangan Ekspor Produk Unggulan Jakarta



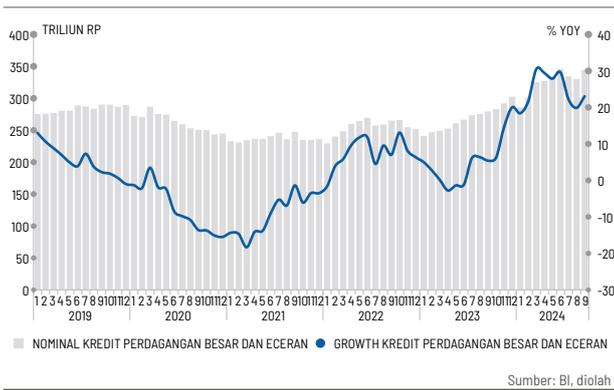
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.24 Perkembangan Ekspor Otomotif CKD Jakarta



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.25 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta

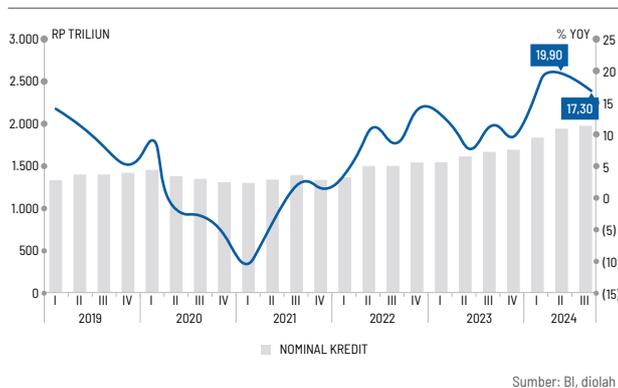


Grafik 2.26 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan Jakarta

Kredit LU Perdagangan pada akhir triwulan III 2024 atau September 2024 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,18% (yoy), lebih tinggi dari awal triwulan III 2024 yang sebesar 22,40% (yoy) (Grafik 2.26).

Lapangan Usaha Jasa Keuangan

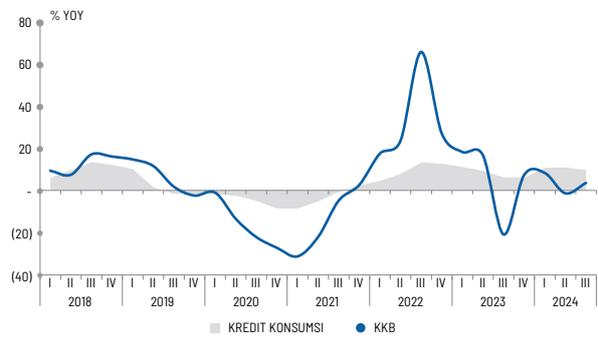
Pada triwulan III 2024, LU Jasa Keuangan dengan *share* 10,72% terhadap PDRB Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,09% (yoy), tetap positif meski melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 10,99% (yoy) (Grafik 2.27). Tetap positifnya pertumbuhan LU Jasa Keuangan tercermin baik dari total penyaluran kredit maupun total DPK di Jakarta yang masih tumbuh positif. Total penyaluran kredit di Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp 2.572 Triliun atau tumbuh 17,30% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,90% (yoy) (Grafik xx). Masih tingginya pertumbuhan penyaluran kredit di Jakarta didorong oleh perbaikan penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) di Jakarta yang pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,44% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -1,45% (yoy) (Grafik 2.28). Hal ini juga sejalan dengan penjualan motor di Jakarta yang pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,7 juta unit atau tumbuh 0,12% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (0,04% yoy). Selain itu, dari sisi sektoral, ditopang oleh penyaluran kredit pada Industri Pengolahan yang tumbuh 13,48% (yoy), serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 22,57% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang



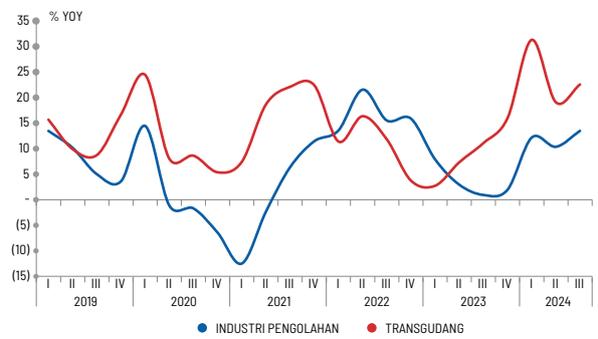
Grafik 2.27 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Perdagangan di Jakarta

masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,36% (yoy) dan 19,10% (yoy) (Grafik 2.29).

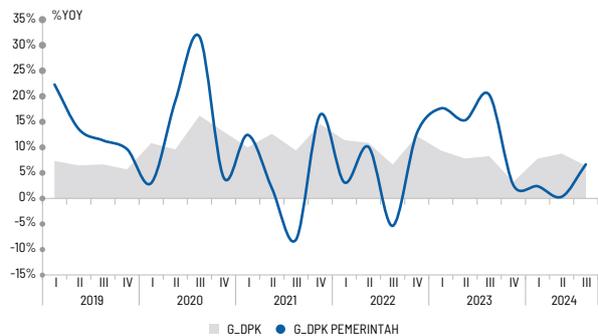
Selanjutnya, dari sisi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jakarta, pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 6,36% (yoy), tetap tinggi seiring pertumbuhan DPK Pemerintah yang sebesar 6,66% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,32% (yoy) (Grafik 2.30). Dari sisi kepemilikan rekening, masih tetap tumbuh positifnya perkembangan DPK di Jakarta ditopang oleh pertumbuhan pada rekening tabungan rumah tangga di Jakarta yang pada triwulan laporan tumbuh 6,67% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,05% (yoy) (Grafik 2.31).



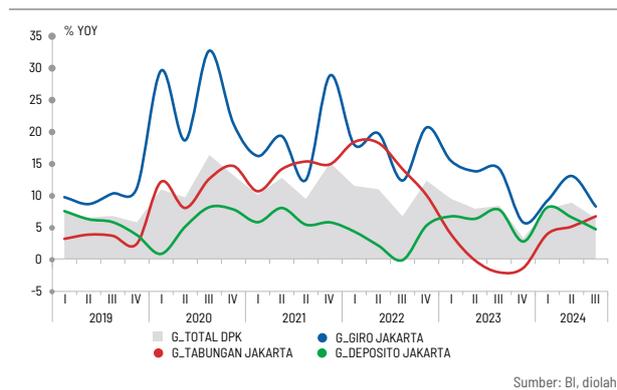
Grafik 2.28 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi dan KKB di Jakarta



Grafik 2.29 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri Pengolahan serta Transportasi dan Pergudangan



Grafik 2.30 Perkembangan DPK di Jakarta

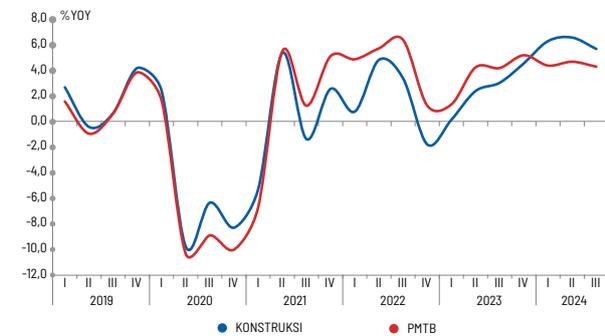


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.31 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta

Lapangan Usaha Konstruksi

Sejalan dengan masih tumbuh positifnya kinerja Investasi di Jakarta, LU Konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,65% (yoy), tetap positif meski tidak setinggi angka pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 6,55% (yoy) (Grafik 2.32). Kinerja LU Konstruksi yang tetap baik tercermin dari realisasi pengadaan semen di Jakarta yang tumbuh 0,77% (yoy) pada triwulan III 2024, membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -3,09% (yoy) (Grafik 2.33). Selain itu, nilai impor besi dan baja pendukung kegiatan konstruksi di Jakarta pada triwulan laporan meski masih terkontraksi -1,71% (yoy), namun membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang

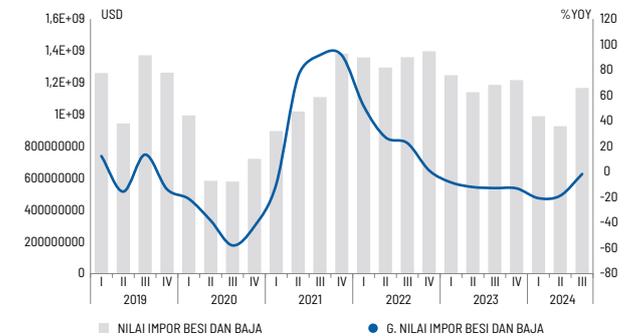


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.32 Pertumbuhan LU Konstruksi dan PMTB

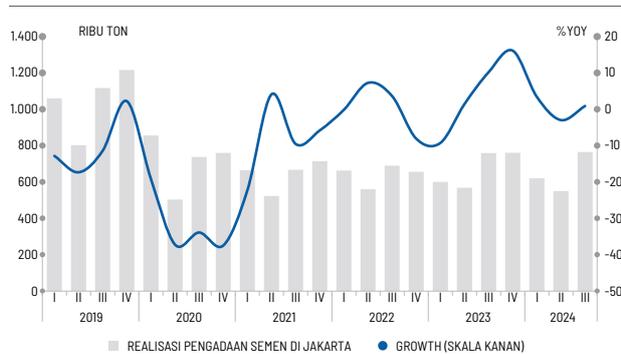
terkontraksi -18,72% (yoy) (Grafik 2.34). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan peningkatan usaha pada LU Konstruksi pada triwulan laporan yakni menjadi sebesar 4,67% SBT dari triwulan sebelumnya yang sebesar -4,67% SBT (Grafik 2.35).

Berbagai proyek eksisting Pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga proyek Pemerintah Daerah terus berlanjut pada triwulan III 2024. Pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 paket CP201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan telah mencapai 80,75%. Pembangunan Stasiun Thamrin saat ini meliputi pengecoran peron, instalasi *duct over track exhaust* (OTE), konstruksi tangga, penggalian entre 4, serta pemasangan suar penyejuk dan ventilasi di Thamrin 10. Selain itu, dilakukan *test pit*, relokasi utilitas entre 5, pengecoran *base slab* area parkir kereta, *backfilling* stasiun, pemasangan dinding AAC dan *plaster* di *concourse*, serta pemasangan *hanging beam* untuk *platform screen doors* dan sistem HVAC, drainase, pemadam kebakaran, dan instalasi elektrikal. Di Stasiun Monas, pekerjaan yang sedang berlangsung termasuk pengecoran atap entre 2 tahap dua, instalasi *metal ceiling*, *finishing* lantai *homogenous tile*, pemasangan handrail dan granit di tangga, Fire Shutter, dinding ACP, *finishing* lantai di platform, serta persiapan *waterproofing* tangki *cooling tower*. Selain itu, dilakukan instalasi dan pengujian sistem HVAC, suplai air, drainase, pemadam kebakaran, elektrikal, dan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.34 Perkembangan Nilai Impor Besi dan Baja di Jakarta



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.33 Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.35 Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi di Jakarta

instalasi peralatan *cooling tower*. Lebih lanjut, progres konstruksi CP 202 (Harmoni – Sawah Besar – Mangga Besar) telah mencapai 36,68% dan saat ini sedang dalam pengerjaan D-Wall di Stasiun Mangga Besar, penambahan kekuatan tanah di sekitar Stasiun Sawah Besar, pembangunan lantai kerja sementara selama pekerjaan struktur utama stasiun, dan ekskavasi di area *launching shaft* Stasiun Harmoni. Di luar stasiun, pekerjaan fabrikasi *moulding tunnel segment*, dan komponen mesin bor terowongan. Sedangkan, untuk progres konstruksi CP203 (Glodok – Kota), pekerjaan juga berjalan sesuai dengan jadwal dan saat ini telah mencapai 60,25% dengan pekerjaan di Stasiun Kota meliputi pekerjaan struktur kolom, pemotongan *kingpost*, dan pembangunan terowongan dari Stasiun Kota menuju Stasiun Glodok. Sedangkan di Stasiun Glodok, pekerjaan meliputi persiapan kedatangan mesin bor terowongan 1 di sisi utara stasiun, persiapan peluncuran mesin bor terowongan 2 di sisi selatan stasiun, struktur tangga, tanki air, pekerjaan *mock up* material arsitektural, elektrikal dan mekanikal.

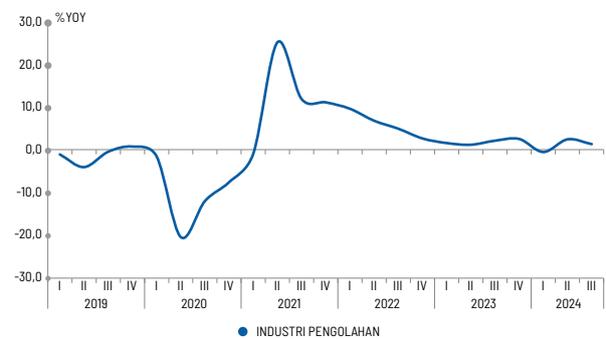
Berdasarkan Building Construction Information (BCI) Asia, beberapa proyek konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta diantaranya New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) sejak Sept 2022 s.d. Agustus 2025, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment sejak 15 Maret 2022 s.d. Q2 2025, dan jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll *road development*: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) sejak Juni 2022 s.d. Juli/Des 2024. Selanjutnya, progres proyek pembangunan tanggul pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus berlangsung. Pembangunan tanggul Muara Angke dengan target pengerjaan pada 2022 sampai 2028. Proyek pengerjaan 6 ruas jalan tol dalam kota (tahap I sesi B dan C, tahap II, dan tahap III) juga terus berlanjut serta proyek pembangunan kawasan TOD MRT juga terus berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan (KBT Istora-Senayan, KBT Blok M-ASEAN, Park and Ride Lebak Bulus, Pelebaran Jalan Pati-Juanda, Pedestrianisasi Jalan Blora, Penataan Taman Kudus, dan KBT Dukuh Atas). Di Jakarta sendiri terdapat beberapa *on going project* dengan nilai tertinggi terdapat pada proyek pekerjaan rancang bangun Terminal Kalibaru tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok.

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Selanjutnya, LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,33% (yoy), tetap positif meski lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,46% (yoy) (Grafik 2.36). Tetap positifnya kinerja LU Industri Pengolahan kemudian tercermin dari kinerja produksi mobil di Jakarta pada triwulan III 2024 yang sebesar 323,54 ribu unit atau meski masih terkontraksi -10,40% (yoy) namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -13,77% (yoy) (Grafik 2.37). Kinerja produksi mobil yang membaik juga sejalan dengan penjualan luar negeri atau ekspor yang membaik seiring dengan berlangsungnya kembali ekspor ke beberapa negara tujuan antara lain Meksiko, Uruguay, dan Ekuador setelah permasalahan isu uji keselamatan yang telah terselesaikan dengan baik. Selain itu, konsumsi listrik industri pada triwulan laporan

tercatat sebesar 904,80 juta kWh atau mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,13% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -4,32% (yoy) (Grafik 2.38). Lebih lanjut, kinerja LU Industri Pengolahan yang masih tetap baik juga tergambarkan melalui impor bahan baku dan barang modal Jakarta pada triwulan laporan yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,51% (yoy) dan 13,13% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang masing-masing terkontraksi sebesar -3,66% (yoy) dan -6,59% (yoy) (Grafik 2.39).

Penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,48% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 10,36% (yoy) (Grafik 2.40). Hasil SKDU Bank Indonesia juga menunjukkan



Sumber: PLN, diolah

Grafik 2.36 Perkembangan Kinerja Industri Pengolahan Jakarta



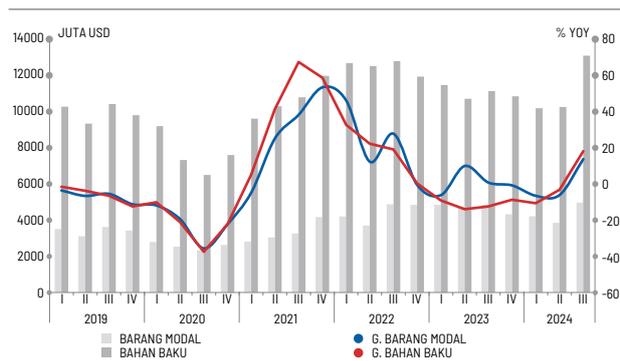
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.37 Perkembangan Produksi Mobil Jakarta



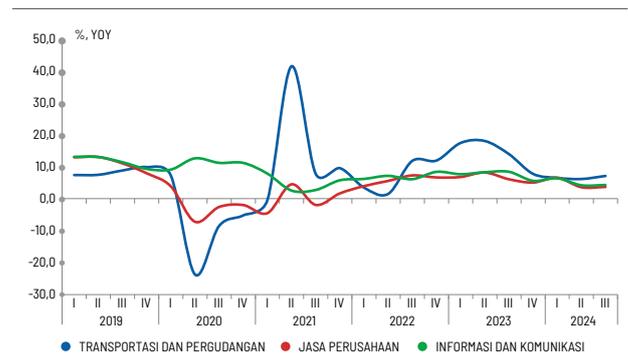
Sumber: PLN, diolah

Grafik 2.38 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri Jakarta



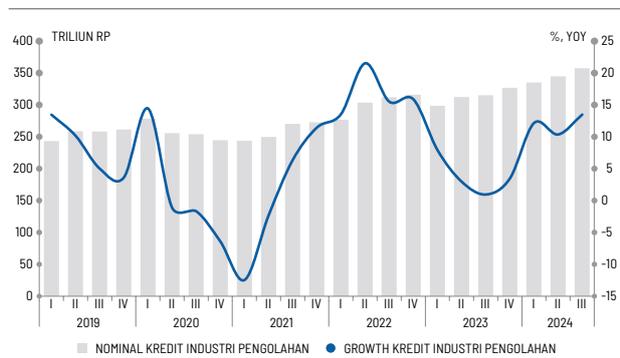
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.39 Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku dan Barang Modal Jakarta



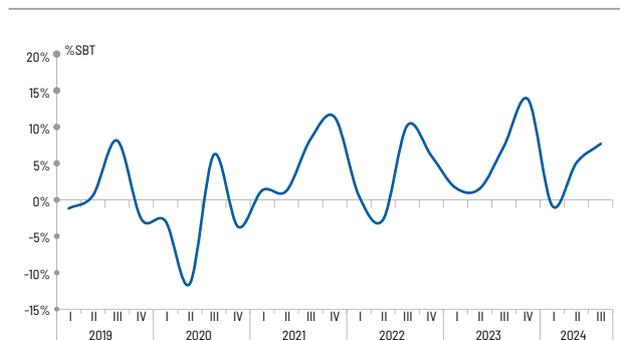
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.42 Pertumbuhan LU Infokom, Transgud, dan Jasa Perusahaan



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.40 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Industri Pengolahan Jakarta



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.41 Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Industri Pengolahan Jakarta

peningkatan pada LU Industri Pengolahan yang pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 7,68% SBT, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,09% SBT (Grafik 2.41).

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Perusahaan

LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) mencatatkan peningkatan kinerja pada triwulan III 2024 dengan tumbuh 4,27% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,19% (yoy) (Grafik 2.42). Peningkatan kinerja LU Infokom didorong oleh tingginya penggunaan data dan internet di Jakarta dan peningkatan jumlah penonton

bioskop. Selanjutnya, LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) mencatat pertumbuhan sebesar 7,10% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy). Peningkatan kinerja LU Transgud sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang angkutan baik darat maupun udara. LU Jasa Perusahaan pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan kinerja dengan tumbuh 3,65% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,57% (yoy). Peningkatan kinerja LU Jasa Perusahaan seiring dengan tingginya penyelenggaraan MICE dan Konser di Jakarta yang melibatkan jasa EO serta meningkatnya kinerja jasa perusahaan reklame.

B. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2024

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2024 diperkirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik, meningkatnya investasi serta berlanjutnya perbaikan ekspor. Masih kuatnya permintaan domestik sejalan dengan berlangsungnya HBKN Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV 2024. Kinerja investasi juga diperkirakan masih tumbuh meningkat seiring dengan masih masuknya investasi untuk proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitanah. Kinerja ekspor juga diperkirakan terus membaik didorong oleh berlanjutnya aktivitas ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor termasuk Jepang yang sebelumnya dihentikan karena adanya isu kualitas produk. Selain itu, perbaikan ekspor juga didukung oleh pertumbuhan ekspor dari komoditas lainnya termasuk komoditas pendukung ekspor otomotif (plastik dan bahan kimia), mesin dan mekanik, karet serta barang-barang rajutan sejalan dengan meningkatnya permintaan pada musim dingin. Sementara itu, konsumsi Pemerintah juga diperkirakan masih akan tumbuh positif didorong oleh belanja barang dan jasa dalam rangka mendukung aktivitas pilkada serentak pada triwulan IV 2024.

Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, LU Perdagangan diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi RT. Peningkatan juga diperkirakan terjadi pada LU konstruksi sejalan dengan meningkatnya investasi dan akselerasi pembangunan proyek strategis. LU industri pengolahan juga membaik didorong

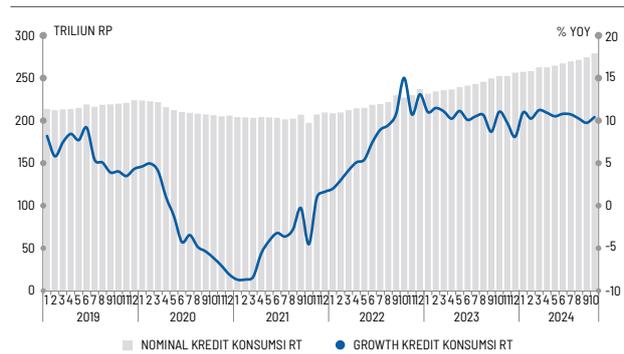
oleh perbaikan kinerja ekspor secara bertahap. LU lainnya seperti jasa keuangan juga diperkirakan tumbuh meningkat didorong oleh akselerasi penyaluran kredit di akhir tahun.

Komponen Pengeluaran (Permintaan) Konsumsi Rumah Tangga

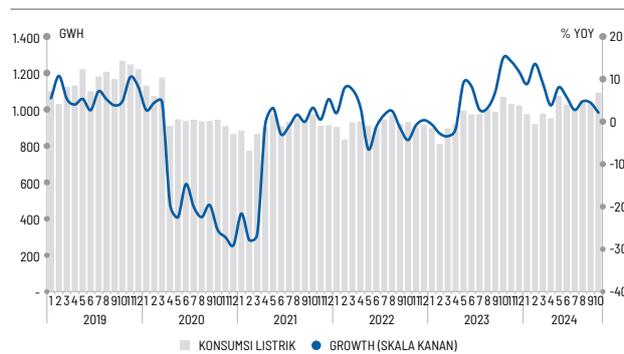
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan IV 2024. Peningkatan didorong oleh berlangsungnya HBKN Nataru serta pilkada serentak. Selain itu, berlangsungnya berbagai event dan MICE di akhir tahun juga diperkirakan akan mendorong konsumsi RT.

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2024 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan usaha sehingga berdampak pada penghasilan. Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan hasil SKDU pada Triwulan IV 2024 diperkirakan meningkat dari 47,43% menjadi 55,41%. (Grafik 2.44). Meningkatnya pertumbuhan konsumsi RT juga ditunjukkan oleh nilai impor barang konsumsi yang meningkat menjadi sebesar 3,07 milyar USD atau tumbuh positif 7,90% (yoy) (Grafik 2.45).

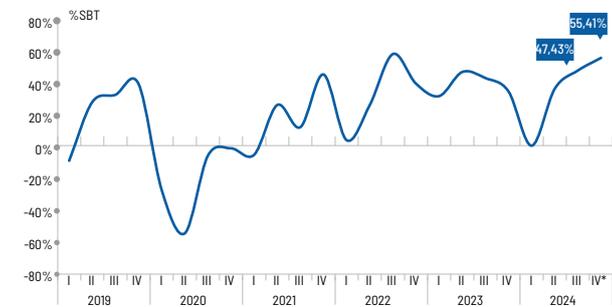
Prakiraan pertumbuhan konsumsi RT yang meningkat juga terindikasi dari penyaluran kredit konsumsi RT pada Oktober 2024 yang tercatat sebesar Rp279,93 T atau tumbuh 10,51% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya (9,84%; yoy). (Grafik 2.46). Selain



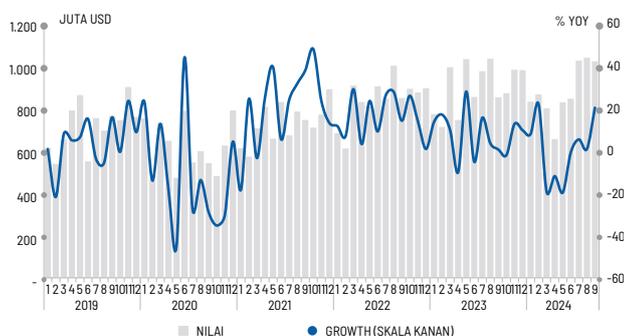
Grafik 2.45 Penyaluran Kredit Konsumsi RT



Grafik 2.46 Konsumsi Listrik RT



Grafik 2.43 Perkiraan Kegiatan Usaha Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha



Grafik 2.44 Impor Barang Konsumsi

itu, pertumbuhan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh 9,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,97%; yoy).

Prakiraan pertumbuhan konsumsi RT yang masih tetap kuat juga terindikasi dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. IKE pada Oktober 2024 tercatat sebesar 122,40 yang terutama ditopang oleh masih optimisnya indeks penghasilan konsumen, indeks ketersediaan lapangan kerja, serta indeks konsumsi barang tahan lama. Adapun IEK untuk 6 bulan yang akan datang pada Oktober 2024 juga masih berada pada level optimis yaitu sebesar 148,60.

Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga mengindikasikan konsumsi RT yang masih tetap tumbuh positif pada triwulan IV 2024. Indeks penjualan eceran (IPE) pada Oktober 2024 tercatat masih tetap tumbuh tinggi sebesar 18,76% (yoy), yang didorong terutama oleh peningkatan indeks penjualan makanan dan minuman, suku cadang dan aksesoris kendaraan, serta penjualan barang rumah tangga.

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah diperkirakan masih tetap tumbuh positif pada triwulan IV 2024, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama didorong oleh akselerasi belanja

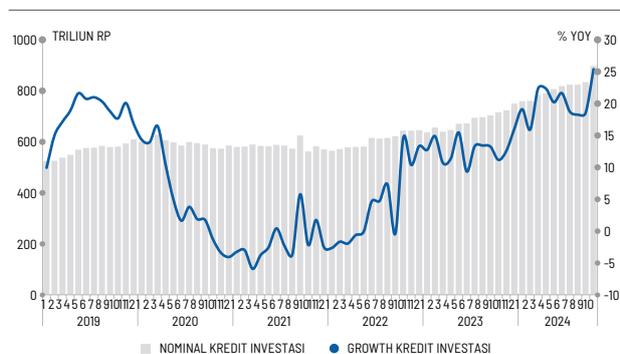
barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada triwulan IV 2024.

Kondisi tersebut terindikasi dari realisasi belanja APBN pada triwulan IV 2024 (data 1 s.d 31 Oktober 2024) tercatat sebesar 10,35% dari pagu atau tumbuh 26,90% (yoy), tetap tinggi dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 26,82% (yoy). Pertumbuhan belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh belanja barang yang tumbuh 87,21% (yoy) dan belanja subsidi yang tumbuh 48,74% (yoy). Indikasi konsumsi Pemerintah yang terakselerasi juga tercermin dari realisasi belanja Pemerintah melalui APBD pada Tw IV 2024 (data s.d 18 Oktober 2024) yang tercatat sebesar 55,91% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (55,33% dari pagu) yang didorong oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Meskipun demikian, konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh melambat yang disebabkan oleh *front loading* belanja Pemerintah khususnya terkait belanja modal sebelum periode pilkada serentak.

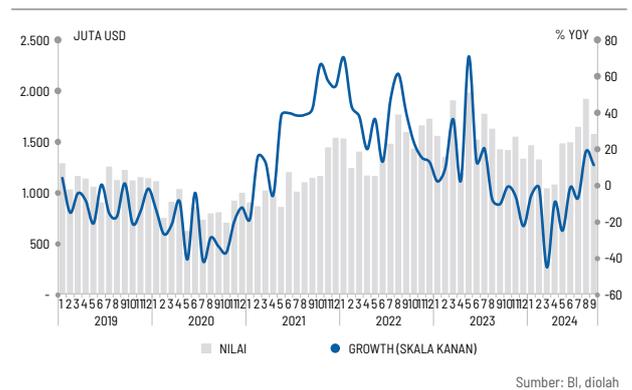
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Adapun kinerja PMTB pada triwulan IV 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama didorong oleh masih berlanjutnya investasi khususnya untuk proyek strategis multitalahun Pemerintah antara lain MRT, LRT, TOD dan jalan tol JORR 2. Peningkatan PMTB tersebut salah satunya terindikasi dari perkembangan investasi kegiatan usaha pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Berdasarkan hasil SKDU, perkembangan investasi kegiatan usaha pada Triwulan IV 2024 diperkirakan tumbuh tinggi sebesar 16,90%.

Meningkatnya PMTB pada triwulan IV 2024 juga terindikasi dari penyaluran kredit investasi pada Oktober 2024 yang tumbuh sebesar 25,37% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,53% (yoy) (Grafik 2.47). Pertumbuhan investasi juga terindikasi dari meningkatnya nilai impor barang modal juga tercatat sebesar USD 5,13 triliun atau tumbuh positif sebesar 7,90% (yoy), lebih baik dibandingkan nilai impor barang modal pada triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi (-13,65% yoy) (Grafik 2.48). Nilai impor besi dan baja juga membaik meski masih mengalami kontraksi 0,78% (yoy),



Grafik 2.47 Penyaluran Kredit Investasi



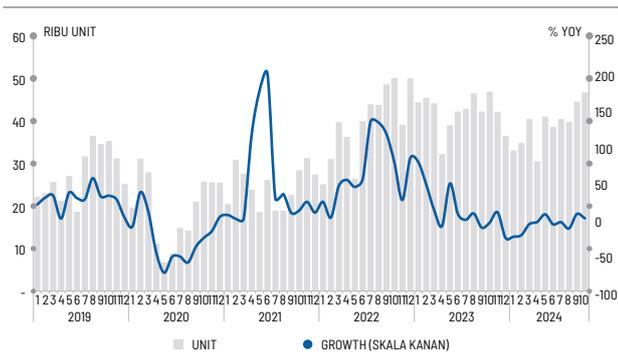
Grafik 2.48 Impor Barang Modal

lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya (-18,72% yoy). Selain itu, pertumbuhan investasi juga terindikasi dari realisasi belanja modal terutama yang melalui APBD. Realisasi belanja modal DKI Jakarta pada triwulan IV 2024 (data s.d 18 Oktober 2024) tercatat sebesar 25,07% dari pagu PABD 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yg sebesar 19,55% jika dibandingkan dengan pagu.

Meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) & Leparc senilai 326,96 juta USD, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai 257,3 juta USD, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai 115,38 juta USD, Mandiri IT Tower - Bumi Sliipi Jakarta Barat senilai 57,42 juta USD, jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll road development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai 109,87 juta USD serta berbagai proyek *green investment* seperti *waste management*, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.

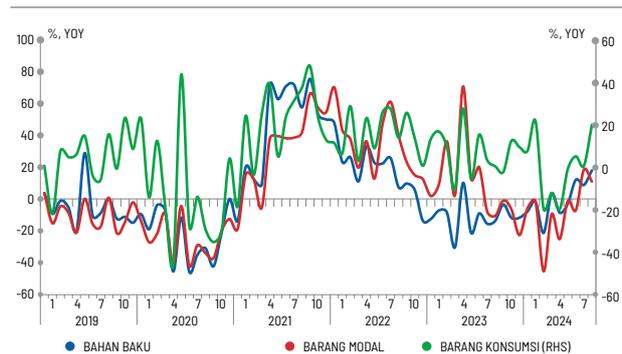
Ekspor

Perbaikan kinerja ekspor pada triwulan IV 2024 diperkirakan terus berlanjut. Lebih baiknya kinerja ekspor didukung oleh berlanjutnya ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor Jakarta (a.l Meksiko, Uruguay, Equador, dan Jepang) setelah pada triwulan sebelumnya memiliki permasalahan terkait kualitas dan keamanan. Kondisi ini terindikasi dari ekspor mobil CBU pada Oktober 2024 yang tercatat sebesar 46.703 unit atau tumbuh mencapai 11,68% (yoy), lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -5,12% (yoy) (Grafik 2.49). Selain itu, berlanjutnya perbaikan ekspor juga didukung oleh meningkatnya ekspor beberapa komoditas unggulan Jakarta lainnya terutama komoditas karet dan barang dari karet, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan serta mesin dan pesawat mekanik (Grafik 2.50). Karet dan barang dari karet tumbuh dari -0,06% (yoy) menjadi 178,49% yoy). Pakaian jadi bukan rajutan yang sebelumnya tumbuh negatif dari -15,40% (yoy), tumbuh lebih baik bahkan tumbuh tinggi mencapai 58,88% (yoy). Adapun barang-barang rajutan juga tumbuh tinggi dari 3,30% (yoy) menjadi 35,63% yoy). Mesin dan pesawat mekanik yang sebelumnya tumbuh 5,89% (yoy),



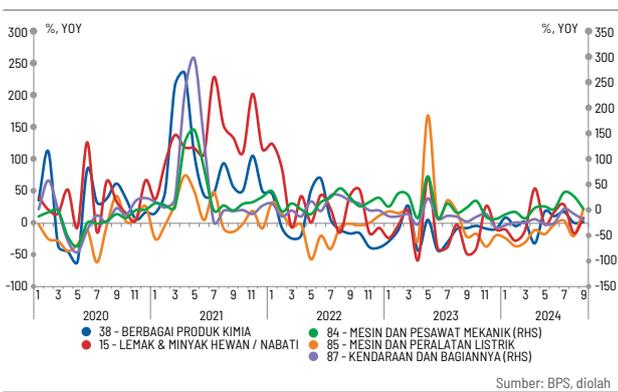
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.49 Ekspor Mobil CBU



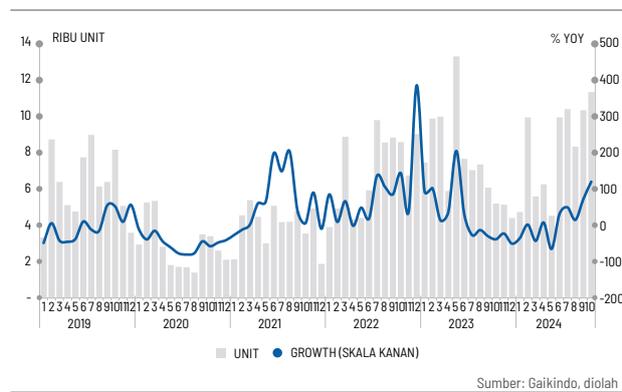
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.51 Pertumbuhan Impor ke Jakarta Berdasarkan Jenisnya



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.50 Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.52 Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)

tumbuh lebih tinggi menjadi 22,04% (yoy). Komoditas kendaraan dan bagiannya juga mengalami perbaikan meskipun masih kontraksi dari -22,96% (yoy) menjadi -7,17% (yoy). Komoditas utama lainnya seperti produk kimia juga tumbuh meningkat dari 2,94% (yoy) menjadi 6,60% (yoy), serta ikan dan udang tumbuh dari 0,41% (yoy) menjadi 7,83% (yoy).

Perbaikan ekspor juga diprakirakan bersumber dari meningkatnya ekspor jasa yang terindikasi dari indikator kedatangan penumpang internasional ke CGK dan HLP pada Oktober 2024 yang tercatat sebesar 711,84 ribu orang, atau tumbuh tinggi sebesar 15,84% (yoy).

Impor

Kinerja impor pada triwulan IV 2024 juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi. Meningkatnya kinerja impor terutama didorong oleh meningkatnya impor barang konsumsi sejalan dengan meningkatnya konsumsi RT dan meningkatnya impor bahan baku didorong perbaikan ekspor (Grafik 2.51). Kondisi ini salah satunya tercermin dari impor mobil CBU pada Oktober 2024 yang tercatat sebanyak 11.263 unit atau tumbuh mencapai 130,85% (yoy), lebih baik jika dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 42,23% (yoy) (Grafik 2.52). Selain itu, aktivitas bongkar Tanjung Priok juga mengalami perbaikan dan tumbuh positif. Aktivitas bongkar Tanjung Priok tercatat tumbuh positif sebesar 23,19% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -1,35% (yoy).

Di sisi lain, impor jasa yang terindikasi dari jumlah penumpang yang berangkat dari Jakarta ke Luar Negeri (LN) pada Oktober 2024 tumbuh melambat menjadi sebesar 15,84% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan III 2024 yang sebesar 22,36% (yoy).

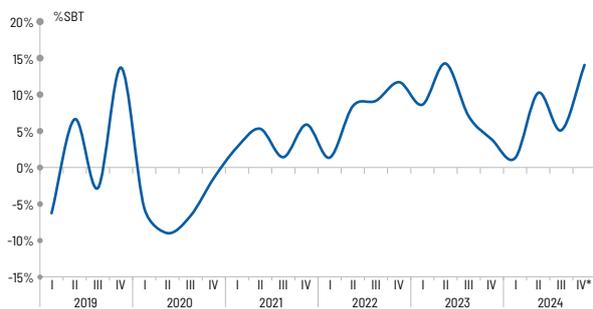
Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Menjelang momen HBKN dan Nataru yang akan berlangsung pada triwulan IV 2024, LU Perdagangan diprakirakan terus akan mengalami peningkatan kinerja. Prakiraan ini juga sejalan dengan prakiraan peningkatan Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan IV 2024. Hal ini tercermin dari angka sementara hasil SKDU Bank Indonesia untuk LU Perdagangan yang sebesar 14,06% SBT pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dari angka pada triwulan III 2024 yang sebesar 5,11% SBT (Grafik 2.53). Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen Jakarta pada Oktober 2024 masing-masing tercatat sebesar 135,5 dan 148,6, masih dalam level tinggi dan optimis, menunjukkan optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha ke depan di Jakarta. Penyaluran kredit konsumsi pada Oktober 2024 yang tumbuh 10,32% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (9,65%; yoy) juga turut mendukung optimisme peningkatan kinerja LU Perdagangan (Grafik 2.55).

Selanjutnya, LU Jasa Keuangan pada triwulan IV 2024 juga diprakirakan mengalami peningkatan kinerja dari triwulan sebelumnya. Hal ini didukung oleh peningkatan penyaluran total kredit di Jakarta yang pada

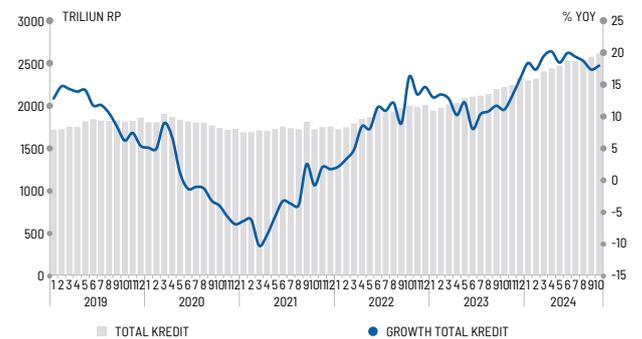
Oktober 2024 tercatat sebesar 17,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (17,30%; yoy) (Grafik 2.56). Peningkatan penyaluran kredit pada Oktober didukung oleh penyaluran kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 22,85% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang sebesar 18,53% (yoy) (Grafik 2.56). Dari sisi penyaluran kredit konsumsi, pertumbuhan ditopang oleh KKB dan KPR yang pada Oktober 2024 masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,19% (yoy) dan 4,95% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,44% (yoy) dan 4,62% (yoy) (Grafik 2.57).

LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga diprakirakan mengalami peningkatan kinerja pada triwulan IV 2024. Hal ini tercermin dari hasil SKDU Bank Indonesia kedua LU ini yang pada triwulan IV diprakirakan masing-masing sebesar 9,35% SBT dan 7,64% SBT (Grafik 2.58). Selain itu, penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan pada Oktober 2024 mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 16,83% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 13,48% (yoy) (Grafik 2.59). Nilai impor besi dan baja pada Oktober 2024 juga tumbuh 15,23% (yoy), meningkat dari rata-rata pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -16,19% (yoy) (Grafik 2.60). Konsumsi listrik Industri juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,80% (yoy) pada



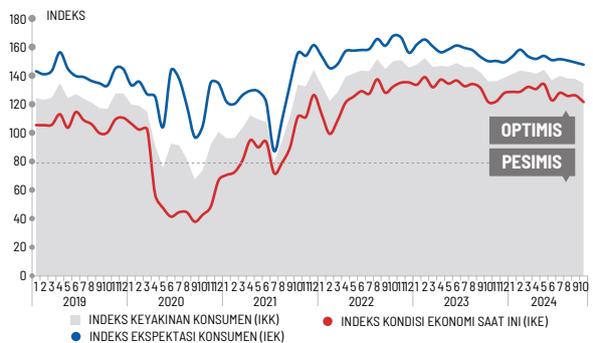
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.53 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan



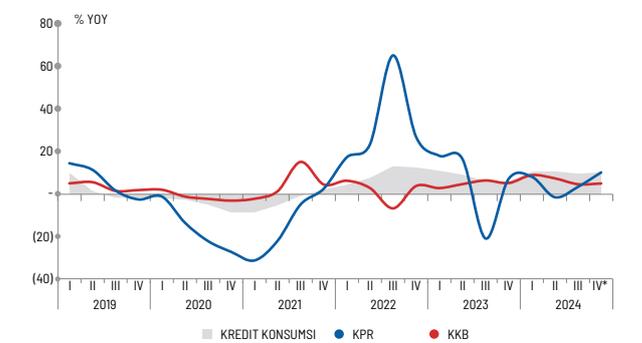
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.56 Perkembangan Penyaluran Kredit



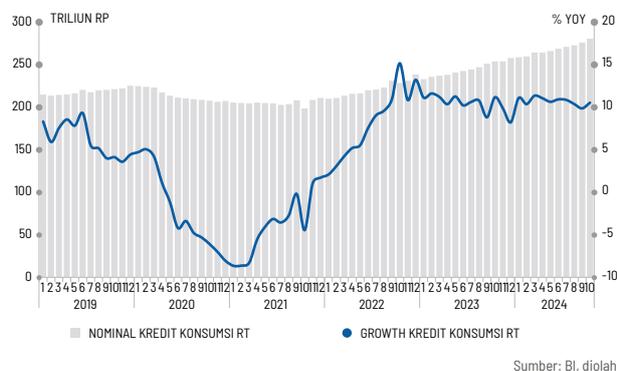
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.54 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta



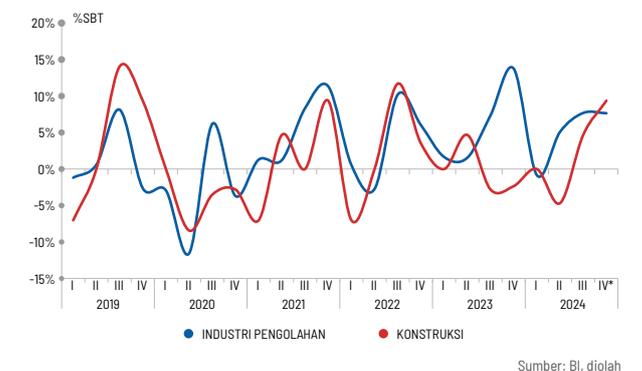
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.57 Perkembangan KKB dan KPR Jakarta



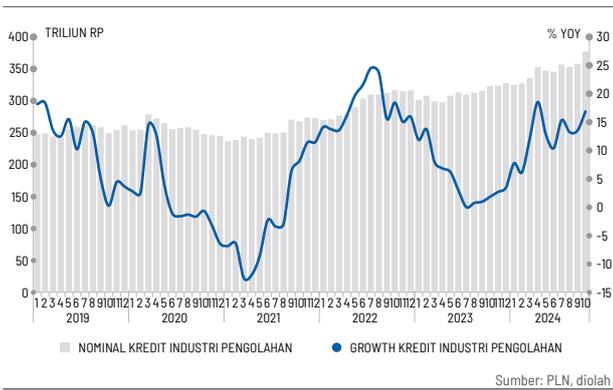
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.55 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Jakarta



Sumber: BI, diolah

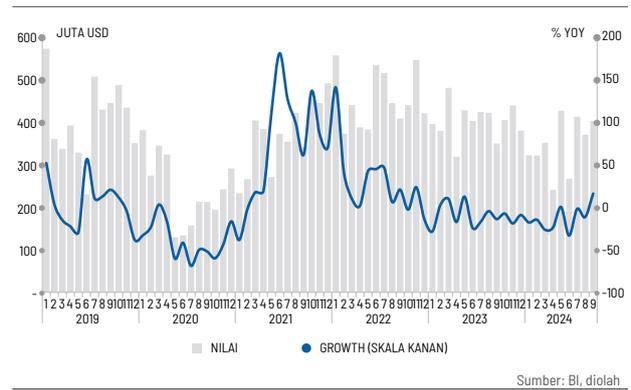
Grafik 2.58 Perkiraan SKDU LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan Jakarta



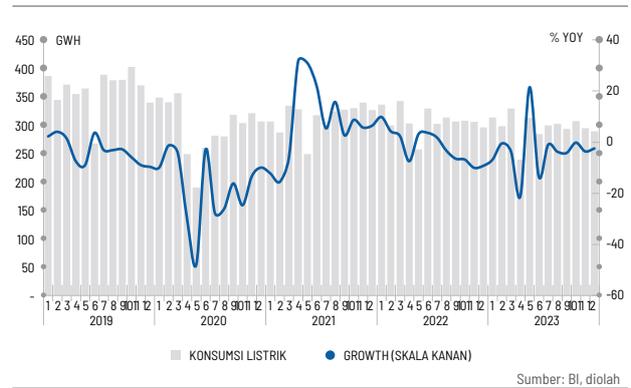
Sumber: PLN, diolah
Grafik 2.59 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Industri Pengolahan

Oktober 2024, lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1,12% (yoy) (Grafik 2.61).

Prakiraan kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2024 juga seiring dengan pembangunan proyek *multiyears* Pemerintah maupun swasta yang terus berlanjut di Jakarta seperti jaringan jalan tol JORR II Cimanggis Cibitung yang sudah tersambung penuh, proyek NCID fase A Tanggul Pantai Jakarta yang terus berlanjut dan telah mencapai 59,60%, Proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome - Manggarai yang telah mencapai 31,14%, hingga proyek konstruksi MRT Fase II CP 201 (Stasiun Bundaran HI- Monas) yang telah mencapai 78,50%.



Sumber: BI, diolah
Grafik 2.60 Perkembangan Nilai Impor Besi dan Baja di Jakarta



Sumber: BI, diolah
Grafik 2.61 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri di Jakarta





BOKS 1

Resiliensi Konsumsi Rumah Tangga Jakarta

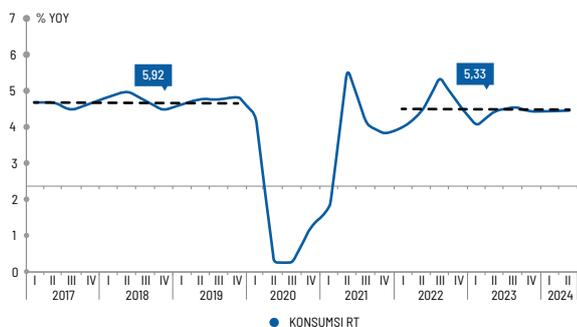
Di tengah isu penurunan daya beli, konsumsi rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 masih tetap tumbuh tinggi di atas 5% yaitu sebesar 5,26% (yoy). Tren pertumbuhan konsumsi RT DKI Jakarta tersebut juga terus membaik dan berada di atas pertumbuhan nasional (4,93% pada triwulan III 2024). Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum optimal, tercermin dari rata-rata pertumbuhan pada periode pasca pandemi (5,33% yoy) yang belum mencapai rata-rata pertumbuhan pada periode prapandemi (5,92% yoy) (Grafik B1.1).

Kinerja konsumsi RT DKI Jakarta relatif lebih resilien dari nasional, sejalan dengan porsi pekerja formal yang jauh lebih besar (63,94%) dibandingkan nasional (59,17%). Namun, yang perlu dicermati adalah berkurangnya porsi pekerja formal yaitu dari 68,65% pada Februari

2019 menjadi 63,94% pada Februari 2024. Selain itu, porsi pengeluaran dari masyarakat berpendapatan sedang juga dalam tren menurun dari 36,09% pada 2019 menjadi 32,63% pada 2024, meski sedikit naik dari 32,30% pada 2023. Sementara, porsi pengeluaran Masyarakat berpendapatan tinggi naik dari 46,61% pada 2019 menjadi 50,66% pada 2024.

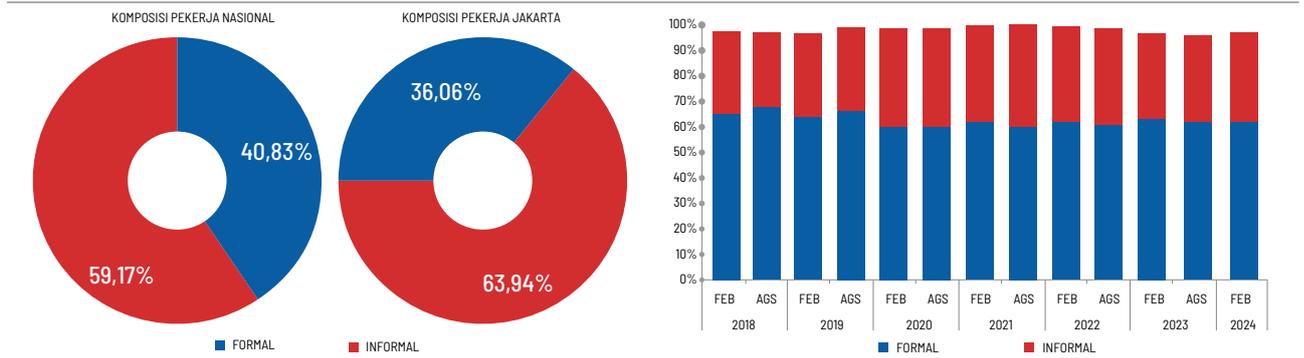
Berdasarkan hasil pendalaman survei konsumen oleh Bank Indonesia, seluruh golongan masyarakat (baik kelompok bawah, menengah dan atas) masih menunjukkan adanya peningkatan konsumsi. Namun demikian, peningkatan konsumsi tersebut disertai dengan penurunan tabungan yang ditengarai digunakan untuk konsumsi. Penurunan tabungan yang perlu diwaspadai terutama untuk kelompok menengah sejalan dengan trennya yang terus menurun. Di sisi lain, kelompok bawah masih dapat menabung sejalan dengan aktivitas konsumsi mereka yang ditopang dari penyaluran bantuan sosial. Sementara itu, kelompok atas relatif lebih aman ditopang oleh penerimaan pendapatan yang diperoleh melalui *passive income*.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang masih berdaya tahan mencerminkan ketangguhan ekonomi kota metropolitan ini dalam menghadapi gejolak perekonomian, baik domestik maupun global. Sebagai pusat ekonomi nasional, DKI Jakarta memiliki struktur ekonomi yang beragam dan inklusif, didukung oleh sektor formal dan informal yang saling melengkapi. Ketahanan daya beli masyarakat Jakarta sebagian besar ditopang oleh tingkat pendapatan



Sumber : BPS, diolah

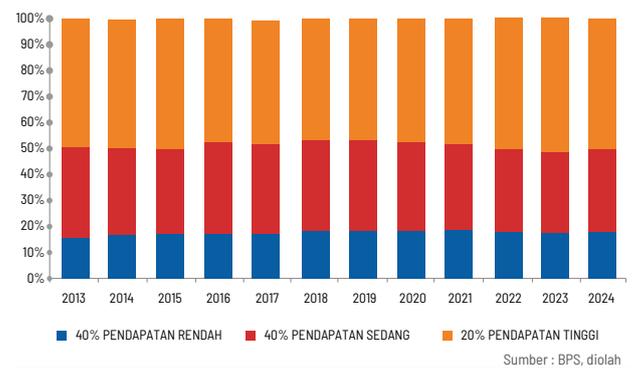
Grafik B1.1 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga DKI Jakarta



Grafik B1.2 Komposisi Pekerja Jakarta vs Nasional

yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, serta akses yang luas terhadap berbagai peluang ekonomi, baik di sektor jasa, perdagangan, maupun industri kreatif. Selain itu, keberadaan program perlindungan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi, dan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, turut menjaga konsumsi rumah tangga dari penurunan yang signifikan saat krisis melanda. Adapun, keberadaan pasar digital yang semakin berkembang di Jakarta memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dalam situasi pembatasan mobilitas seperti selama pandemi COVID-19. Adaptasi masyarakat terhadap inovasi teknologi, termasuk adopsi pembayaran digital dan layanan *e-commerce*, semakin memperkuat daya tahan konsumsi rumah tangga terhadap gangguan ekonomi. Dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang kokoh, kebijakan pemerintah yang responsif, serta dinamika masyarakat yang cepat beradaptasi, DKI Jakarta mampu mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga yang stabil, menjadikannya salah satu daerah dengan ketahanan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Ketangguhan ini

tidak hanya mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga, tetapi juga mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap prospek ekonomi jangka panjang, sehingga memberikan fondasi yang solid bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Grafik B1.3 Kontribusi Pendapatan per Kelompok Masyarakat

BAB 3

KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Sampai dengan triwulan III 2024 secara kumulatif tercatat sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2023. Capaian yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh capaian seluruh komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan, capaian realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 52,53% dari pagu keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian yang lebih tinggi tersebut didorong oleh realisasi komponen baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal.

Kinerja APBN di DKI Jakarta dari sisi Pendapatan pada triwulan III 2024 telah mencapai 92,61% dari total pagu anggaran, tumbuh sebesar 0,95% (yoy). Dari sisi belanja, realisasi mencapai 73,78% dari pagu anggaran, tumbuh sebesar 34,55% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang.



**Realisasi
Pendapatan Daerah (yoy)**



65,93%

Triwulan III 2024

27,56%

Triwulan II 2024

**Realisasi Pendapatan
Asli Daerah (yoy)**



69,49%

Triwulan III 2024

-5,08%

Triwulan II 2024

**Realisasi
Belanja Daerah (yoy)**



8,77%

Triwulan III 2024

62,66%

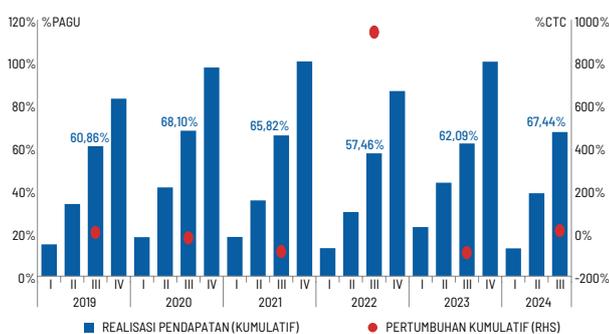
Triwulan II 2024

A. GAMBARAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PROVINSI DKI JAKARTA 2024

APBD-P tahun 2024 mengalami peningkatan dari APBD murni menjadi sekitar Rp 85,1 Triliun, atau lebih tinggi 4,21% dari APBD-P tahun sebelumnya (Tabel 3.1). Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp74,93 Triliun dan Pembiayaan Daerah Rp10,25 Triliun. Pembiayaan Daerah sebesar Rp 10,25 Triliun tersebut secara rinci terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp 6,54 Triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 3,71 Triliun.

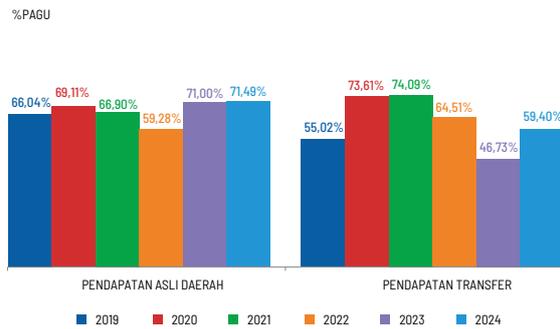
B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Sampai dengan triwulan III 2024, secara kumulatif capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2023 namun, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada beberapa tahun sebelum 2022 (Grafik 3.1). Capaian realisasi pendapatan yang lebih tinggi pada triwulan III 2024 jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya disebabkan oleh capaian seluruh komponen mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang lebih tinggi jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dari ketiga komponen pendapatan tersebut, masing-masing tercatat sebesar 71,49%, 59,40%, dan 1,89% dari pagu (Grafik 3.2). Lebih lanjut, jika dilihat capaian Pendapatan daerah sampai dengan triwulan III 2024 dari sisi nominal tercatat tumbuh 13,19% (ctc), lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan pada periode sama tahun sebelumnya yang terkontraksi -90,19% (ctc). Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sampai triwulan III 2024 didorong oleh komponen PAD dan Pendapatan Transfer yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,91% (ctc) dan 28,93% (ctc). Adapun, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meski masih terkontraksi -47,08% (ctc) namun membaik jika dibandingkan triwulan III 2023 yang terkontraksi dalam sebesar -95,71% (ctc).



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.1 Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah

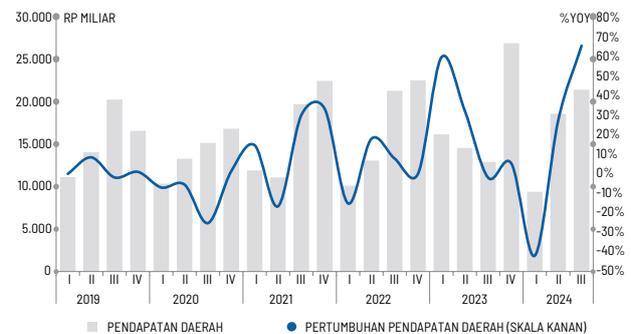


Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw III 2024

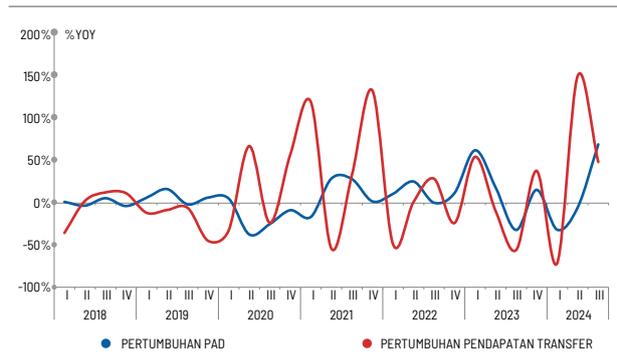
Pada triwulan III 2024, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp21,54 Triliun atau tumbuh 65,93% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 27,56% (yoy) dan terkontraksi -93,93% (yoy) (Grafik 3.3 dan Tabel 3.4). Meningkatnya kinerja Pendapatan Daerah utamanya didorong oleh realisasi PAD dengan pangsa sebesar 75,43% yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 69,49% (yoy) pada triwulan III 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing terkontraksi sebesar -5,08% (yoy) dan -93,20% (yoy). Selanjutnya, dari sisi Pendapatan Transfer, pada triwulan III 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 48,64% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (150,84%; yoy) namun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sama tahun sebelumnya yang terkontraksi -55,85% (yoy) (Grafik 3.4).

Peningkatan kinerja PAD didorong oleh komponen Pajak Daerah yang terakselerasi (Grafik 3.6). Dengan share sebesar 89,18% terhadap PAD pada triwulan III 2024, penerimaan Pajak Daerah mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 86,14% (yoy), berbalik arah dan meningkat tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan periode sama tahun sebelumnya yang masing-masing terkontraksi sebesar -17,43% (yoy) dan -96,79% (yoy). Peningkatan kinerja Pajak Daerah utamanya didorong oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang



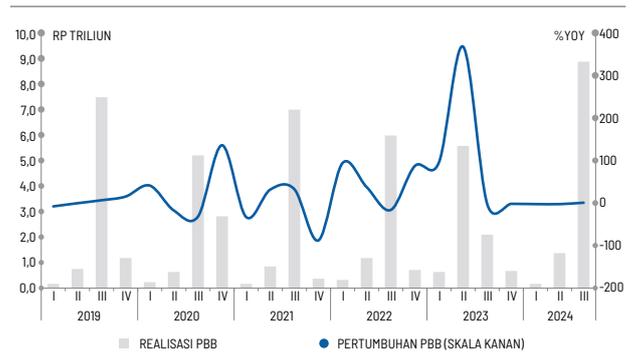
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah



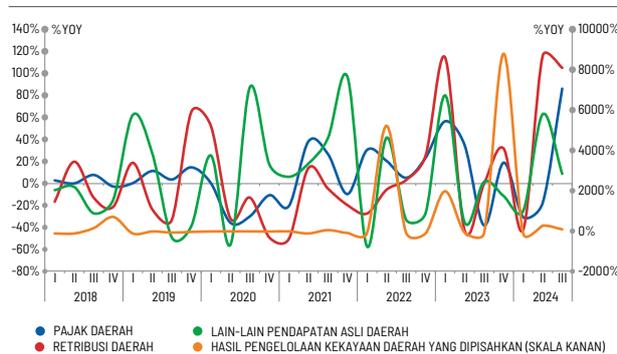
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.4 Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



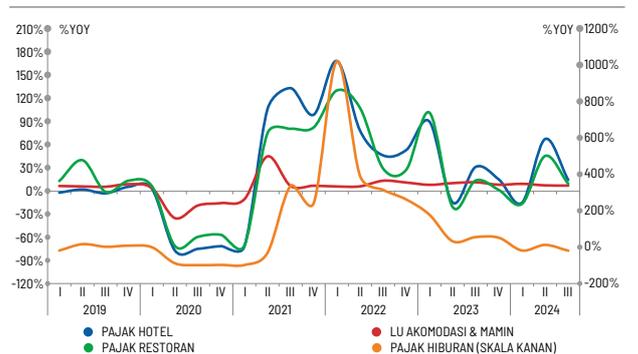
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan PBB DKI Jakarta



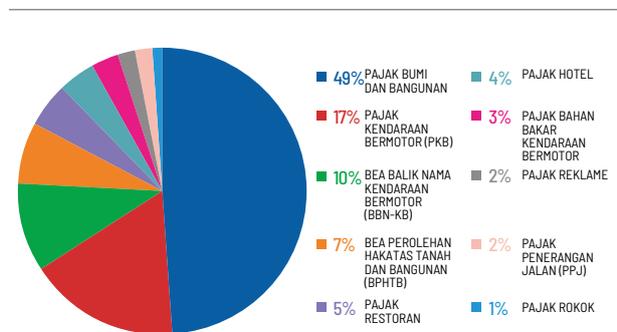
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.5 Pertumbuhan Komponen PAD



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

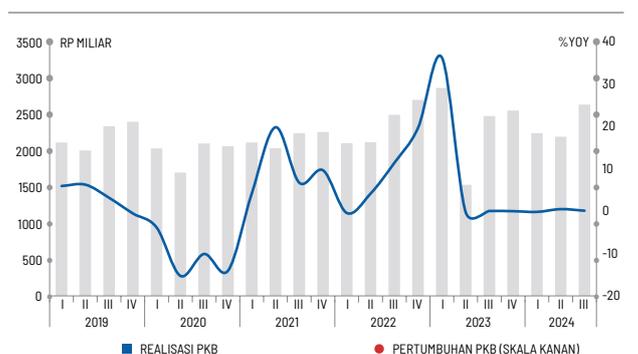
Grafik 3.8 Perkembangan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, serta LU Akomamin



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.6 Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw III 2024

tumbuh tinggi sebesar 257,54% (yoy) dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing terkontraksi sebesar -78,33% (yoy) dan 64,90% (yoy) (Grafik 3.7). Selanjutnya, peningkatan penerimaan Pajak Daerah juga didukung oleh realisasi penerimaan Pajak Reklame pada triwulan laporan yang tumbuh 28,17% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing tumbuh 16,37% (yoy) dan terkontraksi -34,90% (yoy). Sementara itu, Pajak Hotel dan Pajak Restoran tetap menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 14,50% (yoy) dan 9,64% (yoy), meski melambat jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (67,60%; yoy dan 45,63%; yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya (31,47%; yoy dan 13,84%; yoy)(Grafik 3.8).

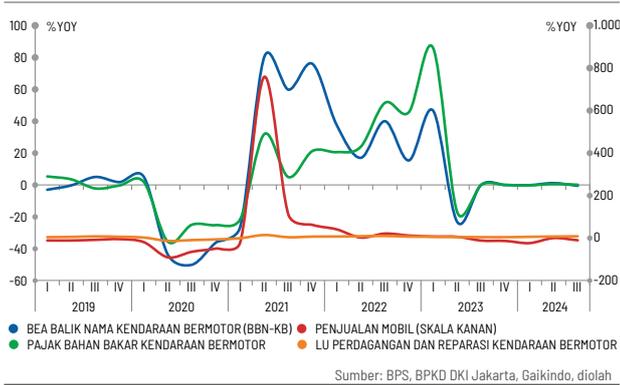


Sumber: BPKD DKI Jakarta, BPS, diolah

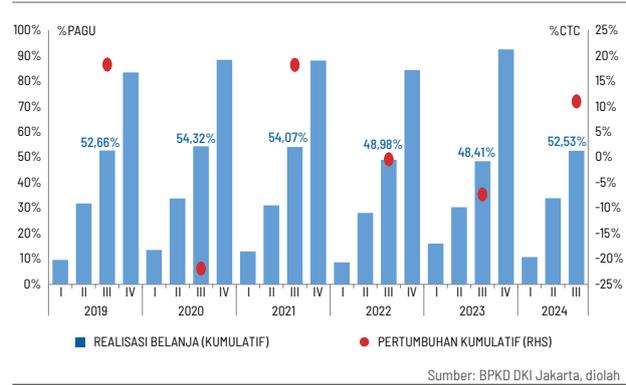
Grafik 3.9 Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 6,38% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 43,25% (yoy) namun, lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,64% (yoy)(Grafik 3.9). Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga melambat dan terkontraksi sebesar -55,30% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 113,23% (yoy)(Grafik 3.10).

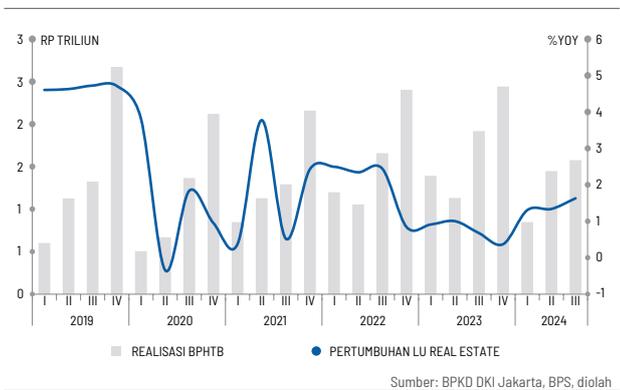
Selanjutnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga terkontraksi -17,82% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 27,86% (yoy). Kendati demikian, kinerja LU Real Estate masih tumbuh meningkat menjadi sebesar 1,64% (yoy) pada triwulan III 2024, dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,35% (yoy)(Grafik 3.11).



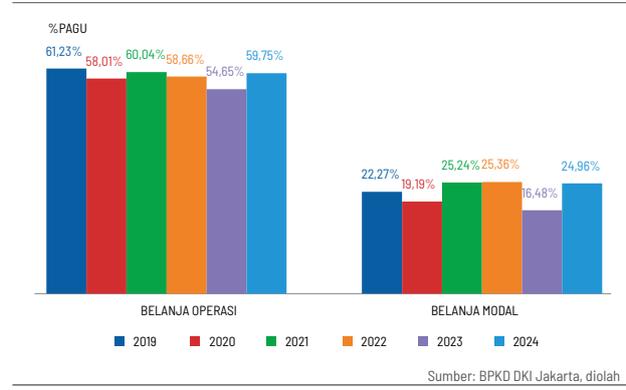
Grafik 3.10 Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil



Grafik 3.12 Realisasi Kumulatif Belanja Daerah



Grafik 3.11 Perkembangan BPHTB dan LU Real Estate DKI Jakarta

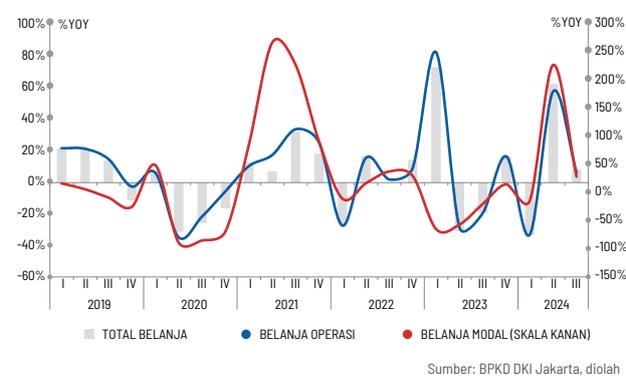


Grafik 3.13 Perkembangan Capaian Tahun 2024 Komponen Belanja Daerah

C. BELANJA DAERAH APBD

Pada triwulan III 2024, capaian realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama beberapa tahun sebelumnya. Adapun, capaian realisasi Belanja Daerah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 52,53% dari pagu keseluruhan tahun 2024 (Grafik 3.12). Capaian kinerja belanja yang meningkat didorong oleh realisasi komponen baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal (Grafik 3.14 dan Tabel 3.2).

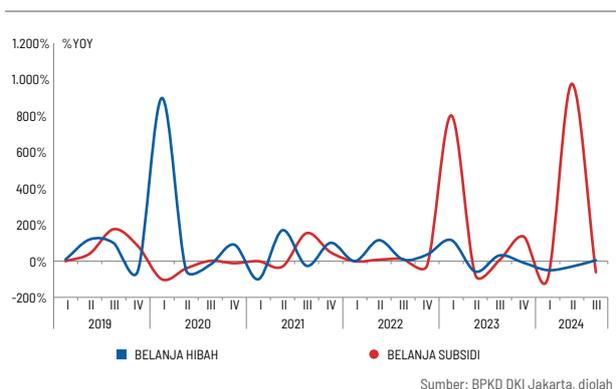
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,77% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 62,66% (yoy) namun, meningkat jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -19,16% (yoy) (Grafik 3.14 dan Tabel 3.2). Dengan pangsa sebesar 87,73% terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, komponen Belanja Operasi mencatatkan pertumbuhan 6,39% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,88% (yoy), namun membaik jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -19,16% (yoy) (Grafik 3.13 dan Tabel 3.14). Kinerja Belanja Operasi yang tidak setinggi triwulan sebelumnya seiring dengan realisasi pertumbuhan Belanja Pegawai yang sebesar 35,10% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan II 2024 (85,02%; yoy). Begitupula dengan Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh 6,39% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 41,00% (yoy). Kendati



Grafik 3.14 Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya

demikian, Belanja Bantuan Sosial mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,66% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -7,55% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -71,70% (yoy) seiring realisasi penyaluran Bantuan Sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus berlanjut. Komponen Belanja Subsidi jug mencatat pertumbuhan 4,77% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -30,08% (yoy) (Grafik 3.15).

Lebih lanjut, komponen Belanja Modal pada triwulan III 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 29,47% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 228,36% (yoy) namun membaik jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.15 Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi

terkontraksi -19,11% (yoy). Kinerja Belanja Modal yang melambat seiring dengan komponen Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berkontraksi masing-masing sebesar -93,26% (yoy), -13,78% (yoy), dan -91,97% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh tinggi sebesar 2331,34% (yoy), 35,52% (yoy), dan 438,27% (yoy) (Tabel 3.1).

D. PEMBIAYAAN DAERAH APBD

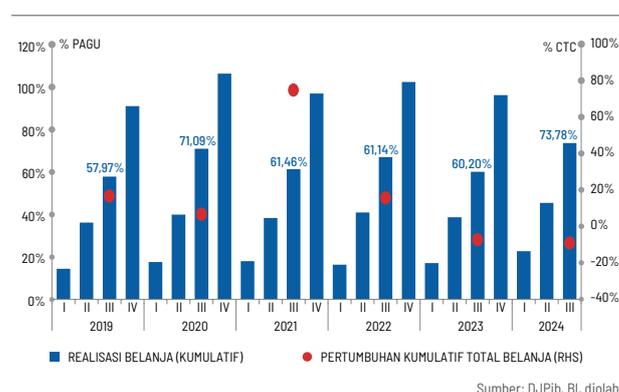
Capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan pada triwulan III 2024 sebesar 70,57% dari pagu (Tabel 3.2). Tercatat sama jika dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya namun lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 96,68% dari pagu. Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 10,16% dari pagu, lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 7,34% dari pagu namun, masih lebih rendah jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 21,69% dari pagu. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya seiring adanya realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 243,20 Miliar, serta Penyertaan Modal Daerah yang sebesar Rp 13,68 Miliar.

E. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI DKI JAKARTA

Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, hingga triwulan III 2024, realisasi komponen Pendapatan tercatat sebesar Rp 1.432,79 Triliun atau sebesar 92,61% dari pagu belanja APBN di DKI Jakarta dan tumbuh 0,95% (yoy). Dari sisi kinerja pendapatan Pajak, hingga triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp 1.072,37 Triliun atau 88,87% dari target pajak 2024. Realisasi pendapatan pajak tersebut masih berkontraksi sebesar -2,29% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh penurunan pada PPh Nonmigas sebesar 6,05% (yoy) akibat dari penurunan PPh Pasal 25/29 Badan sebagai dampak daripada penurunan signifikan harga beberapa komoditas seperti batu bara dan CPO, serta perubahan status kontraktor batubara dari kontrak karya (PKP2B) Generasi I menjadi IUPK. Sementara itu, PPN mencatatkan

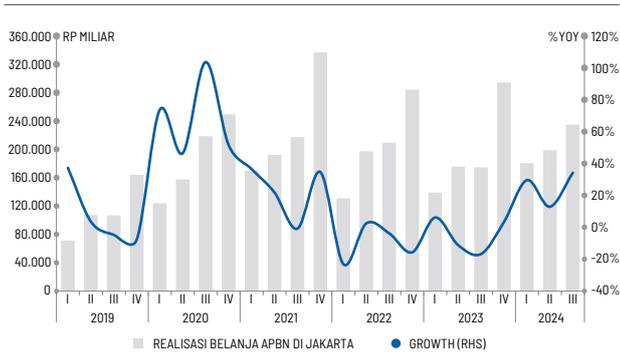
pertumbuhan positif seiring perbaikan kinerja PPN Impor dan PPN lainnya. PBB dan Pajak Lainnya juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,71% (yoy), didorong oleh pertumbuhan PBB minyak dan gas bumi. Kendati demikian, penerimaan pajak DKI Jakarta terus mengalami perbaikan ditopang oleh pajak utama sektor non komoditas yang semakin tangguh. Dari sisi penerimaan Bea Masuk, pada triwulan III 2024 tercatat kontraksi sebesar -1,47% (yoy) disebabkan oleh peningkatan utilisasi FTA sebesar 2,20% (yoy), serta penurunan tarif efektif sebesar 10,84% (yoy) kendati terdapat kenaikan nilai impor. Di sisi lain, penerimaan Bea Keluar tumbuh tinggi 183,68% (yoy), didorong oleh meningkatnya penerimaan atas SPKPBK untuk komoditas turunan CPO. Begitupula dengan penerimaan Cukai yang tumbuh 7,08% (yoy) didorong oleh peningkatan cukai HT 7,00% (yoy) seiring kenaikan produksi BKC HT 8,40% (yoy), kenaikan cukai rokok elektrik 10,70% (yoy), hingga kenaikan cukai MMEA sebesar 6,04% (yoy).

Dari sisi belanja K/L di Jakarta, pada triwulan III 2024 terdapat realisasi sebesar Rp 235,91 Triliun atau sebesar 73,78% dari pagu APBN 2024 (Grafik 3.18) dan tumbuh 34,55% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,14% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -16,67% (yoy) (Grafik 3.19). Capaian realisasi belanja K/L di Jakarta pada triwulan III 2024 utamanya didorong oleh Belanja Modal dan Belanja Barang yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 73,64% (yoy) dan 41,17% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 44,63% (yoy) dan 23,85% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya (15,17%; yoy dan -9,78%; yoy). Adapun, peningkatan Belanja Modal utamanya didorong oleh kenaikan Belanja Modal Tanah dan Peralatan dan Mesin. Sedangkan, akselerasi Belanja Barang didorong oleh kenaikan Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda. Selanjutnya, komponen Belanja Pegawai mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,03% (yoy), meningkat dari realisasi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,20% (yoy). Peningkatan Belanja Pegawai didorong oleh kenaikan pembayaran gaji pokok dan tunjangan ASN. Lebih lanjut, setelah berkontraksi -13,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya, Belanja Bantuan Sosial pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,36% (yoy), peningkatan kinerja Belanja Bantuan Sosial seiring kenaikan Belanja Bansos untuk Perlinsos dan Jaminan Sosial.



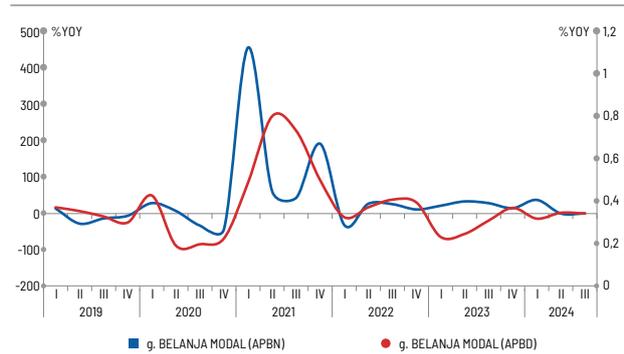
Sumber: DJPjb, BI, diolah

Grafik 3.16 Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta



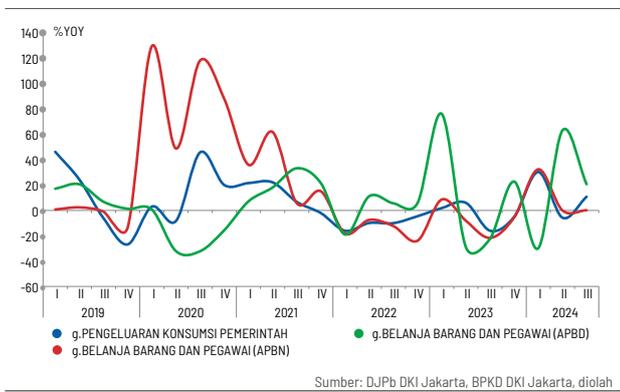
Sumber: DJPb, BI, diolah

Grafik 3.17 Realisasi Total Belanja APBN di DKI Jakarta



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.18 Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)

Tabel 3.1 Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

URAIAN	APBD-P 2021		APBD-P 2022		APBD-P 2023		APBD 2024	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
PENDAPATAN	65.209,11	13,93%	77.796,65	19,30%	70.662,94	-9,17%	72.446,38	2,52%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.182,09	18,63%	55.662,83	23,20%	48.442,04	-12,97%	52.398,08	8,17%
Pajak Daerah	37.215,00	14,58%	45.700,00	22,80%	43.000,00	-5,91%	46.240,00	7,53%
Pajak Kendaraan Bermotor	8.800,00	10,00%	9.000,00	2,27%	9.416,56	4,63%	9.690,00	2,90%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.700,00	27,03%	6.000,00	27,66%	6.643,61	10,73%	6.450,00	-2,91%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000,00	5,26%	1.350,00	35,00%	1.680,81	24,50%	1.550,00	-7,78%
Pajak Hotel	800,00	18,52%	1.400,00	75,00%	1.900,35	35,74%	29,88	-98,43%
Pajak Restoran	2.000,00	8,11%	4.000,00	100,00%	3.947,26	-1,32%	66,39	-98,32%
Pajak Hiburan	70,00	-67,44%	750,00	971,43%	687,00	-8,40%	10,70	-98,44%
Pajak Reklame	875,00	12,90%	1.250,00	42,86%	974,34	-22,05%	1.200,00	23,16%
Pajak Penerangan Jalan	750,00	-3,23%	1.300,00	73,33%	902,31	-30,59%	14,94	-98,34%
Pajak Air Tanah	50,00	-33,33%	75,00	50,00%	83,77	11,69%	90,00	7,44%
Pajak Parkir	300,00	-7,89%	1.350,00	350,00%	477,11	-64,66%	8,71	-98,17%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.920,00	38,40%	8.195,00	18,42%	6.913,46	-15,64%	7.725,00	11,74%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.250,00	8,47%	10.250,00	0,00%	9.041,23	-11,79%	10.500,00	16,13%
Pajak Rokok	700,00	1,45%	780,00	11,43%	855,30	9,65%	900,00	5,23%
Retribusi Daerah	755,76	61,34%	806,88	6,76%	462,11	-42,73%	483,03	4,53%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	390,25	-53,79%	793,74	103,39%	545,87	-31,23%	823,00	50,77%
Lain-Lain PAD	6.821,08	58,88%	8.362,22	22,59%	4.434,07	-46,97%	4.852,05	9,43%
PENDAPATAN TRANSFER	16.873,54	-1,43%	17.226,48	2,09%	20.224,32	17,40%	19.326,01	-4,44%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.153,47	55,34%	4.907,21	55,61%	1.996,58	-59,31%	722,29	-63,82%
BELANJA	69.992,62	18,73%	76.972,17	9,97%	72.144,89	-6,27%	72.601,00	0,63%
BELANJA OPERASI	57.799,91	17,57%	58.971,57	2,03%	60.383,69	2,39%	59.655,77	-1,21%
Belanja Pegawai	19.486,42	2,61%	18.638,61	-4,35%	18.778,03	0,75%	20.065,59	6,86%
Belanja Barang dan Jasa	23.122,50	27,76%	25.070,95	8,43%	27.281,51	8,82%	27.309,65	0,10%
Belanja Bunga	168,20	121,32%	789,54	369,41%	258,00	-67,32%	256,00	-0,78%
Belanja Subsidi	5.371,15	19,12%	6.542,35	21,81%	5.908,31	-9,69%	5.603,71	-5,16%
Belanja Hibah	2.791,73	17,64%	2.814,87	0,83%	3.707,37	31,71%	3.306,33	-10,82%
Belanja Bantuan Sosial	6.859,90	34,15%	5.115,25	-25,43%	4.450,48	-13,00%	3.114,49	-30,02%
BELANJA MODAL	8.761,14	124,84%	10.800,99	23,28%	10.850,18	0,46%	11.554,91	6,50%
Belanja Modal Tanah	1.822,55	31,00%	1.904,95	4,52%	837,73	-56,02%	496,57	-40,72%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.661,66	101,61%	2.020,82	21,61%	3.085,13	52,67%	2.215,61	-28,18%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.346,96	405,49%	2.054,54	-12,46%	2.556,81	24,45%	3.445,38	34,75%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.555,19	135,01%	4.659,21	82,34%	4.222,74	-9,37%	5.145,68	21,86%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	374,78	189,04%	161,48	-56,91%	147,78	-8,48%	117,37	-20,57%
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.043,97	-44,87%	6.714,84	120,60%	554,56	-91,74%	1.072,01	93,31%
Belanja Tidak Terduga	3.043,97	-44,87%	6.714,84	120,60%	554,56	-91,74%	1.072,01	93,31%
BELANJA TRANSFER	387,60	4,37%	484,76	25,07%	356,45	-26,47%	318,31	-10,70%
Belanja Bantuan Keuangan	387,60	4,37%	484,76	25,07%	356,45	-26,47%	318,31	-10,70%
SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA	(4.783,52)		824,48		(1.481,95)		(154,61)	
PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.681,13	138,08%	5.015,11	-65,84%	8.895,32	77,37%	9.270,19	4,21%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.165,70	329,05%	4.035,86	-21,87%	8.600,10	113,09%	3.859,86	-55,12%
Penerimaan Pinjaman Daerah	9.515,43	167,10%	979,25	-89,71%	295,22	-69,85%	5.410,33	1732,64%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.897,62	122,42%	5.839,59	-41,00%	7.413,37	26,95%	9.115,58	22,96%
Penyertaan Modal Daerah	9.663,97	118,82%	4.722,71	-51,13%	5.434,68	15,08%	7.253,91	33,47%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33,65	0,00%	1.034,58	2974,53%	1.802,67	74,24%	1.861,67	3,27%
Pemberian Pinjaman Daerah	200,00	0,00%	82,30	-58,85%	176,02	113,87%	-	-100,00%
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.890,24		82.811,76	3,66%	79.558,25	-3,93%	81.716,57	2,71%
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	79.890,24		82.811,76	3,66%	79.558,25	-3,93%	81.716,57	2,71%
SILPA	-		-		-		-	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Kumulatif APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2024

URAIAN	REALISASI S.D. TW III 2022			REALISASI S.D. TW III 2023			REALISASI S.D. TW III 2024		
	Rp Miliar	% APBD-P	%ctc	Rp Miliar	% APBD	%ctc	Rp Miliar	% APBD	%ctc
PENDAPATAN	44.704,91	57,47%	4,16%	43.872,57	58,98%	-1,86%	49.657,94	67,44%	13,19%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.995,83	59,28%	9,15%	34.395,08	65,17%	4,24%	37.458,02	71,49%	8,91%
Pajak Daerah	29.583,54	64,73%	14,45%	30.799,41	70,64%	4,11%	33.404,04	72,24%	8,46%
Pajak Kendaraan Bermotor	6.706,42	74,52%	5,13%	6.867,23	71,53%	2,40%	7.060,76	27,17%	2,82%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.534,93	75,58%	31,06%	4.969,03	79,50%	9,57%	4.876,00	12,86%	-1,87%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000,13	74,08%	31,74%	1.240,67	88,62%	24,05%	1.328,28	30,10%	7,06%
Pajak Hotel	997,87	71,28%	82,03%	1.337,19	89,15%	34,01%	1.511,14	1865,87%	13,01%
Pajak Restoran	2.401,64	60,04%	73,00%	2.946,73	78,58%	22,70%	3.177,22	1678,15%	7,82%
Pajak Hiburan	270,14	36,02%	426,78%	488,47	81,41%	80,82%	439,54	1386,87%	-10,02%
Pajak Reklame	720,44	57,63%	13,57%	719,23	71,92%	-0,17%	654,34	210,4%	-9,02%
Pajak Penerangan Jalan	603,24	46,40%	7,60%	664,93	83,12%	10,23%	703,24	1611,63%	5,76%
Pajak Air Tanah	12,71	16,95%	-68,65%	55,12	61,24%	333,50%	61,55	21,59%	11,68%
Pajak Parkir	282,30	20,91%	33,06%	354,85	44,36%	25,70%	246,87	903,20%	-30,43%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.927,84	47,93%	19,74%	4.460,42	61,10%	13,56%	3.886,43	20,50%	-12,87%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.533,33	73,50%	-6,62%	8.367,06	86,26%	11,07%	8.947,21	72,00%	6,93%
Pajak Rokok	592,55	75,97%	27,10%	539,97	66,66%	-8,87%	530,45	20,37%	-1,76%
Retribusi Daerah	266,77	33,06%	-9,88%	309,67	51,61%	16,08%	413,66	59,12%	33,58%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	401,13	50,54%	9,94%	430,58	79,37%	7,34%	506,32	61,52%	17,59%
Lain-Lain PAD	2.744,38	32,82%	-26,22%	2.855,42	35,55%	4,05%	3.134,00	67,61%	9,76%
PENDAPATAN TRANSFER	11.106,32	64,51%	-11,16%	9.451,63	51,21%	-14,90%	12.186,24	59,40%	28,93%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	602,77	12,28%	219,56%	25,86	0,82%	-95,71%	13,68	1,89%	-47,08%
BELANJA	37.699,65	48,99%	-0,38%	34.927,89	46,81%	-7,35%	38.761,77	52,53%	10,98%
BELANJA OPERASI	34.533,60	58,66%	-0,50%	33.001,22	55,33%	-4,44%	35.701,32	59,75%	8,18%
Belanja Pegawai	13.159,78	70,63%	-9,08%	12.435,04	67,87%	-5,51%	14.515,56	72,36%	16,73%
Belanja Barang dan Jasa	14.439,38	57,62%	12,05%	14.449,50	52,48%	0,07%	15.241,31	55,78%	5,48%
Belanja Bunga	205,74	26,06%	435,00%	165,17	64,02%	-19,72%	142,65	55,72%	-13,64%
Belanja Subsidi	2.437,29	37,70%	59,24%	2.038,17	33,88%	-16,38%	1.831,52	32,68%	-10,14%
Belanja Hibah	1.873,15	66,54%	13,09%	1.813,79	61,21%	-3,17%	2.086,04	82,14%	15,01%
Belanja Bantuan Sosial	2.418,26	47,28%	-41,30%	2.099,53	46,07%	-13,18%	1.884,24	59,96%	-10,25%
BELANJA MODAL	2.739,50	25,36%	23,89%	1.788,21	13,05%	-34,72%	2.883,80	24,96%	61,27%
Belanja Modal Tanah	329,14	17,28%	-22,74%	93,37	4,90%	-71,63%	31,89	6,42%	-65,85%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401,04	19,85%	52,67%	663,79	20,63%	65,52%	614,39	27,73%	-7,44%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	654,40	31,85%	-24,60%	155,61	3,93%	-76,22%	488,86	14,19%	214,16%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.321,90	28,37%	234,99%	823,07	18,61%	-37,74%	1.618,40	31,45%	96,63%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33,02	20,45%	-87,30%	52,38	26,28%	58,63%	6,32	5,38%	-87,94%
BELANJA TIDAK TERDUGA	60,71	0,89%	-90,92%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	60,71	0,89%	-90,92%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
BELANJA TRANSFER	365,84	76,26%	40,70%	-	0,00%	0,00%	176,65	55,49%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	365,84	76,26%	40,70%	-	0,00%	0,00%	176,65	55,49%	0,00%
PEMBIAYAAN									
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.701,07	213,38%	79,43%	8.600,10	91,49%	-19,63%	6.542,42	70,57%	-23,93%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.721,72	240,88%	88,20%	8.600,10	107,80%	-11,54%	6.542,42	169,50%	-23,93%
Penerimaan Pinjaman Daerah	979,25	100,00%	22,69%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.026,07	17,57%	479,44%	1.607,95	17,54%	56,71%	925,99	10,16%	-42,41%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	539,67	11,43%	276,21%	533,00	7,39%	-1,24%	213,68	2,95%	-59,91%
	486,40	47,01%	1346,36%	1.074,95	60,31%	121,00%	712,31	38,26%	-33,74%
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.405,98			52.472,67			56.200,36	67,79%	7,10%
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.725,72			36.535,84			39.687,76	47,87%	8,63%
SILPA	16.680,26			15.936,83			-	0,00%	0,00%

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Tabel 3.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta

KOMPONEN BELANJA	PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023		PAGU 2024	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
Belanja Pegawai	234.229	0,39%	254.224	8,54%	264.318	3,97%	292.352	10,61%
Belanja Barang	397.230	37,02%	277.446	-30,15%	218.137	-21,38%	257.413	18,00%
Belanja Modal	139.814	41,98%	128.698	-7,95%	105.892	-17,72%	135.358	27,83%
Belanja Bantuan Sosial	176.191	-14,72%	144.225	-18,14%	142.601	-1,13%	151.459	6,21%
Total	947.463	14,39%	804.594	-15,08%	730.949	-9,15%	836.582	14,45%

Sumber: DJPb, BI, diolah

Tabel 3.4 Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan III 2024

KOMPONEN BELANJA	REALISASI TW III 2022			REALISASI TW III 2023			REALISASI TW III 2024		
	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy
Belanja Pegawai	58.101	22,85%	10,83%	51.390	21,12%	-3,92%	82.453	21,58%	13,03%
Belanja Barang	78.772	28,39%	-23,85%	79.420	23,68%	-34,41%	55.537	28,33%	41,17%
Belanja Modal	28.742	22,33%	26,24%	31.615	35,02%	29,04%	29.501	47,58%	73,64%
Belanja Bantuan Sosial	44.789	31,05%	12,83%	73.157	21,57%	-31,32%	32.268	23,43%	15,36%
Total	210.403	26,15%	-3,63%	235.583	11,52%	-16,67%	199.760	28,20%	34,55%

Sumber: DJPb, BI, diolah

BAB 4

INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,23% (yoy). Capaian inflasi ini lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 1,84% (yoy). Terkendalnya inflasi Jakarta tersebut tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 yaitu emas perhiasan, angkutan udara, beras, sewa rumah dan upah asisten rumah tangga. Memasuki triwulan IV 2024, perkembangan inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2024 tercatat menurun dengan inflasi sebesar 1,58% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,70% (yoy). Ke depan, inflasi IHK DKI Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali di dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024.



**Inflasi IHK
DKI Jakarta (yoy)**



1,70%
Triwulan III 2024

2,23%
Triwulan II 2024

-0,10%
September 2024, mtm

**Rata-rata
Inflasi IHK (yoy)**

2,60%
Rerata Inflasi Tw III 2022-2024, yoy

**Inflasi IHK
DKI Jakarta (ytd)**

0,79%
September 2024, ytd

A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN III 2024

Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan III 2024 tetap terkendali dalam sasaran target inflasi. Inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (2,23%, yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan inflasi masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Upaya pengendalian terus dilakukan agar inflasi tetap terkendali dan mengantisipasi dampak yang bersumber dari harga komoditas global yang masih tinggi. Hal ini tercermin dari efektifitas hasil sinergi dan koordinasi TPID dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui GNPIP. Lebih lanjut, inflasi Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,84% (yoy).

Lebih rendahnya inflasi pada triwulan III 2024 bersumber dari penurunan inflasi pada beberapa kelompok yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan bahan bakar lainnya; kelompok kesehatan, kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (Grafik 4.1). Walaupun mengalami penurunan inflasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat masih menjadi kelompok dengan andil inflasi tertinggi diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok pendidikan, serta kelompok transportasi (Grafik 4.2). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 diantaranya adalah emas perhiasan, angkutan udara, beras, sewa rumah, dan upah asisten rumah tangga. Namun tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, telur ayam ras.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi IHK Jakarta triwulan III 2024. Dengan sumbangan sekitar 0,44%, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 2,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,89% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, beras

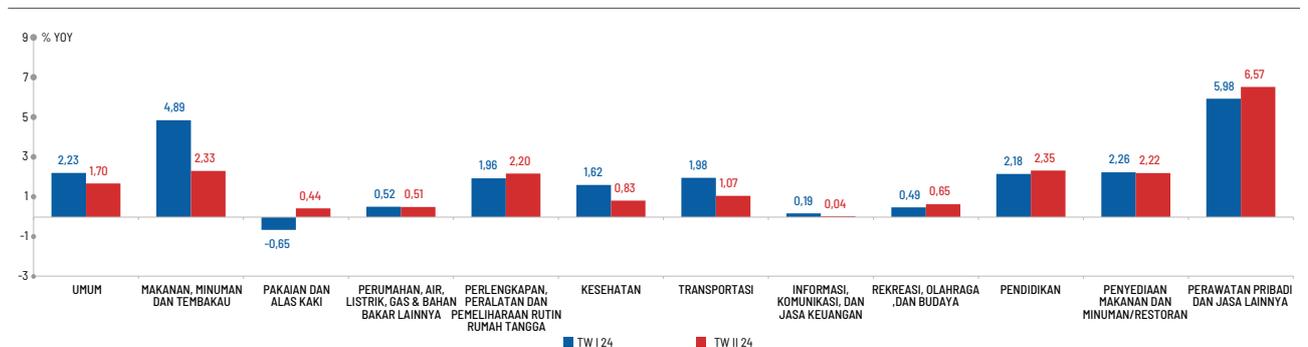
dan kopi bubuk menjadi kontributor utama dengan andil masing-masing sebesar 0,13% dan 0,06%. Sementara itu sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) juga turut menjadi kontributor dengan andil masing-masing sebesar 0,03%. Peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi yang utamanya terjadi pada komoditas cabai merah dan daging ayam ras yang masing-masing tercatat memberikan andil deflasi sebesar 0,07% dan 0,03%.

Berdasarkan pantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), pada triwulan III 2024 rata-rata harga beras mencapai Rp14.689/kg lebih rendah dibandingkan harga pada triwulan sebelumnya sebesar Rp 14.894/kg. Secara tahunan, rata-rata harga tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,2% (yoy) atau tercatat lebih rendah dibandingkan kenaikan harga triwulan sebelumnya sebesar 19,9% (yoy). Penurunan rata-rata harga beras juga terlihat pada informasi Pemantauan Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dari 15.514/kg di triwulan sebelumnya menjadi 15.403/kg. Adapun, secara tahunan, rata-rata harga beras tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,0% (yoy) atau tercatat lebih rendah dibandingkan kenaikan harga triwulan sebelumnya sebesar 7,4% (yoy). (Grafik 4.3). Penurunan inflasi beras ini utamanya disebabkan dengan membaiknya pasokan beras. Kondisi ini tercermin dari perkembangan stok beras di PT Food Station dan Bulog dengan rata-rata sebanyak 170.679 ton/minggu pada triwulan III 2024, lebih tinggi dari rata-rata stok triwulan sebelumnya yang sebesar 162.042 ton/minggu (Grafik 4.4).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

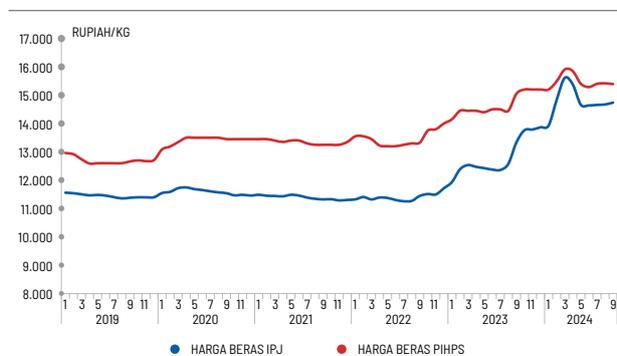


Sumber: BPS, diolah

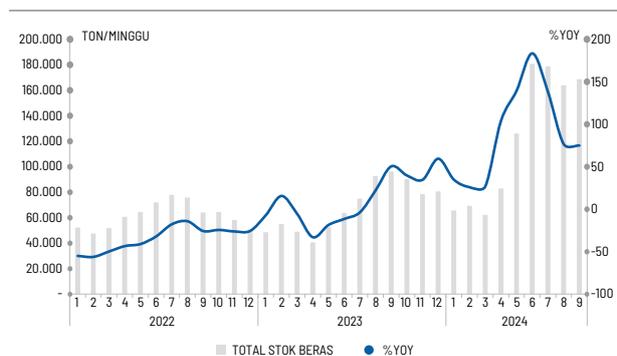
Grafik 4.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Sementara pada komoditas lainnya, yakni cabai merah dan daging ayam ras terpantau mengalami penurunan harga pada triwulan III 2024. Berdasarkan pantauan IPJ, pada triwulan III 2024 rata-rata harga cabai merah mencapai Rp51,254/kg lebih rendah dibandingkan harga triwulan sebelumnya sebesar Rp 61,506/kg (Grafik 4.5). Menurunnya harga tersebut utamanya bersumber dari peningkatan pasokan seiring dengan masuknya musim panen pada daerah sentra produksi. Sementara pada komoditas daging ayam ras tercatat mengalami penurunan harga dari Rp 41,816/kg pada triwulan sebelumnya menjadi Rp 39,985/kg di triwulan III 2024 (Grafik 4.6).

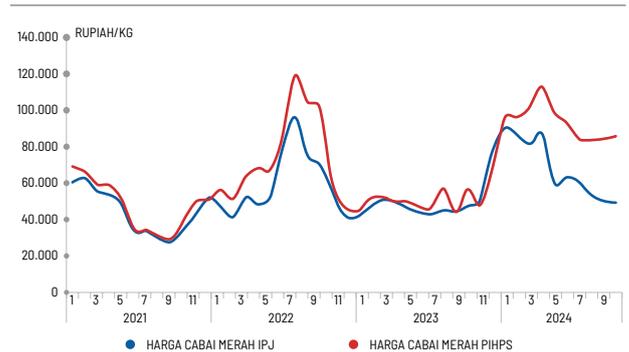
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi sebesar 6.57% (yoy) sehingga memberikan andil sebesar 0,43% terhadap inflasi IHK Jakarta. Perkembangan ini lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 5,98% (yoy). Masih berlanjutnya tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar Jakarta pada triwulan III 2024. Emas perhiasan tercatat mengalami inflasi sebesar 31,81% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,31% terhadap pembentukan inflasi Jakarta. Tingginya harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia akibat dinamika ketidakpastian global yang masih berlanjut. Berdasarkan pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, rata-rata harga emas perhiasan pada triwulan III 2024 sebesar Rp 1.099.456,43/gram, atau mencatatkan kenaikan harga sebesar 35,56% (yoy).



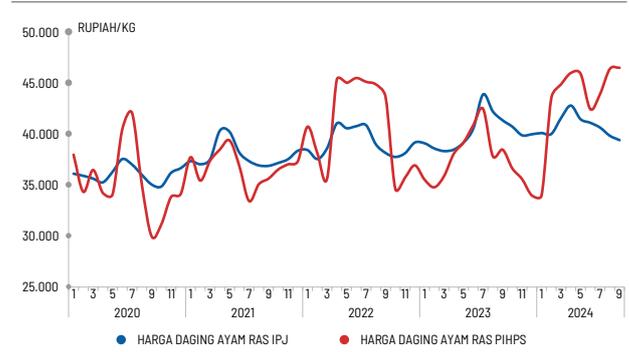
Grafik 4.3 Perkembangan Harga Beras



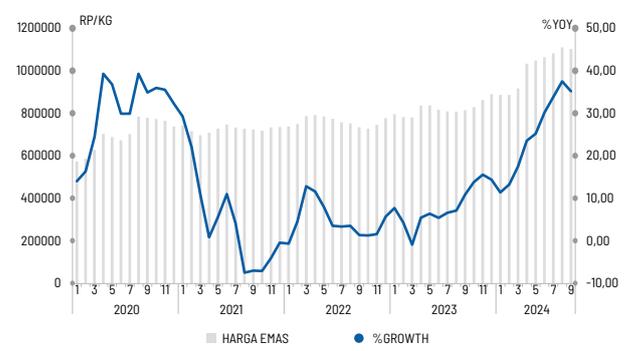
Grafik 4.4 Perkembangan Stok Beras



Grafik 4.5 Perkembangan Harga Cabai Merah



Grafik 4.6 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



Grafik 4.7 Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta

Selanjutnya, inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024 juga disumbang oleh **kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran** yang memberikan andil sebesar 0,22% terhadap inflasi IHK Jakarta. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,22% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada triwulan sebelumnya (2,26% yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh stabilnya harga kue kering berminyak yang memberikan andil inflasi sebesar 0,07% (yoy). Selain komoditas tersebut, komoditas es, sop, dan ayam goreng masing-masing juga turut berkontribusi dengan masing-masing andil sebesar 0,02 persen terhadap pembentukan inflasi Jakarta triwulan III 2024. Penurunan inflasi yang terjadi pada kelompok ini utamanya bersumber dari normalisasi permintaan masyarakat seiring dengan telah berlalunya periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024 juga disumbang oleh **kelompok pendidikan** dengan andil sebesar 0,15%. Kelompok ini mengalami inflasi yang meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,18% (yoy) menjadi 2,35% (yoy). Penyumbang utama pada kelompok ini adalah terjadinya kenaikan biaya Sekolah Dasar (SD) dan biaya bimbingan belajar yang masing-masing berkontribusi sebesar 0,05% dan 0,04%. Selain itu biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) juga turut berkontribusi dengan andil masing-masing sebesar 0,02% terhadap pembentukan inflasi Jakarta triwulan III 2024. Kenaikan tekanan inflasi tersebut utamanya bersumber dari adanya proses penyesuaian biaya sekolah seiring dengan telah masuknya tahun ajaran baru.

Pada triwulan III 2024, **kelompok transportasi** memberikan kontribusi terhadap inflasi IHK Jakarta sebesar 0,15%. Kelompok ini mengalami penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,98% (yoy) menjadi 1,07% (yoy) pada triwulan III 2024. Kontributor utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga tiket angkutan udara yang tercatat mengalami inflasi sebesar 12,83% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,13% terhadap pembentukan inflasi Jakarta. Komoditas lain yang turut berkontribusi dalam pembentukan inflasi pada kelompok ini adalah tarif jalan tol yang tercatat memiliki andil sebesar 0,03%. Namun, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi harga bensin yang tercatat mengalami koreksi harga sebesar -0,88% (yoy) dan berkontribusi -0,05% terhadap pembentukan inflasi Jakarta. Adapun hal tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan harga BBM Pertamina, Pertamina Turbo, Dexcelite dan Pertamina Dex pada penghujung triwulan III 2024. Selain itu, normalisasi frekuensi penggunaan moda transportasi, seiring dengan telah berlalunya periode liburan, juga turut menjadi penyumbang penurunan tekanan inflasi pada kelompok ini.

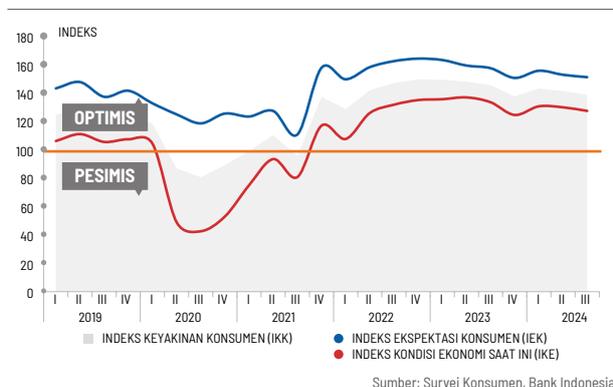
Inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024 juga didorong oleh **kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga** dengan andil sebesar 0,14%. Kelompok ini mengalami kenaikan inflasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,96% (yoy) menjadi 2,20% (yoy) pada triwulan III 2024. Komoditas utama yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah upah asisten rumah tangga dengan kontribusi sebesar 0,07% dan mengalami kenaikan harga sebesar 3,15% (yoy). Selain itu, komoditas pengharum cucian/pelembut, upah *babysitter*, pembersih lantai, sabun detergen bubuk dan kamper turut berkontribusi dalam pembentukan inflasi Jakarta yang masing-masing memiliki andil sebesar 0,01%. Inflasi pada komoditas-komoditas tersebut bersumber dari kenaikan permintaan seiring dengan telah kembali bekerjanya asisten rumah tangga setelah periode liburan HBKN di Idul Fitri.

Sementara itu, **kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga** tercatat memberikan kontribusi terhadap inflasi IHK Jakarta sebesar 0,11% dan mengalami inflasi sebesar 0,51% (yoy) atau sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

0,52% (yoy). Terjadinya inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari harga sewa rumah yang memberikan andil sebesar 0,08% terhadap pembentukan inflasi Jakarta triwulan III 2024 dan mengalami kenaikan harga mencapai 1,87% (yoy). Selain komponen sewa rumah, harga kontrak rumah juga turut menjadi kontributor inflasi pada kelompok ini dengan memberikan andil sebesar 0,03% terhadap Inflasi IHK Jakarta.

Sementara itu, **kelompok kesehatan** tercatat memberikan andil sebesar 0,03% terhadap pembentukan inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024. Laju inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami penurunan dari 1,62% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,82% (yoy). Selanjutnya, **kelompok pakaian dan alas kaki** juga menjadi penyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,02% (yoy) terhadap inflasi IHK triwulan III 2024. Kelompok ini mengalami tekanan inflasi sebesar 0,44% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,65% (yoy). Komoditas yang menjadi kontributor utama inflasi pada kelompok ini adalah mukena dan sepatu wanita dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Selain itu, **kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya** tercatat memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,01% terhadap inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2024, dengan tingkat inflasi sebesar 0,65% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,49% (yoy). Terakhir, **kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan** juga turut berkontribusi terhadap pembentukan inflasi IHK DKI Jakarta triwulan III 2024 namun dengan andil yang sangat kecil (mendekati 0%). Kelompok ini mengalami tekanan inflasi sebesar 0,04% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,19% (yoy).

Terkendalinya inflasi pada triwulan III 2024 turut mendukung momentum pemulihan ekonomi seiring keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) masih berada di atas batas level optimis (100) pada triwulan III 2024 walau tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.8). Pada triwulan III 2024, indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 139 sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan



Grafik 4.8 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

sebelumnya (141,6). Berdasarkan komponen pembentuknya, Indeks kondisi ekonomi saat ini pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 127,5 sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (130,0). Lebih lanjut, indeks ekspektasi konsumen triwulan III 2024 tercatat sebesar 151,4 atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 153,1.

B. TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2024

Pada awal triwulan IV 2024, inflasi tetap terkendali. IHK Jakarta pada Oktober 2024 terpantau mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya tercatat deflasi sebesar 0,10% (mtm). Inflasi pada Oktober 2024 utamanya bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, inflasi pada bulan ini juga turut bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; dan kelompok kesehatan yang kembali mengalami inflasi setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi. Namun inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi. (Grafik 4.9).

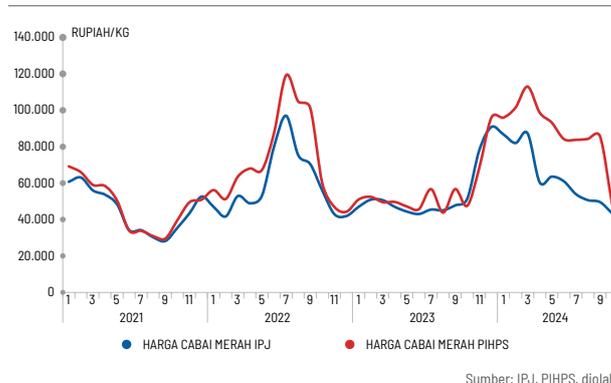
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kontributor inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi IHK bulanan Jakarta Oktober 2024. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 0,93% (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,34% (mtm). Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang mengalami inflasi sebesar 4,28% (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,05% terhadap pembentukan inflasi IHK Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan tren kenaikan emas global yang terus berlanjut.

Sementara itu, **Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi salah satu kelompok utama penyumbang kenaikan inflasi IHK Jakarta pada Oktober 2024 dengan andil sebesar 0,03% terhadap inflasi IHK bulanan Jakarta. Kelompok tersebut tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,59% (mtm). Berdasarkan komoditasnya,

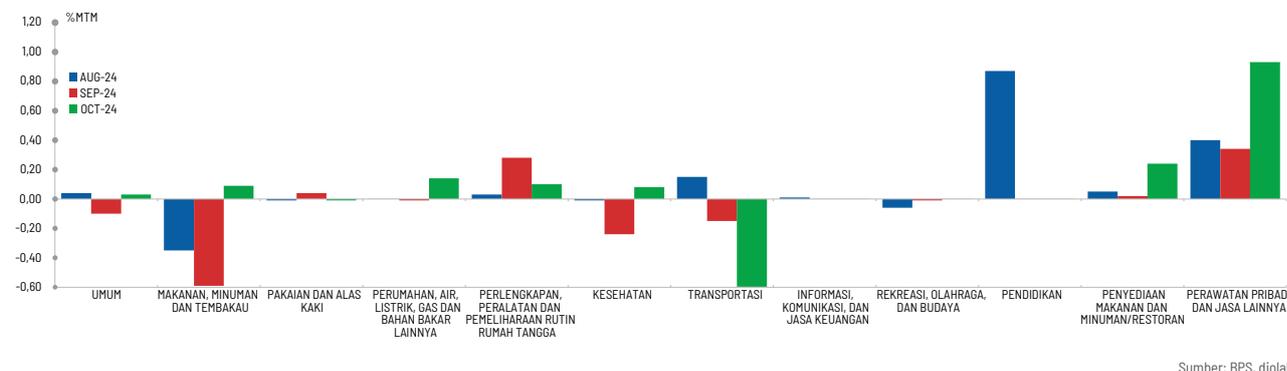
daging ayam ras; kopi bubuk; dan beras tercatat menjadi kontributor utama pada kelompok ini dengan inflasi masing-masing sebesar 1,93% (mtm); 2,23% (mtm); dan 0,25% (mtm) serta memberikan andil masing-masing sebesar 0,02%; 0,01%; dan 0,01% terhadap pembentukan inflasi Jakarta.

Namun kenaikan lebih lanjut tertahan oleh deflasi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama seperti Cabai Merah, Bawang Merah, dan Cabai Rawit. Ketiga komoditas tersebut secara berurutan mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm); 0,01% (mtm); dan 0,01% (mtm) dan memberikan andil sebesar -11,26%; -2,49%; dan -5,37% terhadap pembentukan inflasi IHK Jakarta. Deflasi tersebut utamanya bersumber dari melimpahnya pasokan di daerah sentra produksi seiring dengan mulai masuknya musim panen.

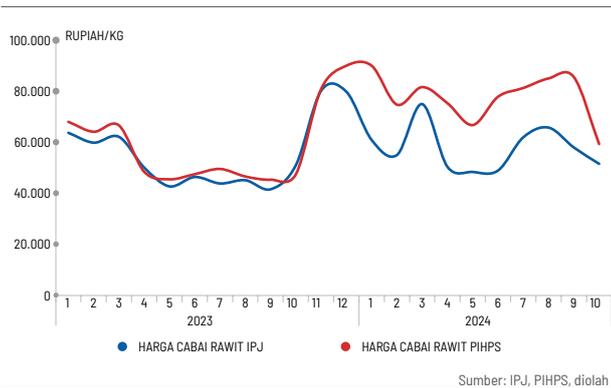
Kondisi tersebut kemudian tercermin baik dari pantauan IPJ maupun PIHPS pada Oktober 2024. Berdasarkan pantauan IPJ, rata-rata harga cabai merah tercatat mengalami penurunan dari Rp 49.440/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp 43.310/kg di Oktober 2024. Lebih lanjut, rata-rata harga cabai rawit juga mengalami penurunan dari Rp 57.970/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp 51.577/kg di Oktober 2024. Sementara itu, berdasarkan pantauan PIHPS, rata-rata harga bawang merah tercatat mengalami penurunan dari Rp 44.685/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp 38.605/kg di Oktober 2024.



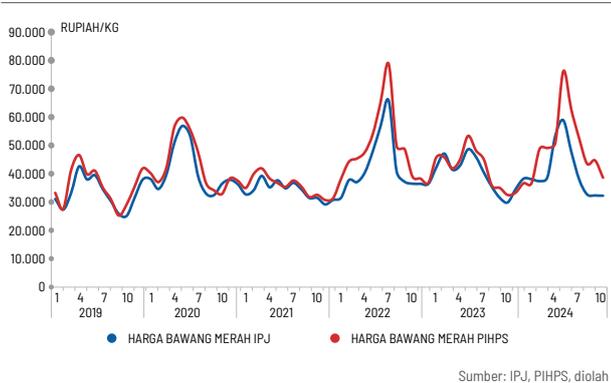
Grafik 4.10 Perkembangan Harga Cabai Merah



Grafik 4.9 Inflasi Kelompok Pengeluaran Agustus-Oktober 2024



Grafik 4.11 Perkembangan Harga Cabai Rawit



Grafik 4.12 Perkembangan Harga Bawang Merah

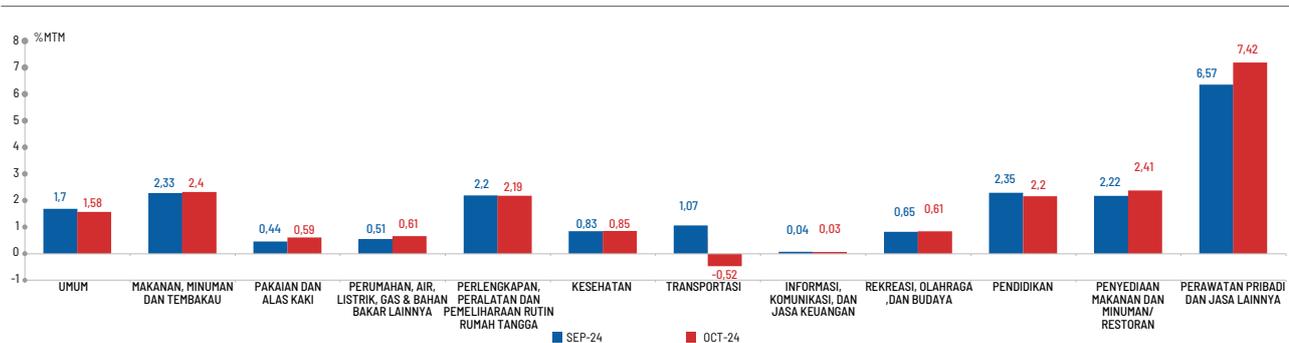
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga turut menyumbang inflasi Jakarta pada periode ini dengan andil sebesar 0,03%. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm). Inflasi tersebut utamanya bersumber dari komoditas tukang bukan mandor yang memiliki andil sebesar 0,02% dan mengalami inflasi sebesar 5,41% (mtm). Sementara, komoditas lainnya yang juga turut berkontribusi dalam kenaikan inflasi pada kelompok ini adalah iran pembuangan sampah yang memiliki andil sebesar 0,01%.

Kelompok lainnya yang turut berkontribusi dalam pembentukan inflasi bulanan Jakarta pada Oktober 2024 adalah **Kelompok Penyediaan**

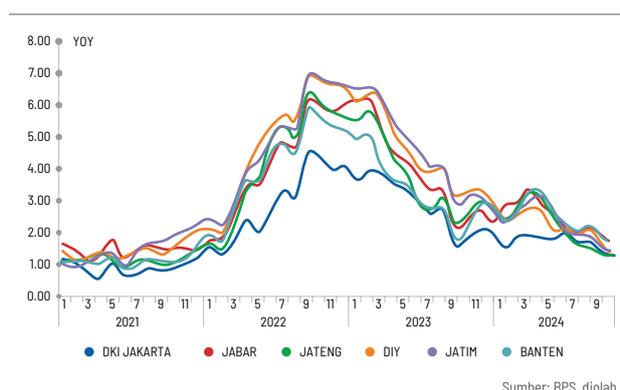
Makanan dan Minuman/Restoran serta **Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**. Keduanya secara berurutan tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,24% (mtm) dan 0,10% (mtm) serta memiliki andil terhadap pembentukan inflasi bulanan Jakarta masing-masing sebesar 0,02% dan 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bulanan pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran adalah nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,02%. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bulanan pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga adalah komoditas lemari pakaian dengan andil sebesar 0,01%.

Tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh **Kelompok Transportasi** yang mengalami deflasi sebesar 0,85% (mtm) lebih dalam dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,15% (mtm). Lebih lanjut, kelompok ini memberikan andil sebesar -0,12% terhadap pembentukan inflasi bulanan Jakarta. Komoditas utama yang menyebabkan deflasi adalah Bensin yang mengalami deflasi sebesar 1,63% (mtm) dan memberikan andil -0,09% terhadap pembentukan inflasi Jakarta. Lebih lanjut, deflasi bensin tersebut terjadi sejalan dengan kebijakan penurunan harga BBM jenis Pertamina, Pertamina Turbo, dan Dexlite pada bulan Oktober 2024.

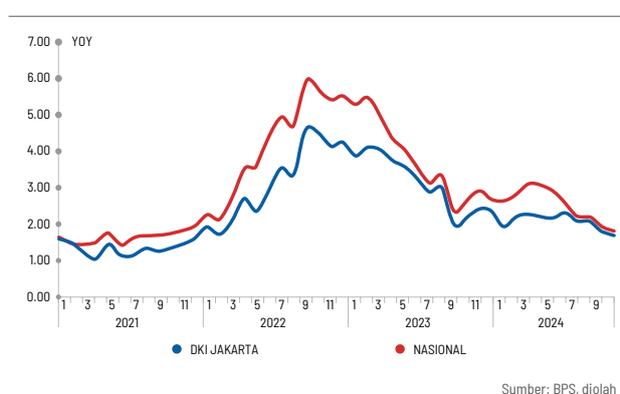
Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Oktober 2024 terpantau menurun dan tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. IHK Jakarta pada Oktober 2024 tercatat mengalami inflasi 1,58% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,70% (yoy) (Grafik 4.13). Tekanan inflasi tahunan Oktober 2024 utamanya bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi mencapai 7,42% (yoy) dengan andil 0,48% diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 2,40% (yoy) dan andil 0,45% serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan tingkat inflasi sebesar 2,41% (yoy) dengan andil sebesar 0,24%. Komoditas yang menjadi kontributor inflasi utama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas yang mengalami inflasi sebesar 36,17% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,35%. Sementara itu, komoditas yang menjadi kontributor inflasi utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah beras yang mengalami inflasi sebesar 6,36% (mt) dan memberikan



Grafik 4.13 Inflasi tahunan Kelompok Pengeluaran Sept-Okt 2024



Grafik 4.14 Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa



Grafik 4.15 Inflasi Jakarta dan Nasional

andil sebesar 0,13%. Terakhir, komoditas yang menjadi kontributor inflasi utama pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran adalah kue kering berminyak yang memberikan andil inflasi sebesar 0,07%.

Berbagai perkembangan tersebut berdampak pada inflasi tahunan Jakarta pada Oktober 2024 yang tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,71% (yoy), dan inflasi gabungan kota/kabupaten di Pulau Jawa (Grafik 4.14-4.15).

C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN III 2024

Realisasi inflasi di Jakarta yang terkendali dalam rentang target inflasi tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada kerangka 4K, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif**, yang dijabarkan lebih lanjut pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024. Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup, dan mudah

dijangkau baik dari sisi pasokan, maupun harga di tengah peningkatan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi tanaman pangan, dan kenaikan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespons perkembangan inflasi pangan, TPID melakukan penguatan pengendalian inflasi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, Hilirisasi Pangan maupun Implementasi Gerakan Urban Farming dan Digital Farming.

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Program pangan bersubsidi. Pangan bersubsidi berlangsung di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sepanjang Triwulan III 2024 dengan penerima program yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima manfaat pangan subsidi. Program ini merupakan kolaborasi dari Pemprov DKI Jakarta, BUMD Pangan DKI Jakarta serta para stakeholder yang terlibat. Adapun lokasi pengambilan pangan subsidi telah ditentukan oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, yaitu diantaranya RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, serta seluruh gerai milik Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai milik Perumda Dharma Jaya.
2. Program pasar murah. Pasar murah dilakukan secara rutin oleh BUMD pangan (PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya) dengan menggunakan truk keliling ke seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta sepanjang bulan Juli-September 2024. Adapun komoditas yang rutin disediakan antara lain berupa beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, aneka cabai, aneka bawang dan aneka daging.
3. Program sembako murah. Program ini merupakan salah satu program inisiatif Pemprov DKI Jakarta yang mulai berlangsung pada tahun 2024 dengan melibatkan berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Realisasi program sembako murah hingga September 2024 telah mencapai lebih dari 100 titik lokasi dengan lebih dari 100.000 paket sembako murah telah disalurkan.
4. Program bazar pangan murah. Kegiatan ini berupa Bulog Goes OTW Rusun yang dilakukan sepanjang Bulan Juli-September 2024.

Ketersediaan Pasokan

Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan melalui pengamanan pasokan komoditas pangan, diantaranya:

1. Realisasi beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). SPHP telah tersalurkan oleh BULOG Kanwil Jakarta Banten sebanyak 249,590 ton periode Januari hingga dengan September 2024, atau sebesar 129,37% dari target DKI Jakarta sebesar 192.921 ton.

2. Program Penguatan Urbang Farming:
 - a. TPID Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur menggelar kegiatan Pelatihan Urban Farming pada 17 hingga 19 Juli 2024 yang tersebar di 10 Kecamatan. dengan total peserta sebanyak 400 orang. Peserta berasal dari kelompok tani, pengelola RPTRA, Karang Taruna, PKK, PPSU, Swasta, Ibu Rumah Tangga, serta penggiat urban farming.
 - b. TPID Provinsi DKI Jakarta melalui DKPKP Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Urban Farming di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, tanggal 17-19 September 2024, dengan tema "Hijaukan Jakarta, Wujudkan Ketahanan Pangan". Kegiatan dirangkai dengan bantuan sarana pertanian dari PJ Gubernur, talkshow, seminar, bimbingan teknis, lomba, dan pameran
3. Program Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah
 - a. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan CV Sari Bumi Nusantara (Kampung Inovasi IPB Subang) dalam rangka menjalin kemitraan mengenai budidaya padi guna mendapatkan kepastian stok bahan baku dan jaminan terserapnya hasil produksi petani.
 - b. Penjajakan kerjasama bilateral PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Bulog dengan Co May Limited Company Vietnam, guna mendorong perluasan potensi bisnis.
 - c. Penjajakan Kerjasama Ekspor PT. Food Station Tjipinang Jaya dengan Embassy of Malaysia Trade Office (Matrade).
 - d. Penandatanganan kerjasama penyediaan pangan PT. Food Station Tjipinang Jaya dengan Perum Bulog Kanwil Sulselbar pada 03 September 2024.
4. Program Penguatan Hilirisasi Pangan:
 - a. TPID Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas KPKP Jakarta Timur memperkuat diversifikasi olahan hasil panen cabai rawit menjadi bubuk cabai melalui produksi "Boncara Raja".
 - b. TPID Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas KPKP Jakarta Pusat menyelenggarakan pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian, di Training Center Pertanian Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada 09 Juli 2024.
 - c. TPID Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas KPKP Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan pelatihan diversifikasi pangan olahan asal ternak pada 12-14 Agustus 2024 di wilayah Jakarta Timur, dengan peserta masyarakat umum dan binaan jakpreneur sebanyak 200 peserta.
5. Program Panen Bersama:
 - a. TPID Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan panen bawang merah di wilayah Kota Jakarta Selatan pada 26 Juli 2024 di Kebun Agro Eduwisata Ragunan. Adapun komoditas yang dipanen adalah bawang merah, cabai, dan pakcoy,

dengan total panen diantaranya bawang merah sebanyak 38kg, cabai rawit sebanyak 2 kg, dan pakcoy sebanyak 10Kg.

- b. TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan panen hasil Urban Farming LRT Jakarta dan tabur benih ikan yang diselenggarakan pada 12 September 2024 di Green House LRTJ, kawasan Depo LRT Jakarta dengan luas lahan sekitar 12 hektar dan area greenhouse seluas 351 m². Hasil Panen kegiatan ini merupakan hasil penanaman perdana 1.000 batang bibit cabai Area Depo LRT pada 18 Januari 2024 dan hingga bulan September 2024 LRT Jakarta telah memanen sebanyak 186,3 kg cabai dan sebanyak 10.000 ekor nila.
- c. TPID Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan panen bawang merah serentak pada 27 September 2024 di 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan bersama kader TPKK dan praktisi urban farming. Dalam rangka upaya pemanfaatan lahan untuk tanaman produktif dan mendukung upaya menjaga inflasi, Sudin KPKP Jaksel melakukan penanaman bawang merah pada bulan Juli sebelumnya. Pemilihan komoditas ini karena bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memengaruhi inflasi daerah. Tanaman bawang merah yang ditanam merupakan hasil aklimatisasi dengan iklim Jakarta sehingga diharapkan menghasilkan produk yang baik dan unggul.

Kelancaran Distribusi

Adapun upaya untuk mendorong kelancaran distribusi diantaranya adalah:

1. Fasilitas Distribusi Pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan BUMD Pangan dalam fasilitas distribusi pangan melalui penyewaan truk untuk distribusi penjualan pangan murah ke seluruh wilayah administratif Jakarta.
2. Perluasan distribusi pangan ke seluruh wilayah DKI Jakarta:
 - a. TPID Provinsi DKI Jakarta masih terus melangsungkan kegiatan pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta dari level Kelurahan hingga Rusun melalui kegiatan penjualan rutin yang dilakukan oleh BUMD Pangan dengan menggunakan truk keliling di wilayah administratif Jakarta sepanjang Juli- September 2024.
 - b. TPID Provinsi DKI Jakarta Gelar Bazar Pangan di Kepulauan Seribu dalam rangka menjaga kestabilan harga dan menghadirkan kebutuhan pangan pokok berkualitas hingga ke Kepulauan Seribu yang diselenggarakan di Pulau Tidung dan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 19 Juli 2024. Bazar Pangan Murah menghadirkan beberapa komoditas diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah dengan total keseluruhan mencapai 5,78 ton. Seluruh komoditas tersebut diangkut dari Jaksrosir Induk Kramat Jati ke Pulau Tidung dan Pulau Pramuka pada tanggal 18 Juli 2024. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta turut mendukung kegiatan

ini melalui fasilitasi distribusi pangan berupa subsidi ongkos angkut komoditas dan fasilitasi penyelenggaraan Bazar Pangan Murah.

3. Perluasan jalur distribusi pangan di Jakarta:

- a. Kegiatan *soft launching foodhub* mitra warung sembako Food Station di Palmerah Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jaringan bisnis serta membantu masyarakat untuk menjangkau kebutuhan komoditas pangan strategis dengan merangkul mitra warung sembako dan *soft launching foodhub* di Palmerah, Jakarta Barat pada 31 Juli 2024.
- b. Penyaluran pangan bersubsidi melalui Jakgrosir dan Gerai Pangan, di Pulau Tidung Kecil. Jakgrosir dihadirkan agar warga Kepulauan Seribu dapat menikmati kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah, setara dengan harga di wilayah daratan pulau Jawa. Kehadiran Jakgrosir di pulau ini merupakan salah satu bentuk komitmen nyata TPID DKI Jakarta dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok berkualitas dan terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kepulauan.
- c. Penjajakan perluasan distribusi PT. Food Station Tjipinang Jaya ke wilayah Bodetabek, melalui kerja sama dengan Pilih Toko Terdekat (PIKKAT) yang memiliki mitra bisnis berupa warung/toko ritel UMKM, bisnis koperasi karyawan yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bandung pada 18 Juli 2024.
- d. Perumda Pasar Jaya melakukan pembukaan gerai pangan baru yang berlokasi di Gerai Pangan kelurahan Ceger. Dengan adanya penambahan gerai ini diharapkan warga di wilayah Ceger Jakarta Timur dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dengan mudah dan juga turut memudahkan pendistribusian program pangan bersubsidi DKI Jakarta.

Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, diantaranya:

1. Anggota TPID Provinsi DKI Jakarta masing-masing secara aktif menginformasikan berbagai program pengendalian Inflasi melalui sosial media instansi masing-masing anggota TPID Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya menjaga ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan program pengendalian inflasi di Jakarta.
2. Kegiatan Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa tahun 2024 yang dirangkai dengan seremonial GNPIP wilayah Jawa telah diselenggarakan pada 14 Agustus 2024 di Semarang. Rakor juga dihadiri oleh anggota TPID Jakarta dengan penguatan program berupa: a) Program Penguatan Produktivitas Komoditas Pangan Strategis, b) Perluasan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) maupun Operasi Pasar, dan c) Penguatan Digitalisasi melalui Penggunaan Sistem Informasi.
3. Kegiatan *Capacity Building* dan Studi Banding TPID Provinsi DKI Jakarta ke TPID Provinsi Kepulauan Riau pada 23-25 Agustus 2024 dengan mengusung tema "Strategi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah Nonprodusen". Pada kegiatan tersebut juga dilakukan kunjungan ke Batamindo *Green Farm* yang merupakan pertanian hidroponik terbesar dan *modern* di Indonesia, untuk mendalami potensi penguatan *urban farming*.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan koordinasi, secara rutin TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya lainnya seperti: i) Rapat mingguan TPID Provinsi DKI setiap hari Kamis; ii) Rapat Koordinasi Nasional bersama Kemendagri setiap hari Senin; iii) Rapat Sinergi Bank Indonesia dengan 3 (tiga) BUMD Pangan DKI Jakarta pada bulan Juli dan September dalam rangka penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.



BOKS 2

Menjaga Stabilitas Harga Hingga Ujung Terluar Jakarta

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen menjalankan berbagai program pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi program 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Program tersebut bertujuan untuk menjaga inflasi Jakarta tetap berada dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024 sekaligus memastikan stabilitas harga di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi wilayah Kepulauan Seribu adalah tingginya harga kebutuhan pokok dibandingkan daratan Jakarta. Keterbatasan akses logistik menjadi penyebab utama tingginya harga bahan pokok karena adanya biaya tambahan untuk pengangkutan barang menggunakan kapal dari pelabuhan di Jakarta menuju pulau-pulau di wilayah tersebut. Kondisi ini kerap menciptakan kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Sebir yang terletak di paling ujung utara Jakarta.



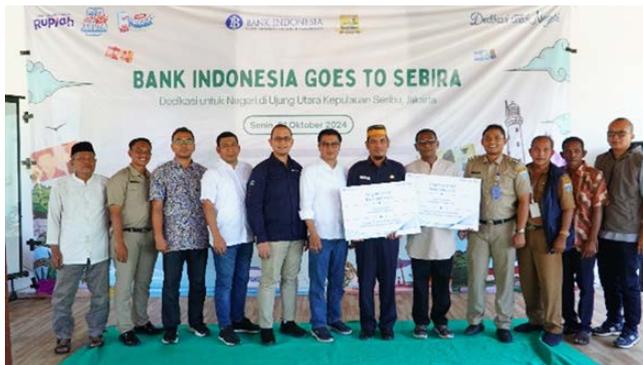
Gambar B2.1 Bazar Pangan Murah di Pulau Sebir, Kepulauan Seribu

Sebagai bagian dari upaya mengatasi tantangan tersebut, TPID Provinsi DKI Jakarta menggelar Bazar Pangan Murah di Pulau Sebira pada Senin, 21 Oktober 2024. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (BI Jakarta) dan Perumda Pasar Jaya. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Direksi Perumda Pasar Jaya Bapak Sumanto, Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bapak Hestu Wibowo dan Bapak Prasaja Widiatmaka, serta Wakil Camat Kepulauan Seribu Bapak Yulihardi.

Dalam pelaksanaannya, bazar ini menyediakan sekitar 200 paket sembako dan menghadirkan berbagai komoditas pangan strategis, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan cabai merah, dengan total muatan mencapai 5 ton. Dalam kegiatan ini, Perumda Pasar Jaya menjadi penyedia utama komoditas, sementara BI Jakarta turut mendukung kegiatan ini melalui fasilitasi distribusi berupa penyewaan kapal muat barang. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah ini bertujuan menghadirkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, serta dengan harga di daratan Jakarta, kepada

warga kepulauan yang memiliki keterbatasan akses logistik. Tak hanya bazar pangan, acara ini juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan sosial lainnya, yakni penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa bantuan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan rumah ibadah. Selain itu, tersedia pula layanan penukaran uang rupiah yang berkolaborasi dengan Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia.

Masyarakat Pulau Sebira menyambut kegiatan ini dengan antusias. Mereka berharap frekuensi program serupa dapat ditingkatkan, mengingat dampak positifnya dirasakan langsung oleh warga, terutama dalam mengurangi beban ekonomi akibat tingginya harga bahan pokok. Kegiatan ini mencerminkan komitmen TPID Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau di seluruh wilayah, bahkan hingga ke wilayah terluar DKI Jakarta. Dengan sinergi yang terus terjalin antara berbagai pihak, upaya pengendalian inflasi oleh TPID DKI Jakarta diharapkan dapat mendukung terjaganya inflasi Jakarta pada rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan mendukung terciptanya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.



Gambar B2.2 Pemberian Bantuan Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Layanan Penukaran Uang

BAB 5

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Intermediasi perbankan tetap kuat dengan didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh kondisi likuiditas bank yang memadai seiring penguatan strategi funding dari sumber pendanaan lainnya di tengah perlambatan DPK. Implementasi berbagai pelanggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia turut mendukung tetap kuatnya fungsi intermediasi perbankan. Ketahanan bank tetap terjaga ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah dan cenderung turun.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi masih tumbuh tinggi seiring dengan membaiknya kinerja korporasi. Profitabilitas korporasi nonkeuangan meningkat sejalan dengan meningkatnya penjualan. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) kredit korporasi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga tetap baik meskipun untuk kelas menengah bawah perlu menjadi perhatian. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang masih terjaga pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit sektor UMKM meningkat dengan risiko kredit yang mulai turun. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

IN2MF

INDONESIA INTERNATIONAL
MODEST FASHION FESTIVAL



LINA SUKIJO



Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)



6,36%

Triwulan III 2024

8,80%

Triwulan II 2024

Pertumbuhan Kredit (Lokasi Proyek), yoy



17,30%

Triwulan III 2024

19,90%

Triwulan II 2024

Pertumbuhan Kredit UMKM, yoy



2,71%

Triwulan III 2024

2,43%

Triwulan II 2024

Loan-to-deposit Ratio (Lokasi Proyek), yoy



57,01%

Triwulan III 2024

55,31 %

Triwulan II 2024

Non-Performing Loan (Lokasi Proyek), yoy



1,20%

Triwulan III 2024

1,22%

Triwulan II 2024

A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

Kinerja bank umum di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 terjaga baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Kinerja yang terjaga tersebut ditunjukkan oleh intermediasi perbankan yang tetap kuat dengan diiringi rasio *non performing loans* yang rendah. Capaian ini didukung oleh konsistensi, inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian bauran kebijakan nasional.

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial serta juga didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan, Bank Indonesia masih terus mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar. Selain itu, mulai Juni 2024, Bank Indonesia juga menerapkan penyempurnaan Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau.

Bauran berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kapasitas perbankan yang terjaga baik antara lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan

diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Dengan *cost of fund* yang lebih ringan bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga lebih murah sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

Pada triwulan III 2024, kredit bank umum berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta tercatat tumbuh tinggi sebesar 17,30% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring dengan pertumbuhan kredit, total aset bank umum juga meningkat menjadi sebesar Rp7.817 triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,32% (yoy) (Tabel 5.1). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 52,00%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 35,35%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 11,19%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,46% (Grafik 5.1).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

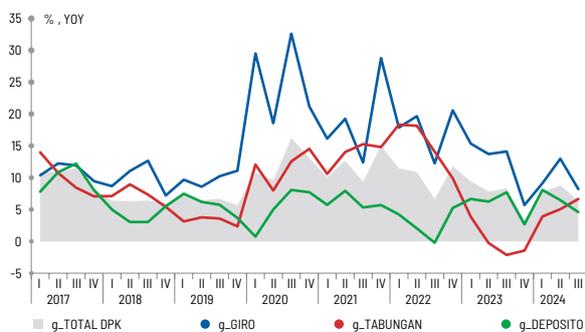
NO	KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Total Asset	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721	7.810	7.817
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539	4.560	4.505
3	Kredit											
	- Lokasi Bank (LB)	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580	3.729	3.746
	- Lokasi Proyek (LP)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401	2.522	2.572
4	Pertumbuhan :											
	- g_Aset (% , yoy)	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20	8,46	7,32
	- g_DPK (% , yoy)	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78	8,80	6,36
	- g_Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51	16,48	13,32
	- g_Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83	19,41	19,90	17,30
5	Intermediasi (tanpa SB)											
	-Lokasi Bank	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87	81,78	83,15
	-Lokasi Proyek	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90	55,31	57,10
6	Non performing loan (NPL)											
	- Lokasi Bank	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83	1,86	1,78
	- Lokasi Proyek	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34	1,22	1,20

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Kinerja penghimpunan DPK di DKI Jakarta masih tetap solid. Pada triwulan III 2024, DPK tercatat tumbuh tinggi sebesar 6,36% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,80% (yoy) (Grafik 5.2). Kinerja DPK yang tetap solid terutama ditopang oleh Giro dan Deposito yang tetap tumbuh tinggi serta pangsa yang dominan terhadap total DPK di Jakarta (Grafik 5.3).

Berdasarkan pemiliknya, pertumbuhan DPK ditopang oleh DPK milik Korporasi dan Pemerintah. DPK korporasi tumbuh cukup tinggi sebesar 12,81% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,02% (yoy). Perlambatan ini mengindikasikan sebagian pendanaan korporasi masih mengandalkan dana internal perusahaan. Adapun DPK Pemerintah tumbuh sebesar 6,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 0,32% (yoy). Peningkatan ini disinyalir dipengaruhi oleh masuknya anggaran dari Pemerintah kepada perbankan di daerah pada triwulan III 2024. Sementara itu, DPK Rumah Tangga melanjutkan pertumbuhan yang negatif sebesar -4,48% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -1,67% (yoy). Penurunan DPK milik rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan penarikan DPK untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat kelompok menengah bawah dan *shifting* simpanan kepada penempatan lain di luar DPK yang memberikan imbal hasil lebih tinggi oleh masyarakat kelompok menengah atas (Grafik 5.4).

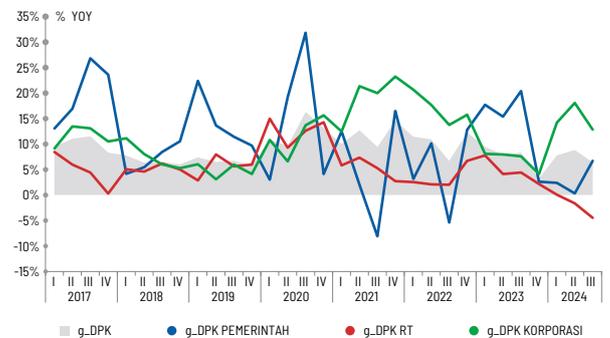


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK Jakarta

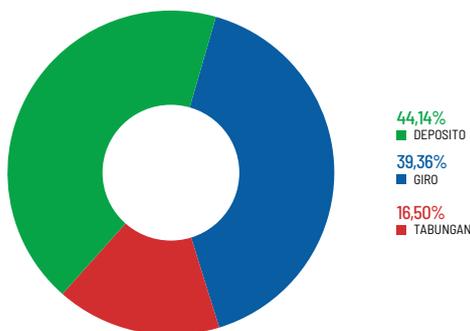
Secara spasial, DPK di seluruh wilayah di Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, dengan angka pertumbuhan tertinggi terjadi di Jakarta Timur. Sedangkan berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan DPK Jakarta pada triwulan III 2024 ditopang oleh Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sejalan dengan peran keduanya sebagai kota pusat bisnis utama di Jakarta dengan pangsa DPK yang besar di kedua wilayah tersebut. Sementara itu, Kepulauan Seribu kembali mengalami mencatatkan pertumbuhan positif setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam (Grafik 5.5).

Meskipun tumbuh melambat, kenaikan DPK Jakarta mendorong tetap dominannya pangsa DPK DKI Jakarta terhadap Nasional. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai lebih dari 50% DPK perbankan nasional (Grafik 5.6). Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai tumpuan penghimpunan dana perbankan secara nasional, terutama Deposito. Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan III 2024 adalah sebesar 6,36% (yoy) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 7,04% (yoy) (Grafik 5.7).



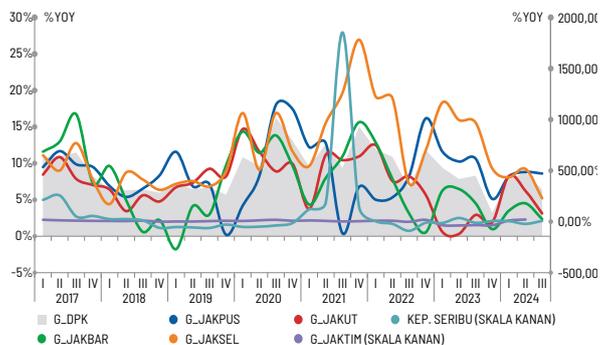
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta



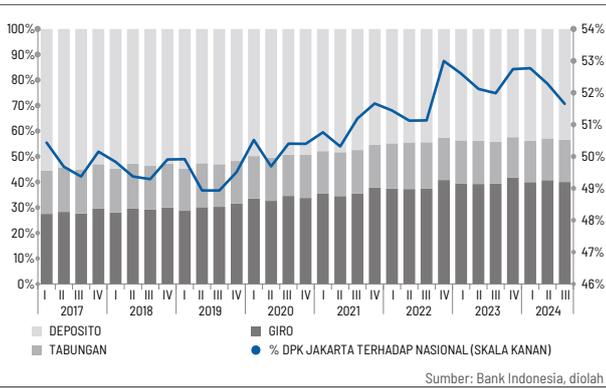
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Komposisi DPK Jakarta



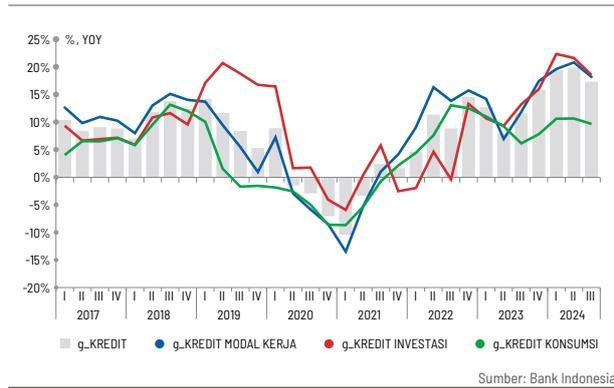
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta



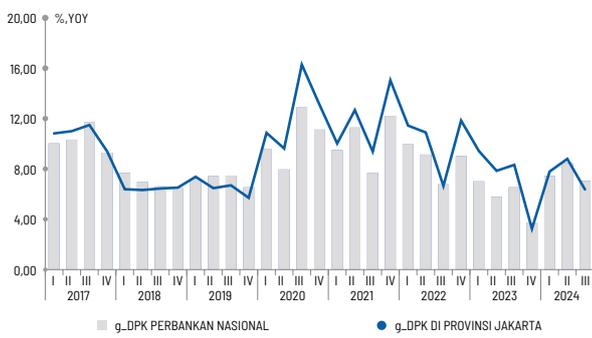
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional



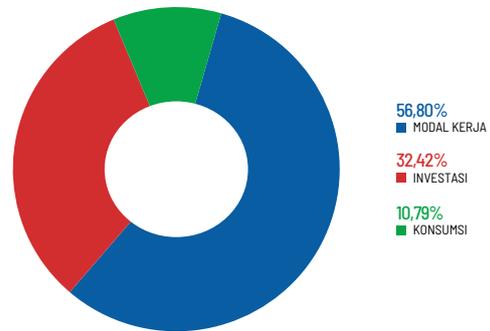
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Perkembangan Kredit Bank Umum

Sejalan dengan DPK, pada triwulan III 2024, kredit bank umum di DKI Jakarta juga masih tumbuh solid meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat tumbuh tinggi sebesar 17,30 (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang sebesar 19,90% (yoy). Kredit berdasarkan lokasi bank juga tercatat tumbuh tinggi 13,32% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 16,48% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit produktif yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Kredit KMK tumbuh tinggi sebesar 18,16% (yoy), namun sedikit di bawah pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,83% (yoy). Kredit Investasi juga tumbuh tinggi 18,53% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 21,63% (yoy). Peningkatan kedua jenis kredit ini sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin membaik. Sementara itu, kredit konsumsi juga tumbuh positif meskipun tidak setinggi KMK dan KI (Grafik 5.8). Berdasarkan pangsa, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 56,80%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 32,42% dan 10,79% (Grafik 5.9).

Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi utamanya dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen

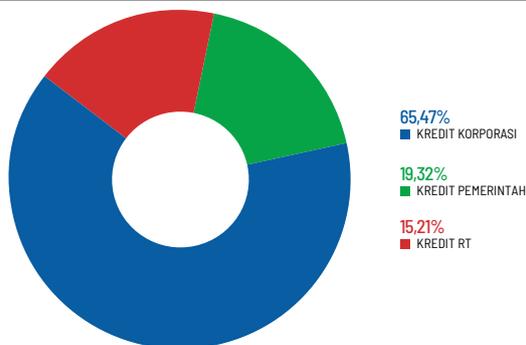
kebijakan makroprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta inovasi Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial yang ditempuh secara konsisten dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga kredit cenderung terbatas.

Fungsi intermediasi bank yang terjaga tersebut juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Sinergi tersebut sejalan dengan penguatan mandat dan kewenangan masing-masing lembaga serta mekanisme koordinasi yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penguatan sinergi dengan otoritas di tingkat nasional didukung pertemuan berkala Forum Komite Stabilitas Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan (Koordinator KSSK merangkap anggota dengan hak suara), Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai anggota dengan hak suara, serta Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota dengan tanpa hak suara. Sementara itu, penguatan sinergi di tingkat internasional antara lain ditunjukkan dengan ketetuaan Indonesia pada G20 2022 dan ASEAN 2023 serta peran aktif Indonesia di berbagai fora internasional lainnya.

Kondisi pertumbuhan kredit yang terjaga baik terkonfirmasi dari hasil survei Perbankan Triwulan III 2024 dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru mengalami pertumbuhan positif. Selain itu, optimisme peningkatan kredit di triwulan III juga terkonfirmasi dari Survei Orientasi Bisnis Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan III 2024 meningkat dibandingkan triwulan II 2024 menjadi sebesar 68 pada zona optimis. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi akan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi.

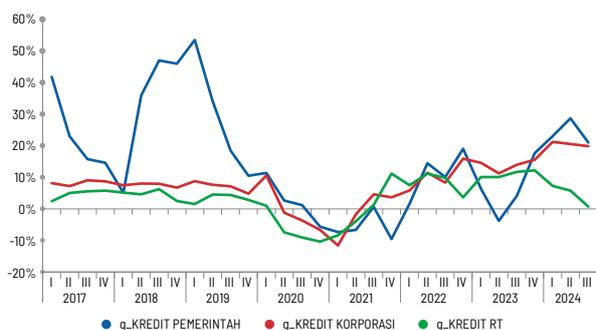
Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan III 2024, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 65,47% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 19,32% dan rumah tangga sebesar 15,21% (Grafik 5.10). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit kelompok Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,90% (yoy), diikuti oleh kredit korporasi 19,70% (yoy), dan Kredit Rumah Tangga yang juga masih tumbuh positif 0,68% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,71% (yoy) (Grafik 5.11).

Secara sektoral, pertumbuhan kredit positif terjadi pada hampir semua sektor utama kecuali sektor konstruksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perantara Jasa Keuangan diikuti Perdagangan, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Industri Pengolahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



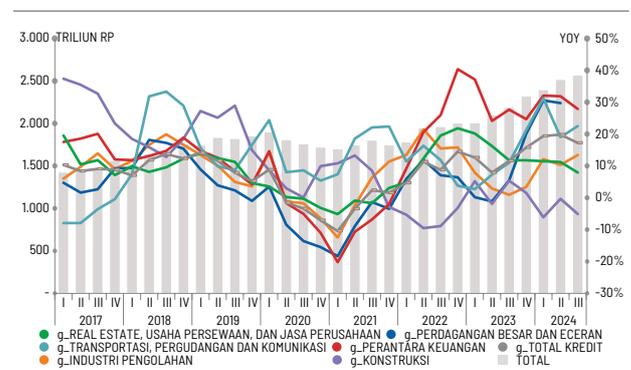
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan

dan Real estate. Kredit pada sektor Konstruksi masih tumbuh negatif sebesar -5,03%,0 (yoy), turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya -0,31% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 5.12).

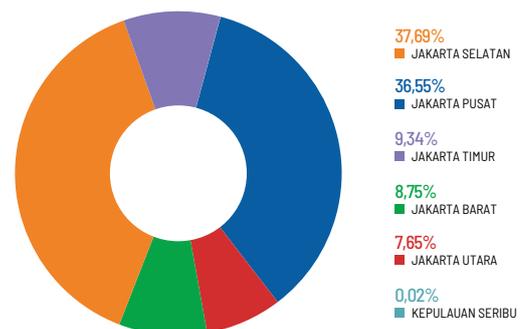
Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai sentra perekonomian dan niaga. Pada triwulan III 2024, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 37,69% dan 36,55% (Grafik 5.13).

Meningkatnya penyaluran kredit yang ditunjukkan oleh pertumbuhan positif kredit mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas intermediasi perbankan. Pada triwulan III 2024, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 57,10% dan 83,15% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 55,31% dan 81,78% (Grafik 5.14). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk Bodetabek. Hal ini salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.



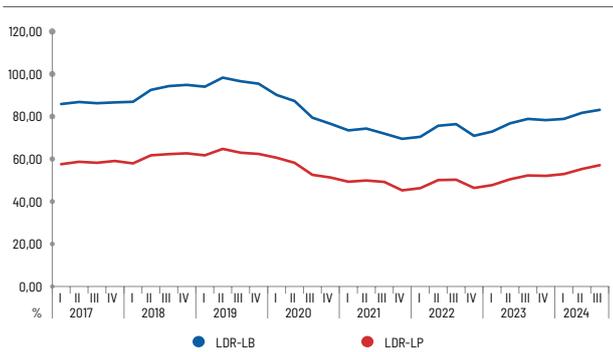
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta

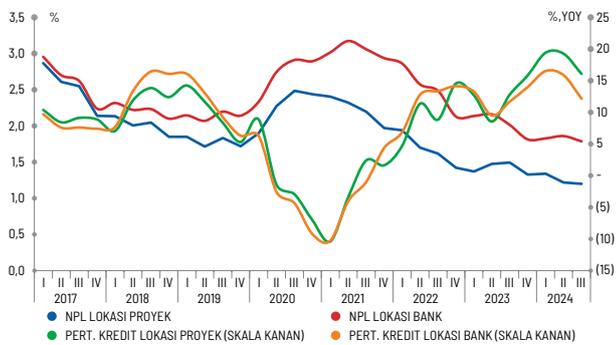


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

Risiko Kredit Bank Umum

Tingkat ketahanan perbankan tetap terjaga di tengah meningkatnya penyaluran kredit. Hal ini ditunjukkan oleh cenderung menurunnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan at Risk* (LaR). Pada triwulan III 2024, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,20%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,22%. Sejalan dengan itu, rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga menurun menjadi sebesar 1,78%, (Grafik 5.15). Risiko kredit yang terkendali juga terlihat dari rasio kredit berisiko atau *Loan at Risk* (LaR) terus menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan *outstanding* kredit restrukturisasi (Grafik 5.16).



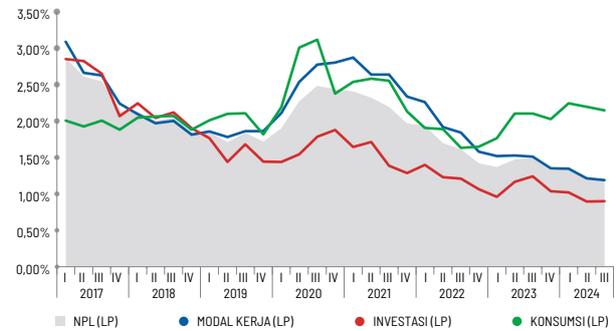
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta

Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan NPL didorong oleh penurunan NPL Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja (Grafik 5.17). Jika dibandingkan dengan nasional, NPL di DKI Jakarta, baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 5.18).

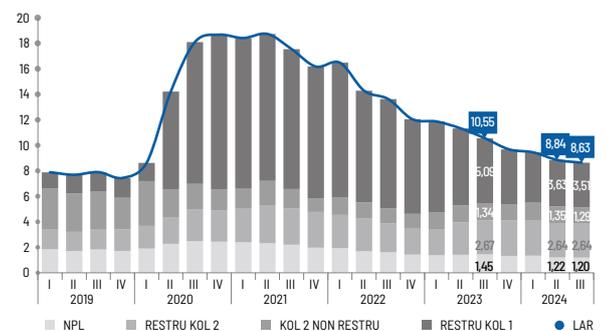
Rasio NPL yang cenderung menurun dan terjaga di bawah *threshold* 5% didukung oleh kesiapan perbankan secara internal dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit terutama dari *downgrade* debitur UMKM karena sudah tidak diperpanjangnya lagi program restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Maret 2024. Perbankan terutama bank-bank besar telah menyiapkan pencadangan untuk dapat menghapus buku kredit-kredit macet. Bersamaan dengan itu perbankan juga melakukan penguatan manajemen risiko dengan diversifikasi aset dan mengembangkan berbagai *credit risk tools* seperti penguatan aspek *credit risk scoring* dan *early warning signal* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi mengalami pemburukan kualitas kredit¹.

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, potensi pelemahan permintaan ekspor, serta konsolidasi fiskal yang diprakirakan dapat menahan



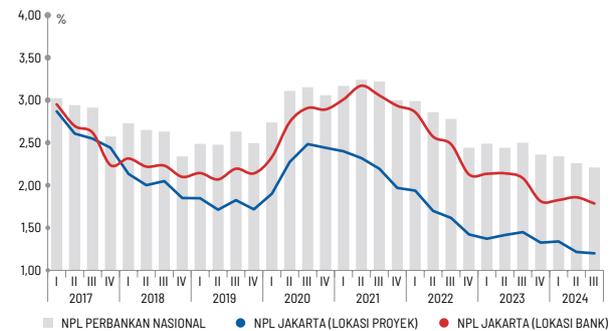
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

1 <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-tren-hapus-buku-yang-telah-dilakukan-bank-bum-per-september-2024>

laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun disisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi tersebut lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

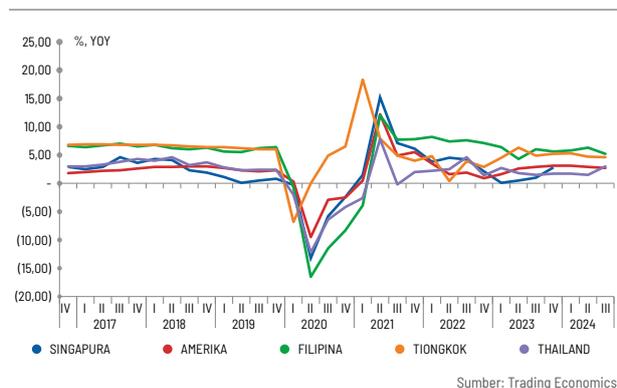
B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

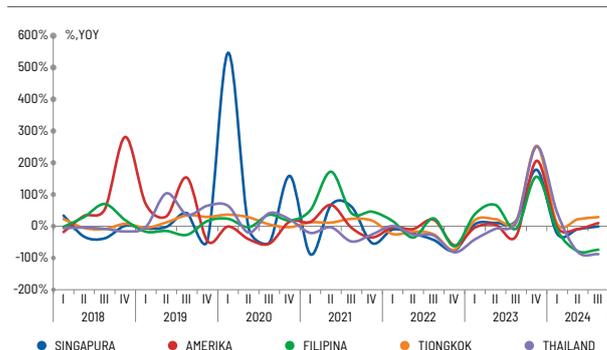
Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang masih berlanjut turut memengaruhi kinerja korporasi terutama yang berorientasi ekspor. Gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global berdampak eskalasi geopolitik berpengaruh kepada kinerja korporasi, terutama yang mengalami ketergantungan bahan baku dari impor. Perlambatan pertumbuhan ekonomi beberapa negara tujuan mengganggu kinerja ekspor seiring melambatnya permintaan. Keketatan likuiditas di pasar global seiring kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka panjang juga memengaruhi kinerja korporasi terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu, disisi internal, kinerja korporasi dipengaruhi perkembangan iklim investasi di tahun politik, perkembangan inflasi, serta berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang terus berlanjut

Pada triwulan III 2024, hampir semua negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan kecenderungan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.19). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat 3,2% (yoy). Kondisi ini berdampak kepada perbaikan terbatas kinerja ekspor (Grafik 5.20).



Grafik 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama

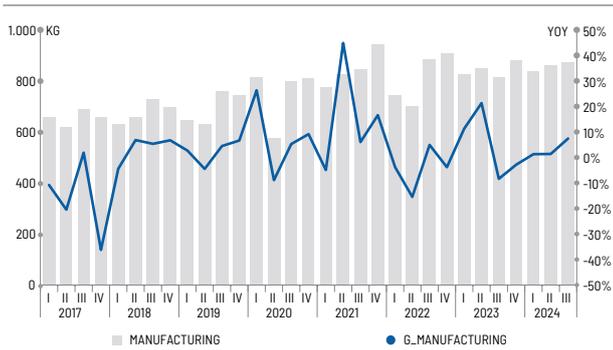


Grafik 5.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

Ke depan, risiko perekonomian global semakin tinggi disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Perkembangan politik di AS diperkirakan akan diikuti dengan arah kebijakan fiskal lebih ekspansif dan strategi ekonomi berorientasi domestik (America 1st). Perkembangan ini akan berdampak pada penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) yang akan lebih terbatas. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar mendorong kembali meningkatnya yield US Treasury, menguatnya mata uang dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Kondisi ini kan berdampak terhadap perekonomian global. Dari sisi *financial channel*, akan melemahkan nilai tukar berbagai negara. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor yang akan berdampak pula pada penurunan kinerja sektor perdagangan di Indonesia maupun DKI Jakarta. Dari sisi *commodity channel*, kenaikan harga komoditas dapat menambah tekanan inflasi di dalam negeri yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi kinerja usaha korporasi. Dari sisi *trade channel*, terdapat potensi ekspor ke AS menggantikan produk Tiongkok, namun disaat bersamaan terdapat potensi membanjirnya produk Tiongkok ke negara non-AS, termasuk Indonesia, yang dapat mempengaruhi kinerja net ekspor.

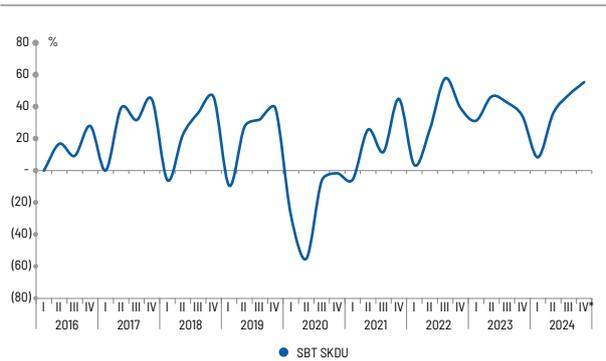
2. Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta tumbuh positif namun belum cukup kuat

Ekspor produk manufaktur Jakarta pada triwulan III 2024 menunjukkan perbaikan meskipun masih terbatas. Ekspor produk otomotif sebagai ekspor utama produk manufaktur Jakarta yang sempat tertekan pada akhir 2023 karena permasalahan pemenuhan standar uji keselamatan, secara bertahap sudah menunjukkan pemulihan (Grafik 5.21). Ke depan, tekanan fragmentasi perdagangan dan tensi geopolitik global yang berpotensi meningkat dapat memengaruhi pola dan volume perdagangan global. Untuk itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi di lapangan usaha manufaktur.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta



Sumber: BPS

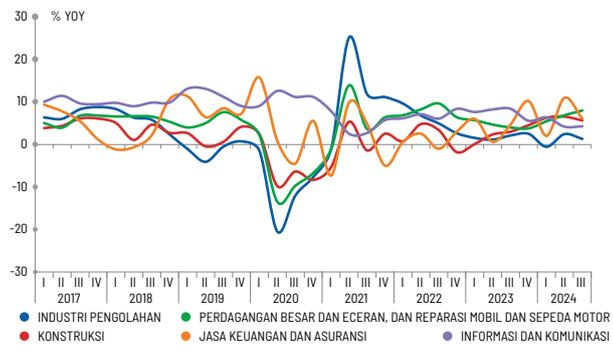
Grafik 5.23 Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta

3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif dan perlu terus didukung

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 melanjutkan pertumbuhan yang positif. Realisasi investasi PMA dan PMDN Jakarta tumbuh tinggi. Pada Tw III 2024 tumbuh 40,26% (yoy), dengan kumulatif investasi Jan-Sep 24 mencapai Rp 191,8 T. Kinerja investasi yang positif didukung oleh berlangsungnya percepatan pembangunan, tidak hanya proyek pemerintah namun juga proyek swasta. Pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang terkendali serta stabilitas keuangan yang terjaga dengan baik mendorong peningkatan kepercayaan investor asing untuk menjadikan Jakarta dan Indonesia sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Periode pemilu 2024 yang berjalan aman dan lancar juga memberikan sentimen yang positif. Ke depan, kepastian hukum, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta simplifikasi dan kejelasan proses perizinan perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta masih melanjutkan tren perbaikan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan positif ekonomi triwulan III 2024 didukung oleh pertumbuhan positif kredit pada semua sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa Keuangan (Grafik 5.22). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengonfirmasi



Sumber: BPS

Grafik 5.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

perkembangan positif kegiatan ekonomi pelaku usaha di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 yang ditunjukkan melalui nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang meningkat pada zona optimis (Grafik 5.23).

Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan II 2024), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan ini ditunjukkan oleh meningkatnya penjualan dan profitabilitas korporasi terutama pada sektor-sektor utama Jakarta seperti Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Industri (Tabel 5.2).

Kinerja penjualan korporasi meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penjualan tersebut terutama ditopang oleh permintaan dari sisi domestik seiring meningkatnya permintaan pada periode pemilu dan pilkada serentak, momentum perayaan HBKN dan liburan sekolah serta dampak berbagai aktivitas MICE yang ada di Jakarta. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja penjualan korporasi tumbuh sebesar 6,49% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,96% (yoy) (Grafik 5.24).

Kinerja penjualan yang meningkat memberikan dampak positif pada profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari rasio *return on asset* (ROA) korporasi yang berada pada level cukup tinggi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 5,22%. Pemilik modal dan investor juga menerima tingkat imbal hasil yang memadai sebagaimana tercermin dari nilai *return on equity* (ROE) sebesar 11,12%, lebih tinggi dibandingkan rasio ROE triwulan sebelumnya sebesar 9,16% (Grafik 5.25).

Kinerja likuiditas korporasi juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang cukup tinggi 1,29 pada triwulan II 2024, relative stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,30. Nilai rasio di atas 1 menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta memiliki kondisi likuiditas yang cukup kuat dan sehat (Grafik 5.26).

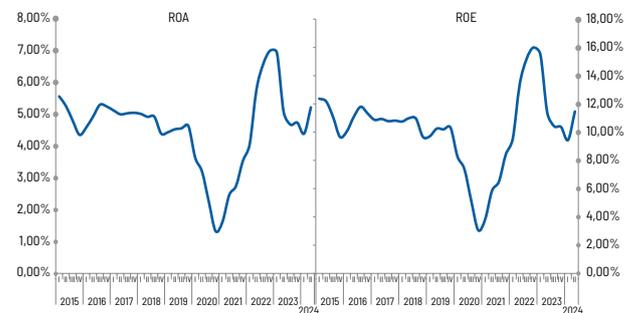
Tabel 5.2 Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan

NO	SEKTOR	SALES GROWTH		ROA		ROE		CURRENT RATIO	
		TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24
1	Pertanian	1,54%	17,72%	1,73%	2,14%	3,23%	4,08%	1,79	2,35
2	Pertambangan	-20,05%	10,63%	11,44%	11,70%	17,27%	17,84%	2	1,85
3	Industri	-0,17%	1,83%	6,04%	5,95%	11,33%	11,52%	1,5	1,46
4	Listrik, Gas, dan Air	7,38%	16,90%	4,64%	5,12%	9,03%	9,87%	1,38	1,73
5	Konstruksi	0,70%	9,51%	-0,52%	2,46%	-1,35%	6,19%	1,36	1,42
6	Perdagangan	3,44%	2,61%	7,82%	7,86%	16,43%	16,74%	1,32	1,36
7	Pengangkutan	7,09%	7,83%	5,06%	4,91%	15,38%	15,96%	0,58	0,54
8	Jasa dunia Usaha	49,47%	187,28%	-5,17%	3,63%	-7,42%	5,25%	1,25	1,28
9	Jasa Sosial	1,43%	6,47%	1,42%	1,77%	1,99%	2,51%	1,94	1,87
Agregat		0,96%	6,49%	4,39%	5,22%	9,16%	11,12%	1,30	1,29
NO	SEKTOR	DER		ICR		ROE		CURRENT RATIO	
		TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24	TW I'24	TW II'24
1	Pertanian	0,66	0,74	0,79	1,43	1,39	1,45	7,7	7,94
2	Pertambangan	0,27	0,26	1,37	5,32	0,69	0,7	19,36	19,95
3	Industri	0,47	0,49	3,72	3,47	0,86	0,86	5,83	5,94
4	Listrik, Gas, dan Air	0,43	0,37	5,74	5,06	0,53	0,58	57,38	40,98
5	Konstruksi	0,98	0,91	0,54	1,32	0,23	0,24	1,55	1,57
6	Perdagangan	0,44	0,46	1,98	3,19	1,35	1,4	6,86	7,48
7	Pengangkutan	1,25	1,37	1,97	2,77	0,43	0,44	75,55	83,83
8	Jasa dunia Usaha	0,18	0,17	2,41	3,93	0,45	0,56	7,5	7,6
9	Jasa Sosial	0,25	0,26	1,86	1,7	0,33	0,33	4,72	4,73
Agregat		0,61	0,62	1,86	2,29	0,65	0,66	5,99	6,18

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

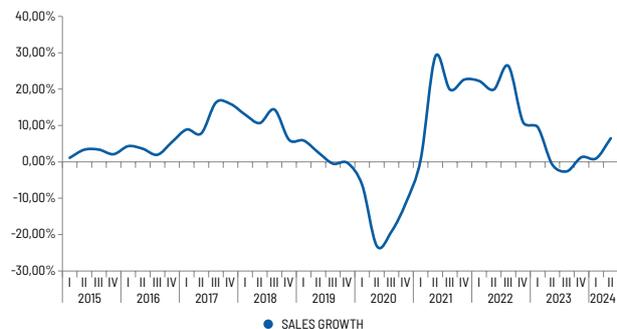
Sejalan dengan peningkatan penjualan, rasio *inventory turnover* korporasi masih terjaga baik menjadi 6,18, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,99. Korporasi juga memiliki cukup efisien dan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) relative stabil dengan kecenderungan meningkat pada level 0,66 (Grafik 5.27).

Penawaran kredit yang cukup kuat dari perbankan dengan disertai beragam kebijakan *pro growth* Bank Indonesia, meningkatkan minat sektor korporasi menarik kredit sebagaimana tercermin dari rasio *leverage* sebesar 0,62 pada triwulan II 2024. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi, sektor korporasi terindikasi mempunyai tingkat kelayakan kredit yang cukup baik (*creditworthiness*). Hal ini tercermin dari rasio



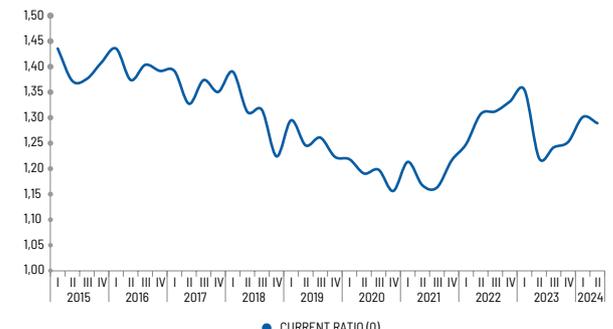
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.25 Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta



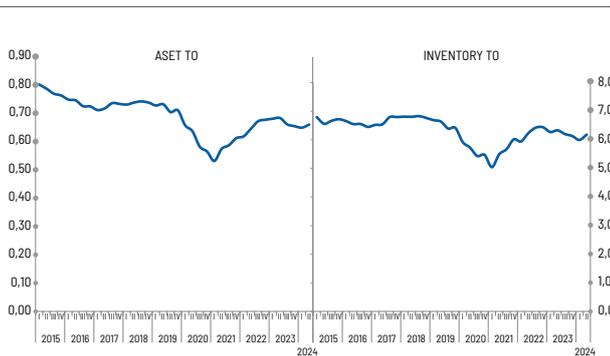
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.24 Penjualan Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.26 Likuiditas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.27 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta

median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat yang sebesar 2,29 kali pada triwulan II 2024 (Grafik 5.28). Nilai rasio ICR di atas 1 dan cenderung meningkat menunjukkan bahwa korporasi memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat.



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.28 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

Kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat masih tumbuh tinggi sebesar 19,70% (yoy) meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 20,06% (yoy) dan 19,25% (yoy) (Grafik 5.29). Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali sektor konstruksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perantara keuangan, Transportasi Pergudangan dan Komunikasi, perdagangan, industri pengolahan dan real estate sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 5.3 dan Grafik 5.30). Adapun penurunan kredit konstruksi disinyalir dipengaruhi meningkatnya dari sumber dana lain seiring peningkatan PMA pada triwulan III 2024



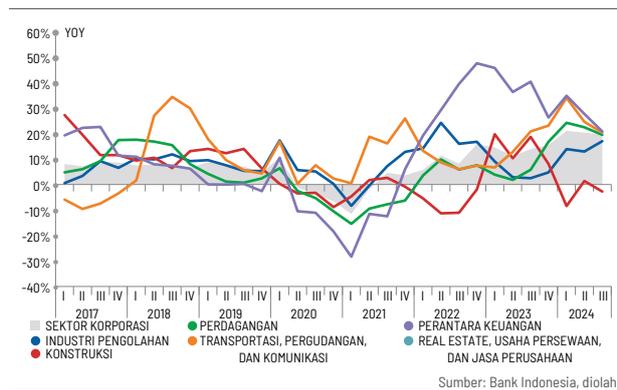
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29 Pertumbuhan kredit Korporasi

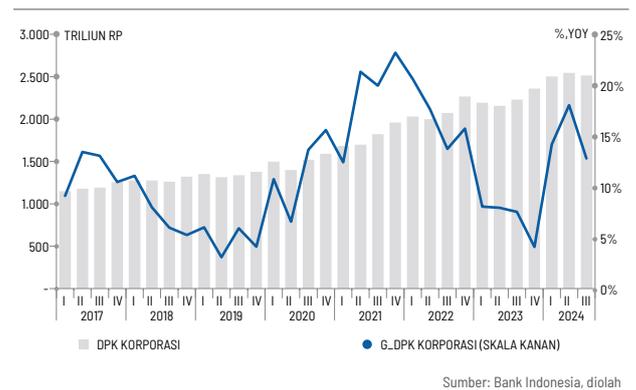
Tabel 5.3 Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	Dec-23			Jun-24			Sep-24		
		BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	226,69	15,60%	16,82%	250,10	15,70%	22,43%	247,41	15,06%	19,51%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	295,97	20,37%	4,75%	316,60	19,87%	12,98%	331,84	20,20%	16,98%
3	PERANTARA KEUANGAN	263,07	18,11%	26,27%	299,38	18,79%	27,73%	302,55	18,41%	20,83%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	195,84	13,48%	10,97%	204,40	12,83%	11,51%	205,90	12,53%	9,62%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	180,26	12,41%	23,12%	199,75	12,54%	24,63%	201,32	12,25%	20,36%
6	KONSTRUKSI	84,46	5,81%	8,05%	83,02	5,21%	1,36%	87,57	5,33%	-2,73%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	54,05	3,72%	0,25%	57,88	3,63%	13,62%	59,45	3,62%	27,48%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	52,68	3,63%	50,27%	85,22	5,35%	123,41%	102,18	6,22%	140,52%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	28,47	1,96%	9,90%	26,77	1,68%	9,14%	26,82	1,63%	-5,11%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	32,89	2,26%	18,42%	33,40	2,10%	13,75%	33,28	2,03%	-0,94%
11	LAIN-LAIN	38,53	2,65%	30,39%	36,93	2,32%	1,79%	44,64	2,72%	26,40%
Total		1452,91	100,00%	15,48%	1593,44	100,00%	20,38%	1642,96	100,00%	19,70%

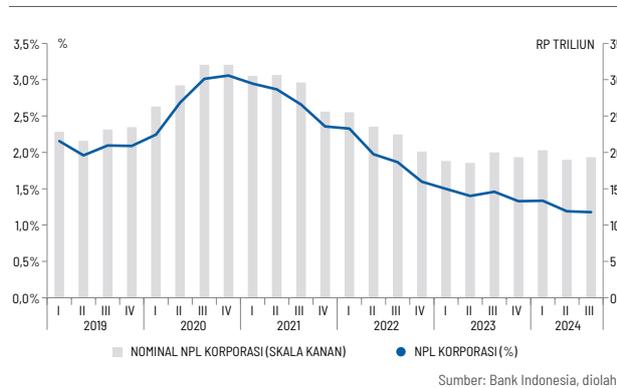
Sumber: Bank Indonesia



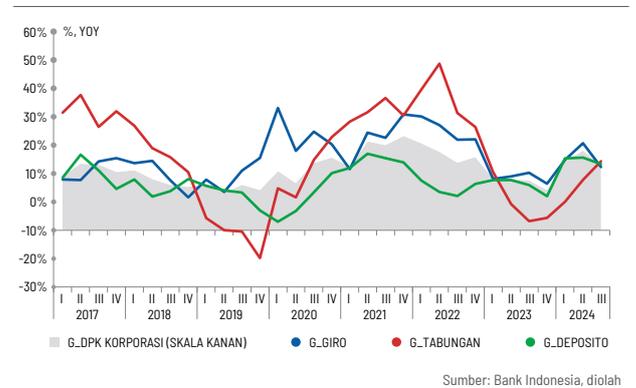
Grafik 5.30 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi



Grafik 5.32 Perkembangan DPK Korporasi



Grafik 5.31 NPL pada Sektor Korporasi



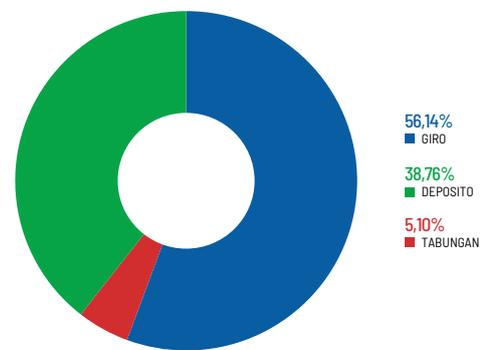
Grafik 5.33 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah yaitu sebesar 1,18%, lebih rendah dibandingkan dengan rasio NPL bulan sebelumnya (Grafik 5.31). Kondisi ini dipengaruhi oleh membaiknya kemampuan membayar korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang meningkat dan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.

Dana Pihak Ketiga

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi melambat sejalan dengan melambatnya kredit korporasi. Pada triwulan III 2024, DPK Korporasi tumbuh sebesar 12,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,02% (yoy) (Grafik 5.32). Perlambatan tersebut didorong oleh perlambatan Giro dan Deposito Korporasi, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 12,32% (yoy) dan 13,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 20,67% dan 15,60% (yoy) (Grafik 5.33). Perlambatan Giro dan Deposito berdampak kepada melambatnya DPK korporasi dikarenakan berdasarkan komposisinya, dana korporasi di perbankan mayoritas dalam bentuk Giro (56,14%) dan Deposito (38,76%) (Grafik 5.34).

Perlambatan DPK korporasi di tengah kinerja usaha korporasi yang meningkat mengindikasikan bahwa sebagian pendanaan korporasi masih menggunakan dana internal perusahaan. Disisi lain,



Grafik 5.34 Komposisi DPK Korporasi

pertumbuhan kredit korporasi yang masih cukup kuat mencerminkan bahwa kebutuhan pembiayaan korporasi berpotensi cukup besar dan berpeluang meningkatkan kebutuhan kredit ke depan.

Eksposur Pasar Modal pada Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Aktivitas perekonomian yang sudah kembali normal paska pandemi mendorong semakin meningkatnya pembiayaan korporasi dari perbankan dan sumber-sumber eksternal lainnya seperti pasar modal. Sumber dana eksternal dari pasar modal dapat berupa penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *Right Issue*.



Grafik 5.35 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

Pada triwulan III 2024, kinerja perekonomian domestik yang terjaga solid di tengah dinamika perekonomian global mampu mendorong tetap baiknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sejalan dengan pergerakan pasar keuangan global yang didorong oleh sentimen positif akibat penurunan BI rate sebesar 25 bps pada September 2024, pasar saham domestik di bulan September 2024 menguat bahkan sempat mencatatkan rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Berdasarkan siaran pers OJK No. SP 145/GKPB/OJK/XI/2024 tanggal 1 Oktober 2024, pasar saham domestik di sepanjang tahun 2024 sampai dengan 27 September 2024 menguat 5,83% (ytd) ke level 7.696,92 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp12.875 triliun atau naik 10,37% (ytd), serta membukukan *net buy* sebesar Rp52,75 triliun (ytd) (Grafik 5.35).

Ke depan, meskipun penurunan Fed Fund Rate diperkirakan akan lebih terbatas karena potensi tertahannya laju penurunan inflasi AS, kinerja pasar saham dan obligasi Indonesia berpotensi tetap menarik sebagai alternatif sumber pendanaan. Potensi kenaikan pasar saham tersebut ditopang beberapa faktor. Pertama, sentimen positif terhadap fundamental makroekonomi yang solid, inflasi yang terkendali dan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, berlanjutnya reformasi sektor keuangan Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan investor serta konsumen, mendorong efisiensi di sektor keuangan, serta semakin bervariasi instrumen keuangan. Selain itu, upaya menjaga kondisi politik dalam negeri yang tetap kondusif seiring peralihan pemerintahan juga menjadi faktor penting untuk mendorong kepercayaan investor.

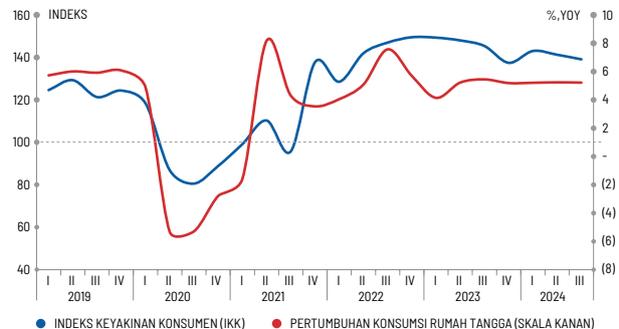
C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

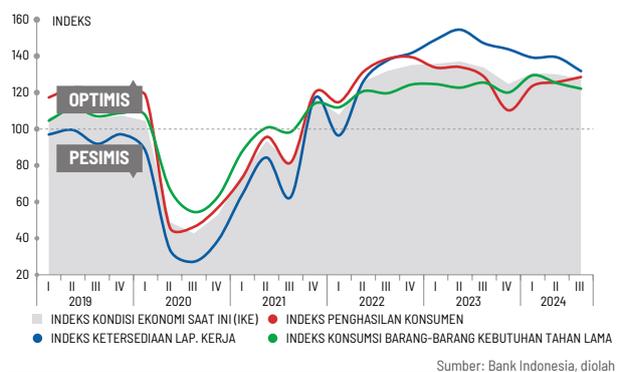
Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan III 2024 secara umum juga masih kuat. Hal ini tercermin dari tetap tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga meskipun

sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja rumah tangga yang berdaya tahan juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan III 2024 terjaga tinggi pada level optimis sebesar 139,4 meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.36). Optimisme tersebut diperkuat dengan kenaikan Indeks Penghasilan Konsumen dari 125,6 menjadi 128,3. Sementara itu, Indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama dan indeks ketersediaan lapangan kerja masing-masing mengalami penurunan namun masih tetap terjaga di zona optimis (Grafik 5.37).

Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam lagi berdasarkan tingkat pendapatannya, terjadi potensi peningkatan risiko pada rumah tangga kelas menengah seiring kenaikan tingkat upahnya yang terbatas sehingga menyebabkan penurunan nilai pada tingkat upah riil-nya. Data BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia dengan nilai konsumsi pengeluaran mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kelas menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Penurunan kinerja kelas menengah berpotensi memengaruhi kinerja konsumsi serta kemampuan membayar sektor Rumah Tangga². Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga yang cukup tinggi meskipun masih jauh di bawah threshold 5%.



Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah
Grafik 5.36 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT



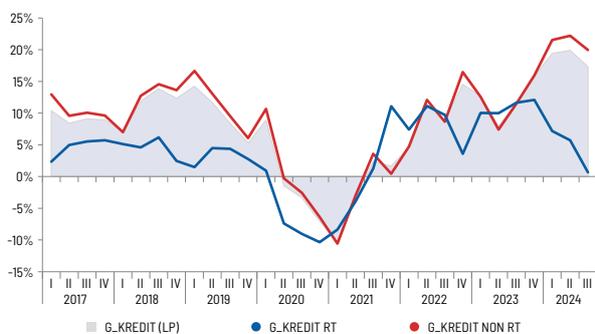
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 5.37 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

2 [Kelas Menengah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional - Berita - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

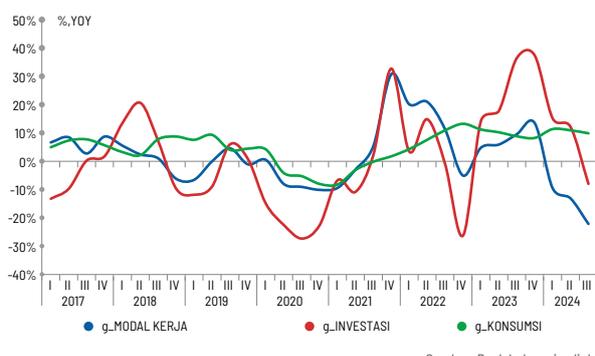
Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi dapat semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, berlanjutnya tren suku bunga tinggi sehingga meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

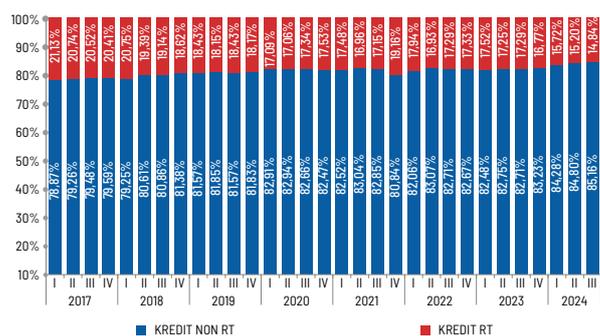
Kredit sektor rumah tangga masih mencatatkan pertumbuhan yang positif namun melambat cukup dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, kredit rumah tangga hanya tumbuh sebesar 0,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,71% (yoy) (Grafik 5.38). Berdasarkan jenisnya, perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga dipengaruhi oleh menurunnya penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi rumah tangga. Selain itu, kredit konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa dominan dalam kredit rumah tangga juga tumbuh melambat (Grafik 5.39). Dengan perkembangan tersebut pangsa kredit Rumah Tangga terhadap total kredit, pada triwulan III 2024 sedikit menurun menjadi 14,84% (Grafik 5.40).



Grafik 5.38 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Grafik 5.39 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



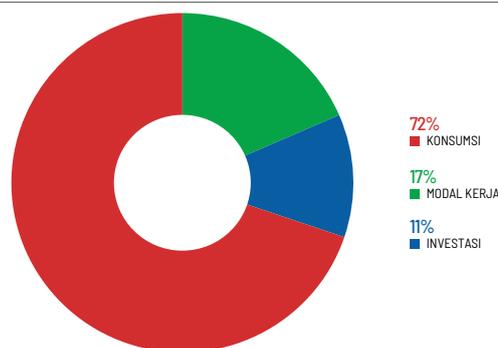
Grafik 5.40 Komposisi Kredit RT dan Non RT

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh tingkat kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit seiring tingkat risiko kreditnya yang cukup tinggi terutama pada kredit modal kerja rumah tangga. Dari sisi permintaan, perlambatan kredit diperkirakan terdampak oleh upah riil yang rendah terutama pada rumah tangga golongan menengah sehingga daya belinya menurun dan cenderung menahan penarikan kredit baru ditengah beban cicilan yang sudah ada. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhannya cenderung dipenuhi melalui penarikan simpanan yang tercermin dari turunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga rumah tangga pada triwulan III 2024.

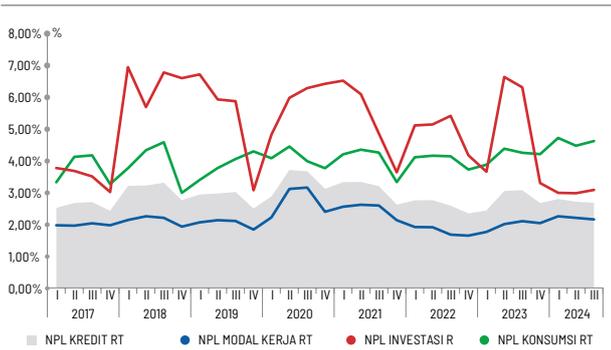
Kredit rumah tangga yang masih tetap tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan positif kredit konsumsi rumah tangga meskipun melambat. Hal ini dikarenakan sebagian besar kredit rumah tangga digunakan untuk keperluan konsumsi (72%) (Grafik 5.41).

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) Rumah Tangga masih berada pada level yang cukup tinggi 2,67%, namun sudah sedikit turun dibandingkan triwulan sebelumnya 2,71%. Penurunan NPL RT didorong penurunan NPL kredit konsumsi rumah tangga dari 2,20% pada triwulan II 2024 menjadi 2,15% pada triwulan III 2024 (Grafik 5.42).

Berdasarkan tujuan penyalurannya, pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga yang masih tetap positif pada triwulan III 2024 terutama



Grafik 5.41 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



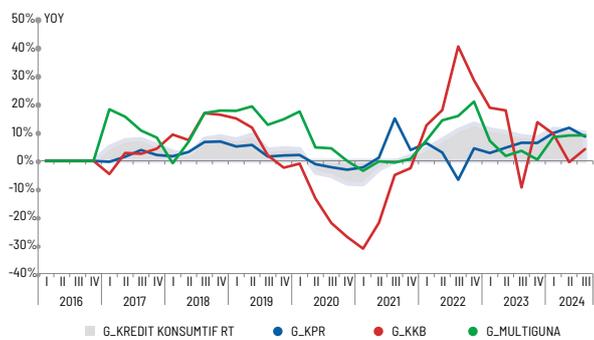
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.42 NPL Kredit Rumah Tangga

ditopang oleh kenaikan penyaluran Kredit Multiguna dan mulai pulihnya Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) seiring kebijakan Bank Indonesia untuk memperpanjang insentif uang muka kredit (DP) 0% untuk kendaraan bermotor baru hingga Desember 2025. Sementara itu, Kredit Pemilikan Rumah sedikit melambat dengan pertumbuhan 8,62% (yoy) (Grafik 5.43). Meskipun melambat, namun pangsa kredit KPR masih dominan terhadap total kredit rumah diikuti oleh kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (Grafik 5.44).

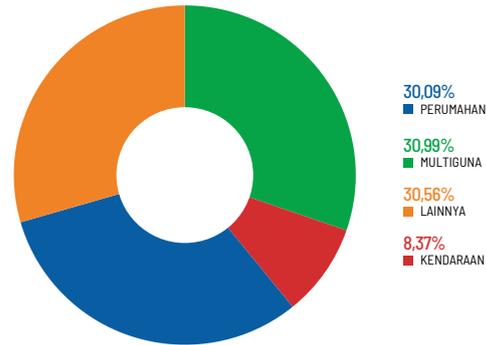
Perlambatan kredit KPR terjadi sejalan dengan perlambatan kenaikan harga rumah. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) menunjukkan bahwa pertumbuhan harga rumah sekunder di Jakarta pada triwulan III 2024 sebesar 1,05% (yoy), masih pada level rendah meskipun sudah mulai menunjukkan peningkatan setelah mengalami tren penurunan pertumbuhan sejak 2023. Pertumbuhan harga terendah terjadi pada segmen rumah tipe kecil dan menengah yang biasanya menjadi pilihan bagi konsumen menengah ke bawah. Melambatnya pertumbuhan harga properti tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat terutama dari kelas menengah.

Dari sisi risiko kredit, penurunan NPL kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 dipengaruhi oleh penurunan NPL pada semua jenis kredit konsumsi Rumah Tangga. Penurunan NPL terbesar terjadi pada kredit KPR, diikuti kredit Multiguna dan KKB (Grafik 5.45).



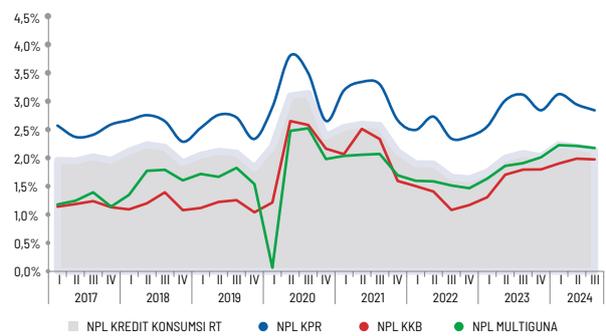
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.43 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.44 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga

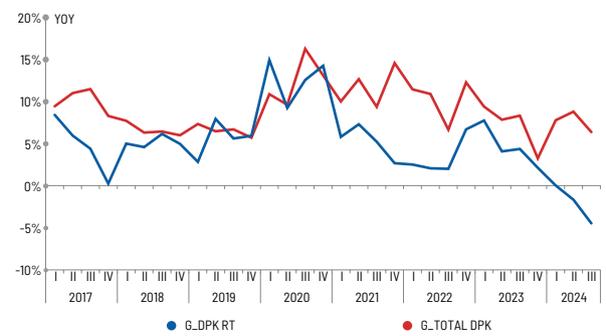


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.45 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

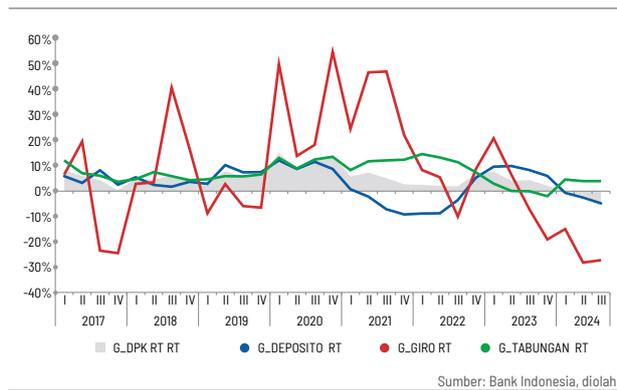
Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 mengalami penurunan. DPK rumah tangga tumbuh negatif sebesar -4,48% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar -1,67% (yoy) (Grafik 5.46). Berdasarkan jenisnya, penurunan DPK rumah tangga disebabkan oleh penurunan Giro dan Deposito. Giro rumah tangga pada triwulan III 2024 turun cukup dalam dengan pertumbuhan -27,24% (yoy), diikuti oleh Deposito yang turun sebesar -4,86% (yoy). Sementara itu, Tabungan rumah tangga tumbuh relatif stabil pada level 3,98% (yoy) (Grafik 5.47).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

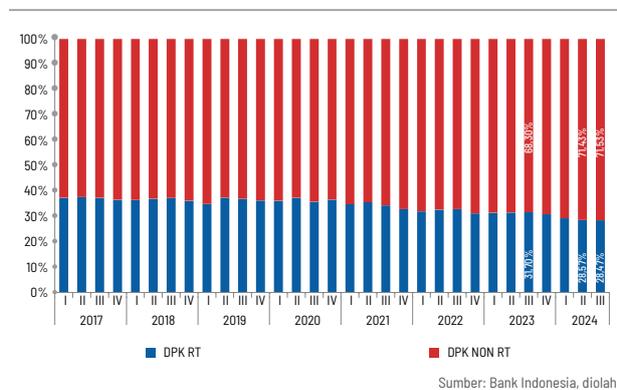
Grafik 5.46 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga



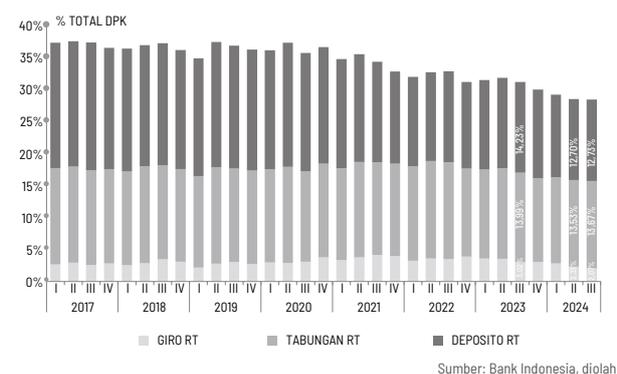
Grafik 5.47 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan

Penurunan DPK rumah tangga disinyalir bersumber dari rumah tangga golongan menengah dan bawah seiring tingkat upah riil nya yang terbatas dan pola konsumsi yang cenderung meningkat. Sementara itu, dari golongan rumah tangga menengah atas, perlambatan DPK rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan rumah tangga mengalihkan sebagian dana simpanannya kepada instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan.

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga terhadap total DPK di DKI Jakarta terus menurun (Grafik 5.48). Sementara itu, pangsa DPK Rumah Tangga terhadap total DPK didominasi oleh Tabungan 13,67%, diikuti oleh Deposito dan Giro masing-masing sebesar 12,73% dan 2,07% (Grafik 5.49).



Grafik 5.48 Komposisi DPK



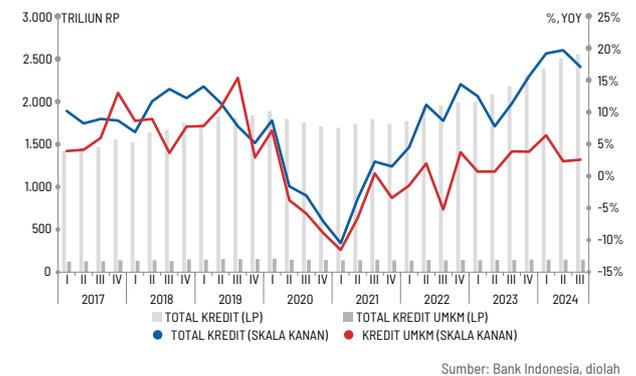
Grafik 5.49 Komposisi DPK Rumah Tangga

D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

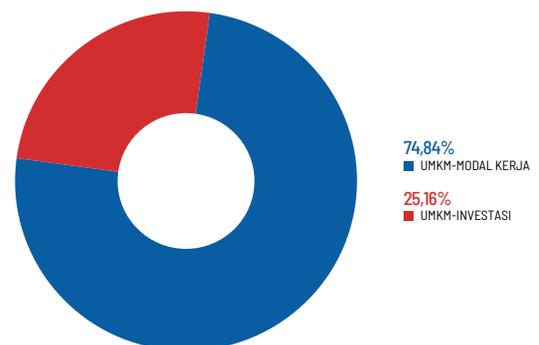
Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan peningkatan. Pada triwulan III 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 2,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,43% (yoy) (Grafik 5.50). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 74,84% dan diikuti kredit investasi sebesar 25,16% (Grafik 5.51).

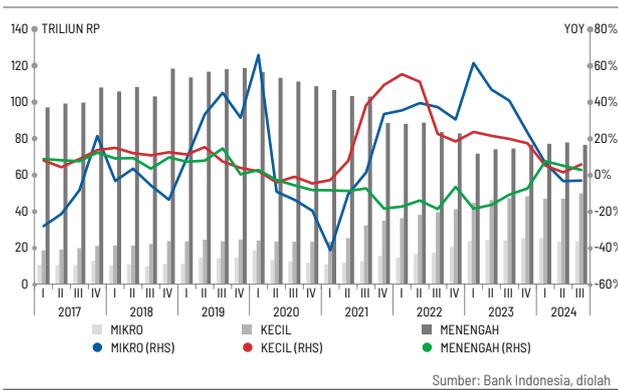
Berdasarkan skala usahanya, kenaikan pertumbuhan kredit UMKM ditopang oleh pertumbuhan kredit skala kecil. Kenaikan pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh penurunan kredit UMKM skala mikro yang pada triwulan III 2024 masih tumbuh negatif sebesar -3,15% (yoy) (Grafik 5.52). Meskipun tumbuh membaik, secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 6% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi sektor usaha di Jakarta lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah disekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.



Grafik 5.50 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta

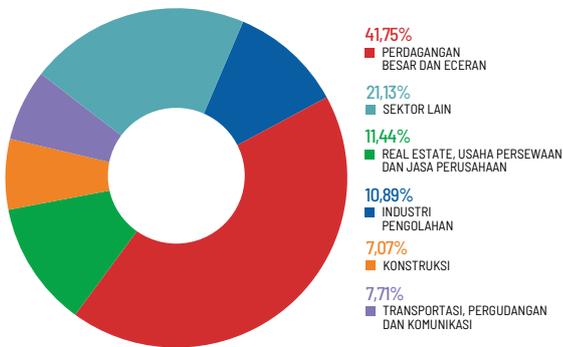


Grafik 5.51 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 5.52 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

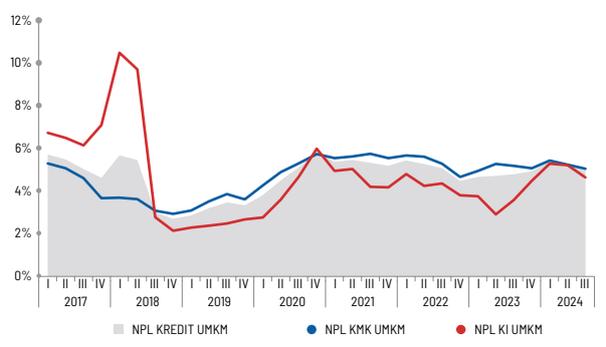
Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 41,75%, diikuti sektor lain (21,13%), sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan (11,44%), industri pengolahan (10,89%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (7,71%) dan sektor konstruksi (7,07%) (Grafik 5.53). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terutama terjadi pada sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi serta Real estate, usaha persewaan dan Jasa Perusahaan (Grafik 5.54).



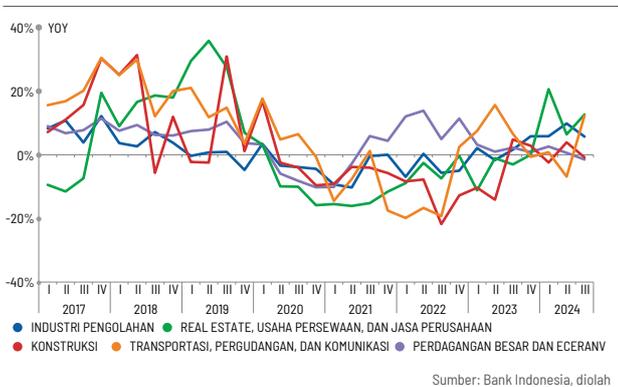
Grafik 5.53 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Peningkatan pertumbuhan ini mengindikasikan perbankan sudah semakin meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dengan tetap menjaga kehati-hatian seiring dengan risiko kredit yang menunjukkan penurunan dibawah sedikit threshold 5%. Penurunan risiko kredit UMKM terjadi pada jenis kredit Modal Kerja maupun Investasi. pada kredit Investasi UMKM jenis Modal Kerja maupun Investasi (Grafik 5.55). Berdasarkan kelompok debiturnya, penurunan risiko kredit UMKM disumbang oleh Kredit UMKM golongan Kecil dan Mikro (Grafik 5.56).

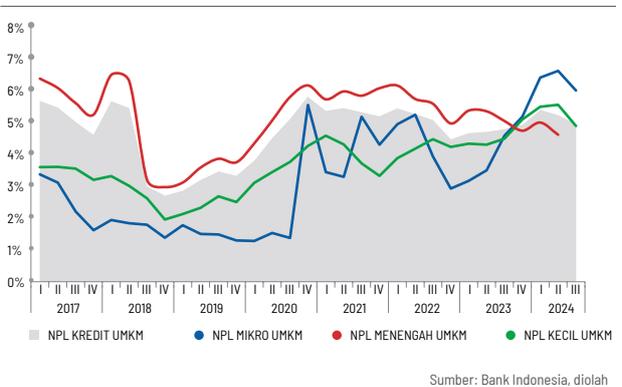
Ke depan, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2024 perihal Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpotensi dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM. Dari sisi UMKM, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mendapat pembiayaan karena UMKM yang mendapatkan penghapusan piutang macet akan mendapat pemutihan pada SLIK OJK. Dari sisi perbankan, kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperkirakan tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan mengingat kredit yg dihapus tagih merupakan kredit yang sudah dihapus buku sehingga bank sudah membukukan beban kerugian (CKPN 100%) dan mengeluarkan pencatatan kredit macet tersebut dari neraca bank.



Grafik 5.55 NPL Kredit UMKM



Grafik 5.54 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama



Grafik 5.56 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan 3 pilar kebijakan, yaitu Korporatisasi, Pengembangan kapasitas, dan Akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2024 (Juli - September 2024) terdiri dari beberapa kegiatan antara lain penyelenggaraan program replikasi UMKM Hijau, pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren, Festival Ekonomi Syariah Jawa, dan promosi perdagangan.

1. Replikasi UMKM Hijau

Untuk mendukung penerapan konsep bisnis hijau, KPwBI Provinsi DKI Jakarta memperkuat peran UMKM Hijau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ramah lingkungan melalui rangkaian pelatihan. Rangkaian pelatihan tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang terdiri dari kegiatan *company visit*, pemberian materi terkait UMKM hijau, pendampingan dan monitoring. Dalam pelaksanaan implementasi indikator UMKM hijau ke dalam proses bisnis, UMKM didampingi oleh pendamping profesional sesuai dengan karakteristik masing-masing UMKM. Terdapat 4 indikator yang perlu dipenuhi antara lain yaitu aspek produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2024, replikasi program UMKM hijau KPwBI Provinsi DKI Jakarta diikuti oleh 2 peserta UMKM dari kategori *craft* yaitu Dcraft Indonesia dan Ichinogami Papercraft Expert. Melalui pelatihan ini, kedua UMKM tersebut berhasil menerapkan indikator UMKM hijau melalui inovasi baru. Dcraft Indonesia berinovasi dengan memanfaatkan limbah produksi menjadi produk turunan baru, sementara Ichinogami Papercraft Expert menghapus lapisan laminasi pada kemasan dan menerapkan konsep *circular economy* dengan menawarkan konsumen penukaran kemasan lama untuk produk *papercraft* baru secara gratis.

2. Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren

Dalam rangka mendorong ekonomi syariah, khususnya kemandirian ekonomi pondok pesantren di wilayah DKI Jakarta, KPwBI Provinsi DKI Jakarta bersama Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rangkaian kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi DKI Jakarta dan 4 Dewan Pengurus Daerah (DPD) pada tanggal 12 - 13 Agustus 2024.

Hari pertama dimulai dengan pemetaan unit bisnis 55 anggota Hebitren 2024 dan dilanjutkan dengan musyawarah kerja internal HEBITREN Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan acara puncak Pelantikan dan Pengukuhan DPW Periode 2024 - 2026 dan DPD Periode 2024 - 2026 Hebitren Provinsi DKI Jakarta.

Hebitren DKI Jakarta diharapkan dapat menerapkan wawasan yang diperoleh dan memanfaatkan momentum pelantikan ini sebagai langkah awal untuk bekerja lebih giat, berinovasi lebih

cerdas, dan bersinergi lebih erat, sehingga menjadi lokomotif penggerak ekonomi umat berbasis pesantren.

3. Festival Ekonomi Syariah Jawa

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis syariah dan mendukung inklusi keuangan melalui produk dan layanan syariah, KPwBI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa. Salah satu kegiatan pada FESyar Jawa yaitu *showcasing* UMKM yang juga turut diikuti oleh UMKM binaan dan mitra KPwBI Provinsi DKI Jakarta yaitu 5 UMKM Fashion (meLOOKmeL, Tioria by Caramia, Hijasmita, Darabaro Indonesia, dan rineereo), serta 6 UMKM Food and Beverages yaitu Bumi Bites, Ing Pawon, Suwe Ora Jamu, Madu Bina Apriari, Mozass Healthy Laboratory, Hellyeah, serta 1 Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Al Ishlah. Selain itu, pada rangkaian FESyar Jawa terdapat rangkaian lomba tingkat Jawa. Pada kesempatan tersebut perwakilan dari wilayah KPwBI Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih prestasi Juara 2 dalam lomba Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) yaitu Sdr. Vicko Hadisatrya - Chef Hotel Fairmont.

4. Promosi Perdagangan Luar Negeri

Untuk meningkatkan perluasan akses pasar UMKM, promosi produk-produk UMKM di luar negeri terus dilakukan. Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau bersama KPwBI Provinsi DKI Jakarta memberikan beberapa fasilitasi promosi perdagangan kepada UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, diantaranya yaitu:

a) Java Coffee Culture

Java Coffee Culture 2024, yang diadakan pada 7 Juli 2024 di Surabaya, bertujuan memperluas jaringan promosi dan potensi pembeli bagi para pengusaha kopi. Terdapat 2 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Mozass Healthy Lab dan Kopi Hitman. Selanjutnya, Mozass Healthy Lab telah mengikuti *business matching* secara *one on one* dengan *potential buyer* dari Jepang.

b) Singapore International Jewelry Expo 2024

Singapore International Jewelry Expo 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 11-14 Juli 2024 di Marina Bay Convention Centre. Adapun UMKM binaan BI Jakarta yang telah berhasil lulus kurasi dan mengikuti *showcasing* adalah Miss Mysa.

c) Karya Kreatif Indonesia

Kegiatan *showcasing* pada Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 diikuti oleh 17 UMKM binaan dan mitra KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang telah lulus kurasi diantaranya 3 UMKM Fashion yakni, Buana Alit Gallery, Roemah Kebaya Vielga dan Kara Tungga; 7 kategori UMKM Craft yakni Indhe, Sepiring Indonesia, Embroidery Indonesia, Miss Mysa, Dcraft Indonesia, Prive Indonesia dan Tiyasa; serta 7 kategori UMKM Food and Beverages yaitu Ing Pawon, Machili, Hellyeah, Kultiva, Mozass

Healthy Laboratory, Acaraki dan Suwe Ora Jamu. Selain itu terdapat 52 UMKM binaan BI Jakarta yang onboarding pada laman website karyakreatifindonesia.co.id. Dari sisi *business matching*, terdapat 1 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta yaitu Sepiring Indonesia yang telah melakukan penandatanganan Letter of Interest dengan Stoneman Co, Ltd.

E. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dengan telah disahkannya UU No.21 tahun 2023 sebagai perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang IKN dan UU No.2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta seiring kepindahan ibu kota negara ke Nusantara, maka ke depan Jakarta bukan lagi menjadi kota pusat pemerintahan. Sehubungan dengan kepindahan Ibu Kota tersebut, maka pengeluaran belanja Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga di Jakarta akan berkurang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan potensi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dalam rangka memperkuat peran Jakarta untuk tetap berkontribusi sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis nasional serta menjadi kota global yang berdaya saing.

Sejalan perubahan status dan visi Jakarta ke depan sebagai kota global yang berdaya saing maka pembangunan Jakarta akan

diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Eratnya keterkaitan ekonomi dan keuangan wilayah sekitar terhadap Jakarta, maka pembangunan Jakarta ke depan juga akan bersinergi dengan wilayah sekitar sebagai satu Kawasan aglomerasi. Pembangunan utamanya akan berfokus kepada perbaikan infrastruktur strategis daerah untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada mencakup perbaikan infrastruktur strategis di bidang transportasi, pengendalian banjir, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pembiayaan proyek-proyek Pembangunan tersebut diindikasikan bersumber dari APBN, APBD, ataupun pinjaman daerah. Adapun pembangunan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dinas-dinas terkait. Pemrov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD maupun mendorong proyek untuk mendapatkan dukungan pusat, baik melalui APBN, pinjaman daerah, atau pinjaman PEN. Pembahasan strategi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek serta upaya promosi investasi untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dilakukan secara bersama-sama melalui wadah Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi DKI Jakarta yang mencakup sinergi antara Pemrov DKI Jakarta, KPwBI Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan instansi. Ke depan, sejalan dengan perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus, maka terdapat peluang sumber-sumber pembiayaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai turun dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta.



BAB 6

SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran mengonfirmasi menguatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan III 2024, arus kas tercatat *net outflow* dan transaksi pembayaran nontunai tumbuh menguat sejalan dengan menguatnya perekonomian di DKI Jakarta. Dari sisi industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami peningkatan pada triwulan III 2024 sebesar 37,51% (yoy), sedangkan dari sisi industri Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), kenaikan tercatat sebesar 72,98% (yoy). Seluruh jenis transaksi remitansi meningkat baik *incoming* (ke dalam negeri), *outgoing* (ke luar negeri) dan domestik (di dalam wilayah Indonesia).



**Pertumbuhan *Inflow*
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



-11,91%

Triwulan III 2024

11,92%

Triwulan II 2024

**Pertumbuhan *Outflow*
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



-5,21%

Triwulan III 2024

-21,53%

Triwulan II 2024

**Pertumbuhan Nilai
Transaksi BI-RTGS (yoy)**



15,20%

Triwulan III 2024

15,18%

Triwulan II 2024

**Pertumbuhan Nilai
Transaksi SKN-BI (yoy)**



5,03%

Triwulan III 2024

2,84%

Triwulan II 2024

A. KONDISI UMUM

Pada Triwulan III 2024, pergerakan uang masuk (*inflow*) dan uang keluar (*outflow*) di DKI Jakarta tercatat dalam posisi *net outflow*. Kondisi aliran uang tunai tersebut berbeda dari periode sebelumnya yang mengalami *net inflow*. Hal ini sejalan dengan perubahan pola aliran uang pasca HBKN Idulfitri di triwulan II 2024.

Transaksi pada sistem pembayaran nontunai mengonfirmasi menguatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Transaksi nilai besar melalui Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) serta transaksi retail melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan Uang Elektronik (UE) mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, transaksi *e-commerce* mengalami pelambatan. Sementara itu, penggunaan QRIS terus meluas tercermin dari perkembangan jumlah *merchant* QRIS di DKI Jakarta yang telah mencapai 5,62 juta *merchant* dan didominasi oleh kenaikan *merchant* QRIS pada jenis usaha mikro.

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Pengelolaan Uang Rupiah

Aktivitas peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 mengalami *net outflow*. Hal ini menunjukkan jumlah aliran uang kartal yang keluar dari kas Bank Indonesia (*outflow*) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*). *Net outflow* peredaran uang kartal pada periode laporan tercatat sebesar Rp4,79 triliun, berbeda dari triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,43 triliun (Tabel 6.1). Hal ini sejalan dengan perubahan pola aliran uang pasca HBKN Idulfitri di triwulan II 2024.

Outflow di DKI Jakarta pada triwulan III 2024 tercatat senilai Rp28,89 triliun atau berkontraksi 5,21% (yoy). Kontraksi *outflow* tersebut lebih baik dibandingkan periode triwulan II 2024 yang berkontraksi lebih dalam sebesar 21,53%. Sementara itu, *inflow* tercatat senilai Rp24,10 triliun atau berkontraksi sebesar 11,91% (yoy). Kontraksi *inflow* tersebut berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,92% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada triwulan berjalan.

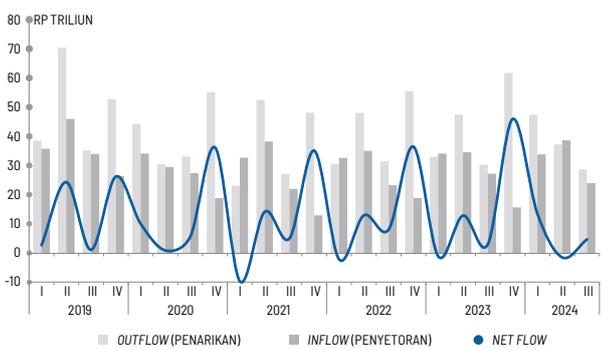
Berdasarkan jenis pecahan, Uang Pecahan Besar (UPB) mengalami *net outflow*, sementara jenis Uang Pecahan Kecil (UPK) mengalami *net inflow*. UPB meliputi pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu, sedangkan UPK meliputi pecahan Rp20 ribu ke bawah. Berdasarkan Grafik 6.2, uang yang terdapat di masyarakat didominasi oleh UPB.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus melakukan edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah antara lain untuk menekan peredaran uang rupiah yang diragukan keasliannya, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan merawat rupiah dengan baik serta mendorong belanja bijak atau sesuai kebutuhan. Guna meminimalisir peredaran uang rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dihimbau untuk menerapkan prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dan meningkatkan transaksi non-tunai. Uang palsu pada triwulan berjalan tercatat sebanyak 9.244 lembar yang bersumber dari laporan masyarakat maupun setoran bank.

Tabel 6.1 Perkembangan Transaksi Uang Kartal

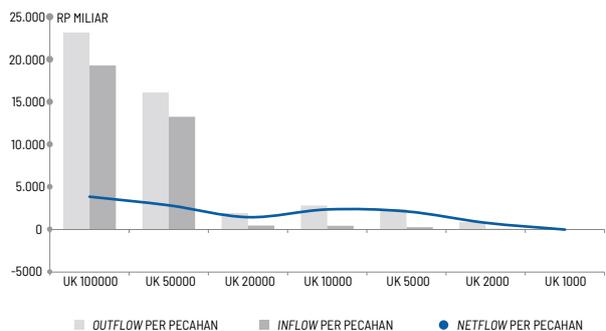
INDIKATOR (RP MILIAR)	2021				2022				2023				2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Penarikan / <i>Outflow</i>	23.262,44	52.752,19	27.268,94	48.370,62	30.728,45	48.319,59	31.594,94	55.707,70	33.252,42	47.711,56	30.476,99	62.000,31	47.603,55	37.441,46	28.890,65
Penyetoran / <i>Inflow</i>	32.895,37	38.486,86	22.158,98	13.048,09	32.803,23	35.262,53	23.425,89	19.014,24	34.305,48	34.729,91	27.363,28	15.787,47	34.017,71	38.868,05	24.104,55
<i>Net Flow</i>	-9.632,94	14.265,33	5.109,96	35.322,52	-2.074,77	13.057,06	8.169,05	36.693,46	-1.053,06	12.981,64	3.113,71	46.212,84	13.585,84	-1.426,59	4.786,10

Sumber: Bank Indonesia



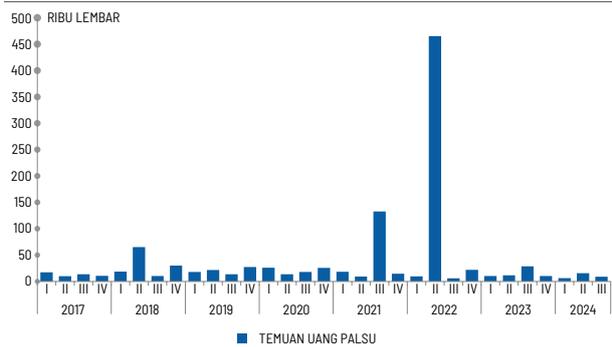
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* Uang Kartal



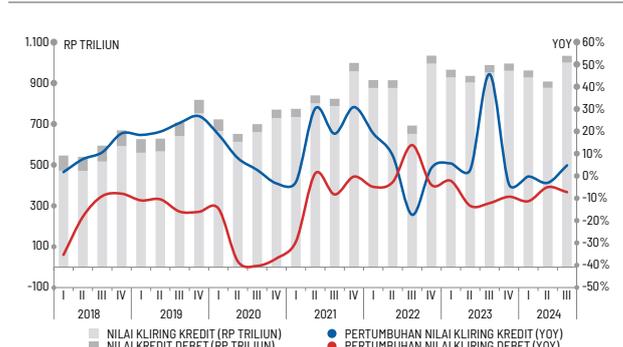
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* per Pecahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

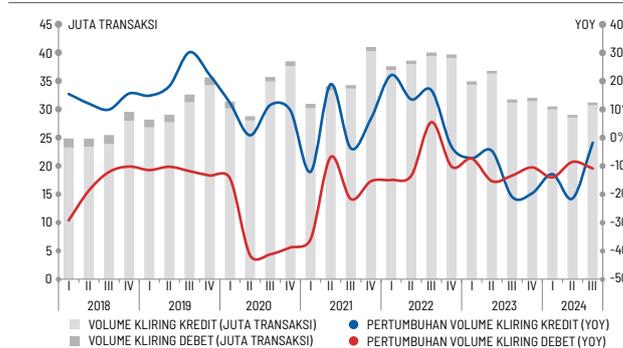


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.6 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI

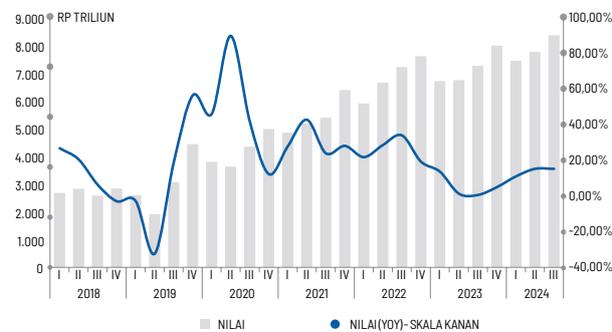
Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi BI-RTGS pada triwulan III 2024 meningkat sejalan dengan menguatnya perekonomian DKI Jakarta. Nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp8.359 triliun atau tumbuh 15,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,18% (yoy) (Grafik 6.4). Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS pada triwulan berjalan tercatat sebanyak 1,15 juta transaksi atau tumbuh 5,05% (yoy). Pertumbuhan volume tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,80% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan nilai transaksi BI-RTGS (Grafik 6.5).



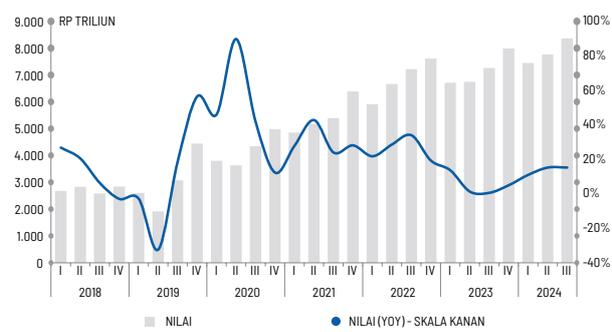
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Transaksi RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi SKNBI pada triwulan III 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan aktivitas ekonomi DKI Jakarta. Transaksi SKNBI kliring kredit tercatat mencapai Rp1.004,47 triliun dengan volume sebanyak 30,82 juta transaksi. Secara tahunan, nilai transaksi SKNBI kliring kredit tersebut tumbuh 5,03% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,84% (yoy). Dari sisi volume, aktivitas pembayaran menggunakan SKNBI kliring kredit masih berkontraksi 1,57% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 21,37% (yoy). Sementara itu, transaksi SKNBI kliring debit pada triwulan III 2024 mencapai Rp33,73 triliun dengan volume sebanyak 519,37 ribu transaksi. Nilai dan volume tersebut berkontraksi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 7,04% (yoy) dan 10,73% (yoy) (Grafik 6.7).

Instrumen Pembayaran Nontunai

Pada triwulan III 2024, transaksi pembayaran menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) mengalami peningkatan. Transaksi APMK jenis kartu debit meningkat baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu debit pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp170,30 triliun dengan volume sebanyak 221,51 juta. Nilai transaksi tersebut berkontraksi 46,79% (yoy) atau lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 47,35% (yoy). Dari sisi

volume transaksi, penggunaan APMK pada triwulan laporan mengalami kontraksi 43,36% (yoy) atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 51,86% (yoy). Pertumbuhan transaksi kartu debit pada triwulan berjalan terutama ditopang oleh tingginya penarikan uang tunai dan transfer antar bank.

Nilai transaksi APMK jenis kartu kredit tumbuh menguat meskipun volumenya mengalami sedikit pelambatan. Nilai transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp62,86 triliun dengan volume sebanyak 66,96 juta transaksi. Nilai transaksi tersebut tumbuh 3,74% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,63% (yoy), terutama bersumber dari aktivitas belanja masyarakat. Volume transaksi kartu kredit tercatat tumbuh 13,31% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,73% (yoy).

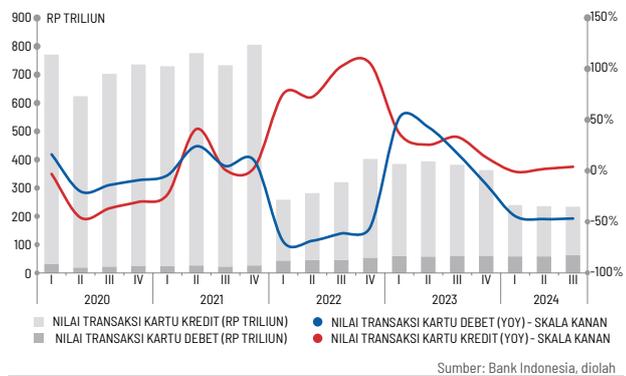
Transaksi pembayaran melalui e-commerce pada triwulan III 2024 mengalami pelambatan. Transaksi pembayaran melalui e-commerce pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp21,63 triliun atau terkontraksi 5,38% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 2,87% (yoy). Berdasarkan metode pembayarannya, pelambatan terutama bersumber dari instrumen non-tunai yang terkontraksi 6,51% (yoy), terutama jenis pembayaran transfer bank dan APMK online. Sementara metode pembayaran tunai (Cash on Delivery/CoD) pada e-commerce tercatat tumbuh 29,91% (yoy), menguat dibandingkan

periode sebelumnya. Secara umum, metode pembayaran yang paling banyak digunakan saat bertransaksi melalui e-commerce yakni transfer bank dan e-money (uang elektronik).

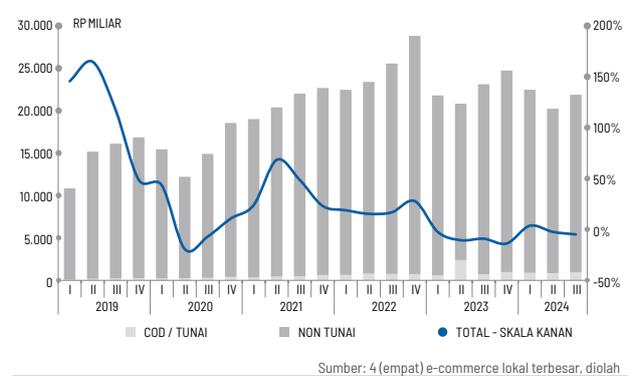
Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik baik yang berbasis server maupun berbasis chip mengalami peningkatan.

Pada triwulan III-2024, nominal transaksi uang elektronik tumbuh 51,66% (yoy) atau menguat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 49,29% (yoy). Namun demikian, volume transaksi uang elektronik tercatat melambat dibandingkan periode sebelumnya yaitu dari 42,58% (yoy) menjadi 34,30% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan penggunaan uang elektronik di DKI Jakarta sejalan dengan meluasnya penggunaan pembayaran digital yang didukung ketersediaan infrastruktur pembayaran digital yang memadai. Uang elektronik berbasis server yang terhubung dengan perangkat gawai pengguna semakin memudahkan masyarakat untuk bertransaksi belanja termasuk melakukan transfer dana. Sementara uang elektronik berbasis chip yang umumnya dalam bentuk kartu umumnya digunakan untuk pembayaran transportasi publik dan jasa jalan tol.

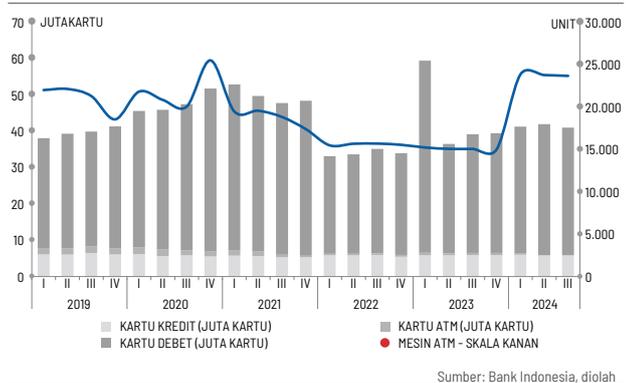
Akseptasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) di DKI Jakarta terus meluas didukung pelaksanaan berbagai kegiatan edukasi/ sosialisasi antara lain kampanye Pekan QRIS Nasional (PQN) dan QRIS Jelajah Indonesia tahun 2024. PQN Tahun 2024 berlangsung serentak secara nasional dari tanggal 12 sampai dengan 18 Agustus



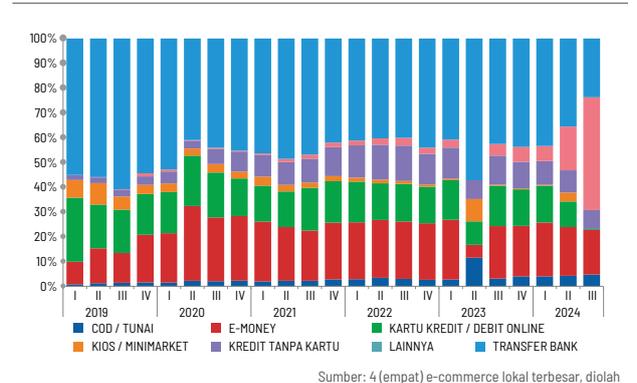
Grafik 6.8 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit



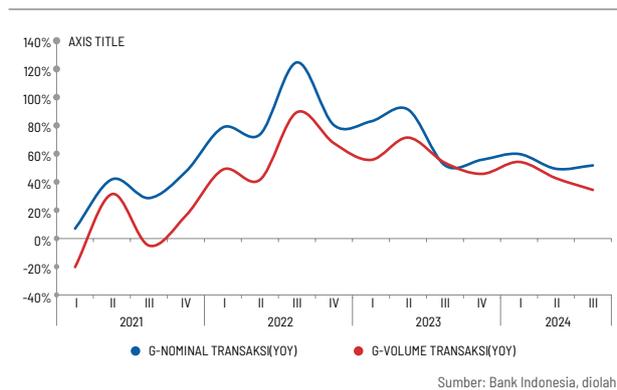
Grafik 6.10 Perkembangan Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran



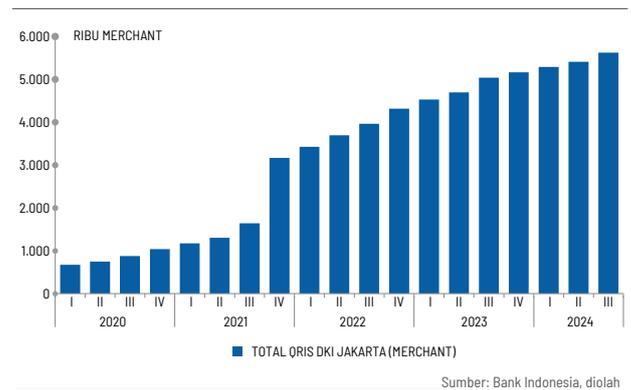
Grafik 6.9 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit dan ATM



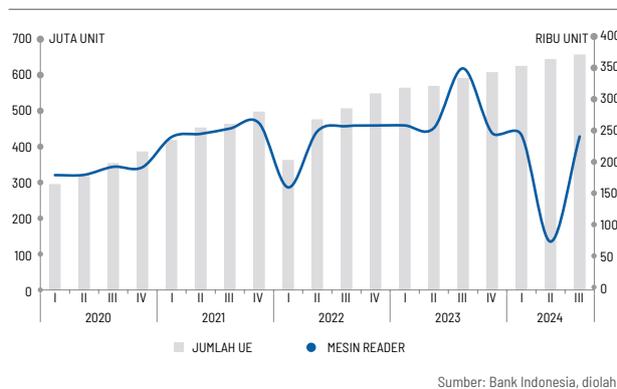
Grafik 6.11 Pangsa Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran



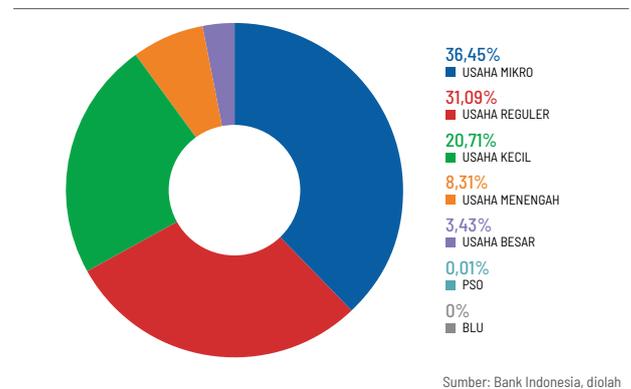
Grafik 6.12 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Grafik 6.14 Perkembangan Merchant QRIS di DKI Jakarta



Grafik 6.13 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik

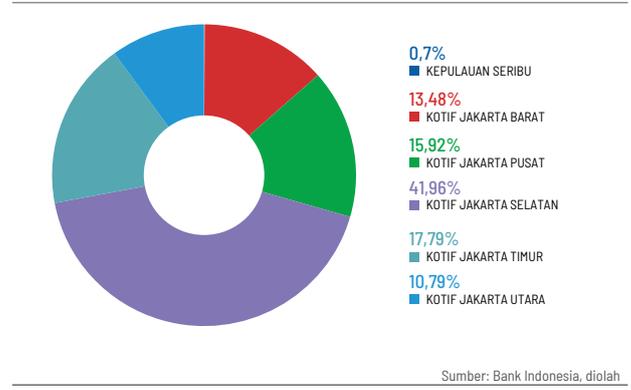


Grafik 6.15 Pangsa Merchant QRIS per Jenis Usaha

2024. Pelaksanaan PQN tahun 2024 di DKI Jakarta dipusatkan di beberapa lokasi pusat perbelanjaan dan hiburan. Rangkaian kegiatan PQN tahun 2024 di DKI Jakarta mampu menjangkau lebih dari 381 ribu pengunjung baik secara daring maupun luring. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait yaitu pemerintah daerah, Penyedia Jasa Pembayaran/PJP (bank dan nonbank), pelaku usaha UMKM serta media.

Sampai dengan triwulan III 2024, merchant QRIS di Jakarta tercatat sebanyak 5,62 juta merchant atau terdapat penambahan 215,71 ribu merchant baru dari triwulan sebelumnya. Merchant baru tersebut sebagian besar berupa usaha mikro dan usaha reguler yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Saat ini, profil merchant QRIS di DKI Jakarta sebagian besar merupakan usaha mikro dengan pangsa sebesar 36,45% dan usaha reguler dengan pangsa sebesar 31,09% (Grafik 6.15). Berdasarkan wilayahnya, merchant QRIS terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan dengan porsi 41,96% disusul wilayah Jakarta Timur dengan pangsa 17,79% (Grafik 6.16).

Sejalan dengan kenaikan merchant QRIS, jumlah pengguna baru dan volume transaksi QRIS di DKI Jakarta terus bertambah. Pada tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober, terdapat penambahan pengguna baru sebanyak 325.235 pengguna. Volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan hingga Oktober 2024 yaitu mencapai 1.590.179.685 transaksi atau secara kumulatif tumbuh 168,62%.



Grafik 6.16 Pangsa Merchant QRIS per Wilayah

Penggunaan kanal pembayaran non-tunai, terutama QRIS terus diperluas di sektor unggulan dan prioritas di DKI Jakarta yaitu transportasi, pelayanan kesehatan, dan pariwisata (urban tourism).

Kampanye Pekan QRIS Nasional (PQN) di DKI Jakarta diselenggarakan di beberapa lokasi pusat perbelanjaan dan hiburan dengan melibatkan UMKM. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan QRIS Jelajah Indonesia terutama bertujuan untuk memperluas penggunaan QRIS di kawasan destinasi wisata telah diselenggarakan di Monas, Kota Tua, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Cove at Batavia PIK.

Untuk meningkatkan minat masyarakat bertransaksi menggunakan QRIS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

mengenalkan jargon “Nyok Pake QRIS”. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder strategis untuk menggali potensi dan penyusunan strategi perluasan digitalisasi sistem pembayaran/QRIS. Koordinasi tersebut antara lain melalui pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) penyusunan peta jalan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029, diskusi elektronifikasi jalan tol dan digitalisasi perparkiran untuk menggali potensi penggunaan transaksi non-tunai di area perparkiran baik di pinggir badan jalan (*on-street parking*) maupun di kantong parkir (*off-street parking*), *capacity building* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta, serta kegiatan evaluasi capaian ETPD dan *championship* tahun 2024.

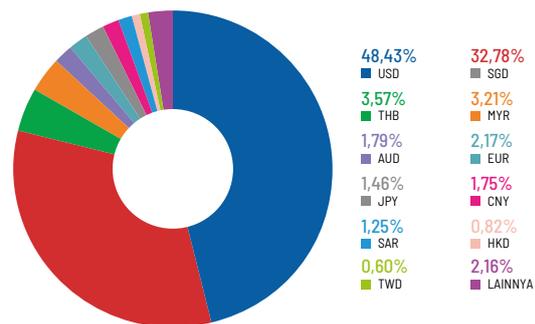
C. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada Triwulan III 2024, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB mengalami peningkatan. Nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB triwulan III tahun 2024 mencapai Rp126,98 Triliun atau meningkat sebesar 37,51% (yoy), terdiri atas transaksi beli Rp63,49 Triliun dan transaksi jual sebesar Rp63,48 Triliun. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 98,36 Triliun atau 35,91% (yoy)(Grafik 6.14).

Peningkatan transaksi valuta asing merupakan dampak positif dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sejak semester I tahun 2024 yang masih terus berlanjut diikuti pertumbuhan perekonomian di wilayah DKI Jakarta. Pada Triwulan III 2024, terdapat 317 (Kantor Pusat) dan 161 (Kantor Cabang) Penyelenggara KUPVA BB yang berizin dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 6.2). Dilihat dari sebaran geografis, penyelenggara KUPVA BB saat ini mayoritas beroperasi di wilayah Jakarta Pusat (29,51%) dan Jakarta Selatan (28,82%). Adapun valuta asing yang paling banyak ditransaksikan adalah mata uang USD dan SGD dengan persentase masing-masing sebesar 48,43% dan 32,78% (Grafik 6.15).

KPwBI Prov. DKI Jakarta melakukan fungsi pengawasan terhadap industri KUPVA BB di wilayah Jabodetabek, yang memiliki *share* terbesar secara nasional baik dilihat dari jumlah entitas, frekuensi, dan nilai transaksi, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Dapat disampaikan hingga posisi September 2024, Penyelenggara KUPVA BB dalam wilayah kerja KPwBI Prov. DKI Jakarta tercatat sebanyak 317 KUPVA BB atau ±31% *share* terhadap industri KUPVA BB nasional dengan transaksi sebesar Rp206,08 Triliun atau 22,39% *share* terhadap nasional.



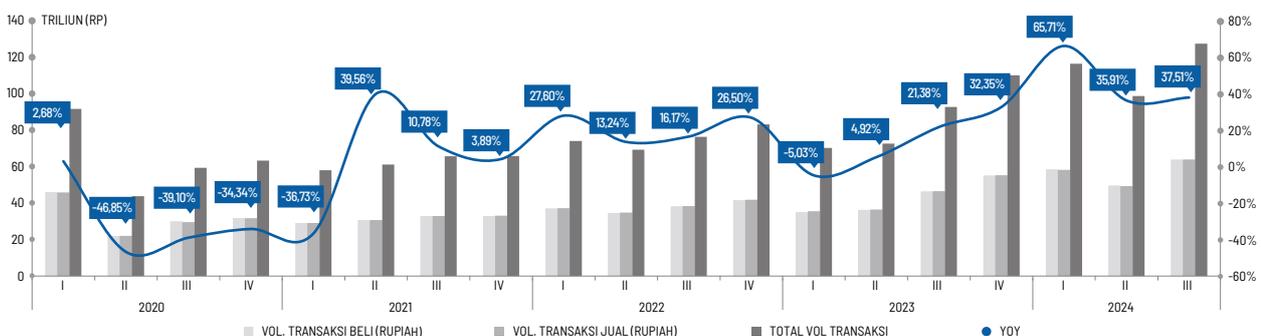
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.18 Market Share Valuta Asing

Tabel 6.2 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	288	78	366
2	Bekasi	12	5	17
3	Bogor	6	9	15
4	Depok	7	1	8
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	1	18	19
7	Pulau Bali	0	2	2
8	Pulau Jawa (lainnya)	0	36	36
9	Pulau Kalimantan	0	1	1
10	Pulau Sumatera	0	10	10
TOTAL		317	161	478

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.17 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

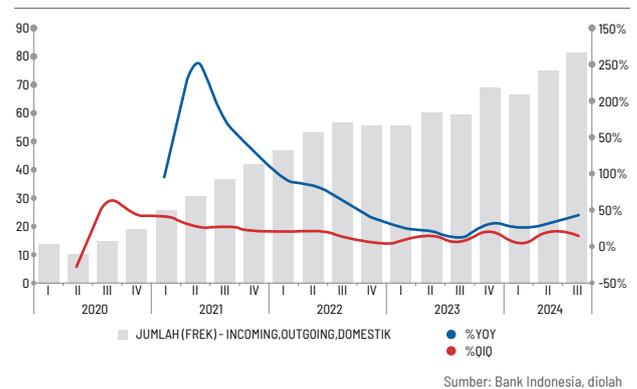
Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan transaksi transfer dana yang dijalankan oleh PJP LR pada Triwulan III 2024 cenderung meningkat (Tabel 6.3). Peningkatan transaksi pada seluruh transaksi remitansi baik pada nilai transaksi *incoming* (dari luar negeri ke Indonesia), *outgoing* (dari Indonesia ke luar negeri), dan domestik (di wilayah Indonesia) sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* pada triwulan III 2024 mencapai Rp13,81 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 60,16% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan nilai transaksi sebesar Rp 10,47 Triliun atau terdapat pertumbuhan sebesar 23,26% (yoy). Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat sebanyak 504.246 transaksi atau berkontraksi 36,92% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya dengan frekuensi transaksi sebanyak 464.628 transaksi atau $\pm 33,53\%$ (yoy).
- Nilai transaksi *incoming* tercatat sebesar Rp20,95 Triliun atau tumbuh sebesar 29,16% (yoy), terjadi penurunan dari triwulan sebelumnya dengan nilai transaksi tercatat sebesar Rp25,14 atau 57,48% (yoy). Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 3,53 juta atau berkontraksi sebesar 2,57% (yoy), berbeda dari triwulan sebelumnya dengan frekuensi transaksi sebanyak 4,18 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,38% (yoy).
- Nilai transaksi domestik tercatat sebesar Rp139 Triliun atau tumbuh sebesar 83,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai transaksi tercatat sebesar Rp114 Triliun atau 38,31% (yoy). Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 77,43 juta transaksi atau tumbuh sebesar 40,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan frekuensi transaksi tercatat sebanyak 70,58 juta transaksi atau tumbuh sebesar 27,40% (yoy).

Secara keseluruhan terjadi peningkatan nilai dan frekuensi transaksi *outgoing*, *incoming*, dan domestik transfer dana yang dijalankan PJP LR, sementara penurunan frekuensi hanya terjadi pada transaksi *outgoing* dan *incoming*. Adapun total nilai transaksi tercatat sebesar Rp174,12 Triliun atau tumbuh sebesar 72,98% (yoy) dengan total frekuensi sebanyak 81,47 juta transaksi atau tumbuh sebesar 36,61% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 6.16). Hal ini sejalan dengan tingginya kebutuhan transfer dana masyarakat terutama menjelang momen HBKN Idul Adha, musim liburan sekolah, serta tahun ajaran baru.

Industri PJP LR di wilayah Pengawasan KPwBI Prov. DKI Jakarta juga memiliki *share* terbesar secara nasional baik dari jumlah entitas serta nilai transaksi. Hingga posisi per September 2024, PJP LR dalam wilayah kerja KPwBI Prov. DKI Jakarta tercatat sebanyak 77 PJP LR atau $\pm 39,3\%$ *share* terhadap jumlah PJP LR nasional dengan transaksi sebesar Rp174,12 Triliun atau $\pm 42,7\%$ *share* terhadap nasional.



Grafik 6.19 Perkembangan Transaksi PJP LR

Tabel 6.3 Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW I 2020	Jan-20	19.244	876.029.558.924	2.790.747	2.448.962.056.681	2.318.460	3.652.836.612.761	5.128.451	6.977.828.228.366
	Feb-20	17.820	705.196.274.574	464.055	2.541.422.928.345	3.207.777	4.268.574.298.242	3.689.652	7.515.193.501.161
	Mar-20	14.973	786.786.445.415	513.070	3.249.878.679.624	3.187.842	4.291.224.204.144	3.715.885	8.327.889.329.183
	Total	52037	2.368.012.278.913	3.767.872	8.240.263.664.650	8.714.079	12.212.635.115.147	12.533.988	22.820.911.058.710
TW II 2020	Apr-20	9.843	451.330.534.267	518.556	3.109.213.840.919	1.835.884	3.035.059.526.763	2.364.283	6.595.603.901.949
	May-20	11.646	317.617.797.609	638.902	3.272.985.284.693	2.190.258	3.100.375.671.350	2.840.806	6.690.978.753.652
	Jun-20	16.362	609.234.172.893	592.505	3.021.071.820.858	2.547.826	3.469.218.209.499	3.156.693	7.099.524.203.250
	Total	37.851	1.378.182.504.769	1.749.963	9.403.270.946.470	6.573.968	9.604.653.407.612	8.361.782	20.386.106.858.851
TW III 2020	Jul-20	17.307	776.735.132.076	625.951	3.578.380.589.317	3.196.653	4.498.767.441.505	3.839.911	8.853.883.162.898
	Aug-20	16.536	682.778.854.093	562.361	3.331.395.275.865	3.745.693	4.536.278.891.917	4.324.790	8.550.453.021.875
	Sep-20	17.272	872.519.689.320	570.496	3.371.000.771.677	4.273.546	5.311.898.312.574	4.861.314	9.555.418.723.571
	Total	51.115	2.332.033.675.489	1.758.808	10.280.776.636.859	11.216.092	14.346.944.645.996	13.026.015	26.959.754.958.344
TW IV 2020	Oct-20	17.695	970.727.059.198	593.571	3.281.780.541.285	4.997.412	6.184.066.710.486	5.608.678	10.436.574.310.969
	Nov-20	20.811	1.382.025.507.414	531.845	2.885.258.608.907	5.429.305	7.050.762.370.538	5.981.961	11.318.046.486.859
	Dec-20	23.083	1.275.443.128.213	598.304	3.018.815.956.838	5.639.375	6.988.830.657.280	6.260.762	11.283.089.742.331
	Total	61.589	3.628.195.694.825	1.723.720	9.185.855.107.030	16.066.092	20.223.659.738.304	17.851.401	33.037.710.540.159
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232	7.549.080	16.269.385.293.107
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229	7.838.359	16.126.977.404.248
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091	8.830.388	19.050.748.624.217
	Total	67.455	5.263.457.646.331	1.987.596	10.398.209.605.689	22.162.776	35.785.444.069.552	24.217.827	51.447.111.321.572
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794	9.249.021	20.940.961.975.858
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234	9.686.263	21.651.662.703.633
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151	10.290.422	20.919.619.036.885
	Total	76.628	5.637.880.175.501	2.273.604	12.261.451.509.696	26.875.474	45.612.912.031.179	29.225.706	63.512.243.716.376
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306	11.721.972	22.929.870.675.186
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328	12.311.411	23.796.208.613.317
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666	11.454.075	24.051.919.077.932
	Total	97.632	5.835.657.566.296	2.176.073	11.495.068.339.839	33.213.753	53.447.272.460.300	35.487.458	70.777.998.368.435
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247	12.811.294	26.061.923.760.391
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543	13.204.031	26.390.554.919.310
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286	14.816.056	28.916.320.867.017
	Total	143.369	6.300.451.379.147	2.625.074	13.578.376.913.495	38.062.938	61.489.971.254.076	40.831.381	81.368.799.546.718
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317	14.853.863	28.426.772.774.520
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277	14.075.420	24.785.900.546.997
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313	16.837.542	30.241.640.805.237
	Total	163.400	7.373.774.034.626	2.484.401	12.872.980.050.221	43.119.024	63.207.560.041.907	45.766.825	83.454.314.126.754
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935	18.399.930	34.586.962.111.949
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.841.826.505	15.851.008	28.574.484.960.920
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629	17.976.238	30.695.706.429.199
	Total	276.908	9.049.494.321.218	2.914.434	12.731.612.320.781	49.035.834	72.088.046.860.069	52.227.176	93.869.153.502.068
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.649.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080	19.499.382	33.466.428.090.780
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.653.090	24.691.222.695.268	18.699.835	31.379.650.817.615
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235	18.096.455	29.858.242.643.796
	Total	1.033.193	9.963.395.156.232	2.676.518	11.759.415.849.376	52.585.961	72.981.510.546.583	56.295.672	94.704.321.552.191
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000	17.830.654	28.141.454.595.898
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705	17.997.040	29.701.779.568.654
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594	18.993.791	33.367.736.125.117
	Total	872.277	9.329.642.084.380	2.946.050	13.123.827.550.990	51.003.158	68.757.500.654.299	54.821.485	91.210.970.289.669
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867	18.434.219	30.626.615.004.391
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967	17.157.119	29.162.569.978.821
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361	19.563.508	38.228.052.498.790
	Total	601.008	11.844.809.980.387	3.687.439	14.789.258.847.420	50.866.399	71.383.168.654.195	55.154.846	98.017.237.482.002
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041	19.233.723	32.875.710.981.664
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113	19.130.026	33.497.897.931.427
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855	21.748.244	40.566.552.197.160
	Total	699.004	8.501.127.052.747	4.010.528	15.966.497.142.495	55.402.461	82.472.536.915.009	60.111.993	106.940.161.110.251
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742	19.697.908	33.942.070.638.863
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395	20.442.436	32.610.171.015.754
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086	19.500.390	34.105.033.359.834
	Total	799.400	8.623.526.841.571	3.624.421	16.220.975.566.657	55.216.913	75.812.772.606.223	59.640.734	100.657.275.014.451
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944	25.083.789	39.876.447.971.416
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.711	20.364.548	30.652.789.833.843	21.600.320	39.268.213.814.888
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490	22.274.028	42.413.069.984.436
	Total	614.882	9.753.625.146.263	3.630.718	17.777.375.868.200	64.712.537	94.026.730.956.277	68.958.137	121.557.731.770.740

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428	21.448.360	43.397.440.598.394
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.522	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272	20.759.748	43.486.734.865.182
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.612	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978	23.905.291	46.739.667.534.482
	Total	463.604	10.044.901.886.230	3.590.772	21.683.552.186.150	62.059.023	101.895.388.925.678	66.113.399	133.623.842.998.058
TW II 2024	Apr-24	152.595	3.116.325.807.983	1.513.702	8.963.120.524.159	21.991.219	34.707.823.244.702	23.657.516	46.787.269.576.844
	May-24	159.208	3.684.703.251.154	1.360.498	8.267.486.900.714	24.025.918	38.363.701.519.121	25.545.624	50.315.891.670.989
	Jun-24	152.825	3.677.435.279.743	1.311.905	7.913.112.578.674	24.564.070	40.997.949.584.626	26.028.800	52.588.497.443.043
	Total	464.628	10.478.464.338.880	4.186.105	25.143.720.003.547	70.581.207	114.069.474.348.449	75.231.940	149.691.658.690.876
TW III 2024	Jul-24	170.844	4.286.252.310.689	1.254.388	7.253.837.600.268	23.608.049	47.785.360.191.808	25.033.281	59.325.450.102.765
	Aug-24	165.438	4.769.314.105.747	1.249.523	7.540.207.796.939	24.627.251	45.731.778.010.778	26.042.212	58.041.299.913.464
	Sep-24	167.964	4.755.459.387.757	1.027.373	6.156.438.717.382	29.202.399	45.840.712.560.218	30.397.736	56.752.610.665.357
	Total	504.246	13.811.025.804.193	3.531.284	20.950.484.114.589	77.437.699	139.357.850.762.804	81.473.229	174.119.360.681.586
Grand Total	3.192.574	64.083.811.312.732	23.155.278	122.794.604.929.978	379.276.817	594.564.374.652.879	405.624.469	781.442.790.895.589	



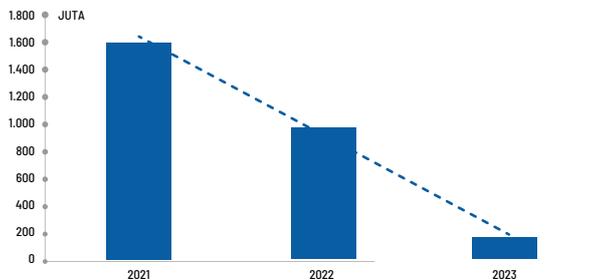
BOKS 3

Strategi Penguatan Pengawasan PJP LR dan KUPVA BB di Era Digitalisasi Melalui Asesmen yang *Robust*

Perkembangan teknologi mendorong inovasi dan digitalisasi proses bisnis terus berlangsung yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital terutama sektor keuangan terus berlanjut dan menjadi *backbone* dalam perekonomian Indonesia. Di sisi lain, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga menciptakan berbagai tantangan di industri PJP LR dan KUPVA BB. Tantangan ini mencakup kejahatan siber, pemanfaatan layanan digital untuk aktivitas ilegal atau pencucian uang, perlindungan data pribadi, hingga penyalahgunaan layanan oleh *fraudster* seperti pencurian

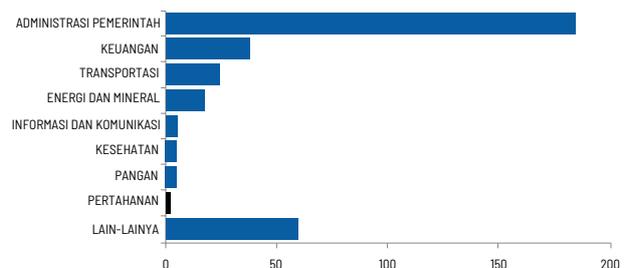
data, peretasan data terhadap sistem, hingga pelumpuhan sistem operasional.

Berdasarkan data sepanjang 2023, terdapat 151,4 juta kasus terkait dengan anomali trafik internet di Indonesia, menurun sebesar 545% (yoy%) dibandingkan dengan data pada 2022 yaitu terdapat 976,4 juta kasus (Grafik B3.1). Diketahui juga bahwa sektor keuangan menempati urutan kedua setelah administrasi pemerintahan, sebagai sektor yang paling banyak mengalami anomali insiden siber (Grafik B3.2).



Sumber : Badan Siber dan Sandi Negara, diolah

Grafik B3.1 Kasus Anomali Trafik Internet di Indonesia



Sumber : DataBok

Grafik B3.2 Insiden Siber Berdasarkan Sektor

Perkembangan model bisnis PJP LR semakin beragam didukung oleh layanan dan perkembangan digital, hal ini ditunjukkan dengan 62,33% PJP LR di bawah pengawasan KPwBI Prov. DKI Jakarta telah menggunakan sistem di dalam penyelenggaraan transfer dana. Selain itu, KUPVA BB turut melakukan digitalisasi pada proses bisnisnya, hal ini terlihat dari 39% KUPVA BB sudah menggunakan aplikasi guna mendukung transaksi dan 56,1% KUPVA BB telah menggunakan jaringan internet untuk pemanfaatan aplikasi tersebut. Seiring dengan meningkatnya implementasi layanan digital pada PJP LR didukung dengan *behaviour* masyarakat yang turut beradaptasi serta digitalisasi proses bisnis pada KUPVA BB, memunculkan beberapa risiko pada penyelenggaraan layanan ditengah tumbuhnya transaksi kedua industri tersebut, oleh karena itu respons yang adaptif diperlukan oleh regulator dalam rangka mendukung dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul, antara lain melakukan berbagai asesmen yang dapat digunakan untuk penguatan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.

Beberapa asesmen yang telah dilakukan untuk memperkuat strategi pengawasan, antara lain terkait: 1) Identifikasi tingkat keamanan sistem informasi Penyelenggara KUPVA BB, 2) Pengaruh volume transaksi terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Penyelenggara KUPVA BB, 3) Identifikasi tingkat kejenuhan industri KUPVA BB, 4) Model bisnis PJP LR di era digital, dan 5) Klustering strategi pengawasan PJP LR.

Asesmen terkait dengan tingkat keamanan sistem informasi KUPVA BB dilakukan berdasarkan standar internasional ISO/IEC 27001:2022 dengan menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 5.0. serta mengidentifikasi penerapan proses mitigasi risiko kepatuhan pada Penyelenggara KUPVA BB. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, diketahui bahwa Penyelenggara perlu meningkatkan pemenuhan aspek kesiapan keamanan informasi sesuai standar yang berlaku yang mencakup aspek Tata Kelola, Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, dan Perlindungan Data Pribadi. Penguatan ini akan memitigasi akibat dari rendahnya adopsi teknologi sistem informasi yang berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada asesmen lainnya, dilakukan penelitian mengenai pengaruh volume transaksi terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada KUPVA BB. Hasil asesmen menunjukkan terdapat hubungan positif diantara keduanya, dimana peningkatan volume transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, KPwBI Prov. DKI Jakarta kedepannya akan memfokuskan pengawasan pada KUPVA BB berdasarkan 4 (empat) kluster yaitu (1) kluster *High Risk Low Growth*, (2) kluster *Low Risk Low Growth*, (3) kluster *High Risk High Growth*, dan (4) kluster *Low Risk High Growth*.

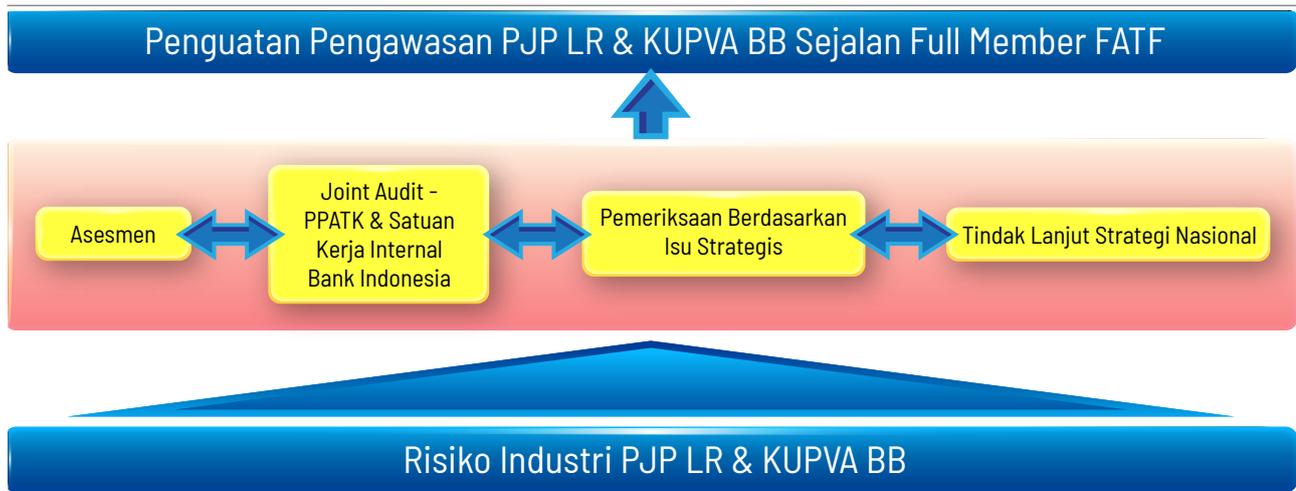
Untuk memahami tingkat penyebaran jaringan kantor KUPVA BB, dilakukan juga asesmen terkait tingkat kejenuhan KUPVA BB di wilayah DKI Jakarta dan identifikasi variabel makro yang mempengaruhi populasi industri. Dari asesmen diketahui bahwa (i) industri KUPVA BB memiliki karakteristik pasar bebas tercermin dari korelasi tingkat kepadatan dengan perolehan margin per wilayah, (ii) terdapat beberapa indikator makro dan mikro yang mempengaruhi populasi jumlah kantor.

Perkembangan digitalisasi dan inovasi di industri PJP LR meningkatkan efisiensi bisnis, namun juga disertai peningkatan risiko seiring tingginya kompleksitas kegiatan dan variasi model bisnis Penyelenggara. Selain itu, perbedaan kapasitas antara satu Penyelenggara dan yang lainnya juga menyebabkan karakteristik dan risiko pelaku di industri yang semakin beragam. Untuk itu, dilakukan asesmen segmentasi industri PJP LR, yang dilakukan melalui pemetaan karakteristik jumlah transaksi, total aset, kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, penggunaan sistem informasi, serta kepemilikan dan pengendalian asing. Dari hasil asesmen tersebut, diperoleh 4 (empat) kluster industri PJP LR yang dapat membantu dalam penetapan fokus utama dalam melakukan pengawasan Bank Indonesia khususnya dalam menentukan strategi pengawasan yang efektif dan efisien serta memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Lebih dalam, Bank Indonesia juga melakukan asesmen dalam memahami tren dan risiko dari perkembangan model bisnis industri PJP LR yang pesat

Penguatan pengawasan industri SP terus dilakukan sejalan dengan penetapan Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), dan sebagai upaya pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dari sisi industri adalah mendorong pemanfaatan PJP LR dan KUPVA BB untuk beralih ke sistem aplikasi yang terintegrasi untuk memitigasi risiko keamanan maupun risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta sesuai dengan standar internasional.

Selanjutnya, bantuan teknologi dapat mengoptimalkan pelaksanaan CDD yang mencakup otomatisasi identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasa, pihak yang bertindak atas nama pengguna jasa, serta *beneficial owner* yang terlibat dalam transaksi. Proses identifikasi dan verifikasi ini harus dilakukan berdasarkan data, informasi, dan/ atau dokumen yang berasal dari sumber-sumber independen dan terpercaya antara lain melalui interkoneksi dengan *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Aspek-aspek keamanan informasi yang harus diperhatikan oleh PJP LR dan KUPVA BB meliputi tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, kerangka kerja yang terstruktur, pengelolaan aset informasi,



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Gambar B3.2 Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga

penerapan teknologi yang tepat, serta perlindungan data pribadi pengguna jasa. Lebih lanjut, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Industri SP menjadi tantangan tersendiri bagi KPwBI Prov. DKI Jakarta, maka dari itu dilakukan strategi pengawasan yang komprehensif, lebih optimal dan bersifat *forward-looking*, a.l melalui (i) asesmen yang *robust*, proaktif, kredibel, (ii) adopsi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan melalui Suptech dan Regtech dan (iii) penguatan sinergi dan kolaborasi antar K/L dan asosiasi/industri, seperti Komdigi, PPAK, DJBC, Bareskrim, BNN, Bappebti, APVA, APPUI dan ASPI. Strategi dimaksud menjadi relevan mempertimbangkan perkembangan isu strategis seperti fasilitasi aktivitas ilegal (judi online, pinjaman online, P2P lending ilegal dan investasi bodong) (Gambar 1).



BAB 7

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2024 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,34% pada Maret 2024, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 4,44%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2024 berada pada level 9,03%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin



Tingkat Kesempatan Kerja



93,79%

Agustus 2024

93,47%

Agustus 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka



6,21%

Agustus 2024

6,53%

Agustus 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP)



Rp5.067.381

2024

Rp4.901.798

2023

Indeks Penghasilan Konsumen



128,00%

Triwulan III 2024

125,60%

Triwulan II 2024

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



131,70%

Triwulan III 2024

139,30%

Triwulan II 2024

A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2024, angka penduduk bekerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,11 juta orang, meningkat sebesar 0,69% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 7.1 dan Tabel 7.1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 93,79%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (93,47%) (Grafik 7.2).

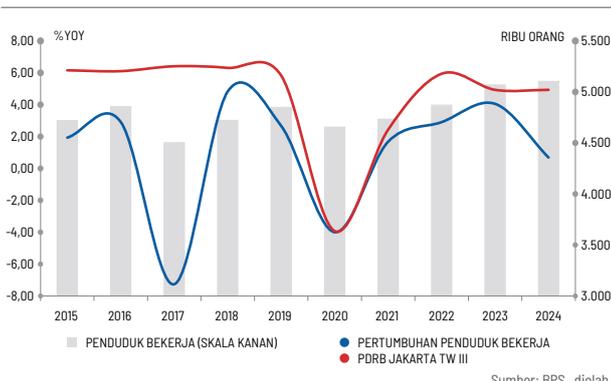
Kondisi pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu dengan pangsa sebesar 82,15%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 17,85%. Pekerja tidak penuh dikelompokkan berdasarkan dua kategori, yaitu Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) dan Pekerja Paruh Waktu (Grafik 7.3). Dibandingkan Agustus 2023, TSP mengalami kenaikan, yakni 2,96% menjadi 3,98%. Sejalan dengan TSP, pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan dari 12,78% menjadi 13,87% dari total penduduk bekerja di DKI Jakarta.

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebanyak 63,69% dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,31% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 0,58% (yoy), meningkat dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 5,11% (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 0,89% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,24% (yoy) (Grafik 7.4).



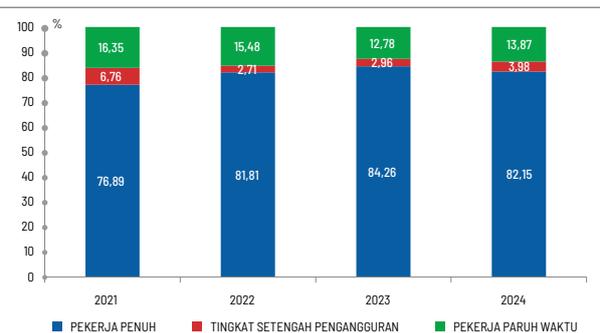
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



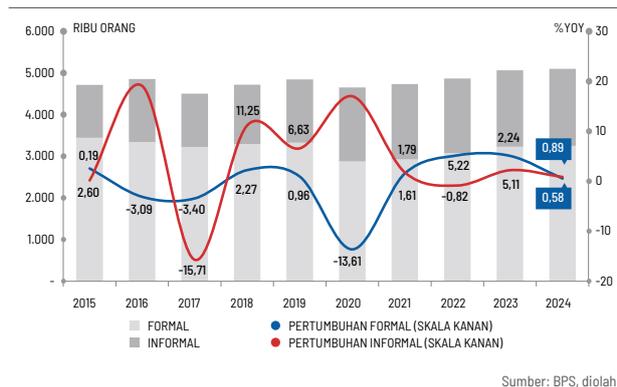
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja

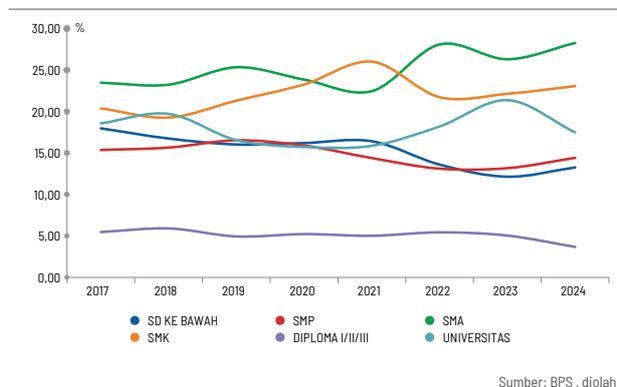
Tabel 7.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	FEBRUARI	AGUSTUS										
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	7.930,26	8.126,12	8.004,78	8.199,69	8.239,83	8.266,36	8.245,33	8.327,00	8.332,26	8.322,91	8.339,08	8.364,83
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.447,51	5.192,35	5.438,99	5.232,03	5.365,77	5.177,31	5.134,13	5.252,40	5.255,24	5.427,23	5.434,37	5.445,77
Bekerja (ribu orang)	5.167,92	4.852,95	5.170,67	4.659,25	4.909,17	4.737,42	4.723,54	4.875,10	4.857,62	5.072,74	5.106,78	5.107,78
Pengangguran (ribu orang)	279,59	339,40	268,32	572,78	456,60	439,90	410,59	377,29	397,62	354,49	327,59	337,99
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.482,75	2.933,77	2.565,78	2.967,66	2.874,05	3.089,04	3.111,20	3.074,61	3.077,02	2.895,68	2.904,71	2.919,06
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,89	63,90	67,95	63,81	65,12	62,63	62,27	63,08	63,07	65,21	65,17	65,10
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,87	93,46	95,07	89,05	91,49	91,50	92,00	92,82	92,43	93,47	93,97	93,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,13	6,54	4,93	10,95	8,51	8,50	8,00	7,18	7,57	6,53	6,03	6,21

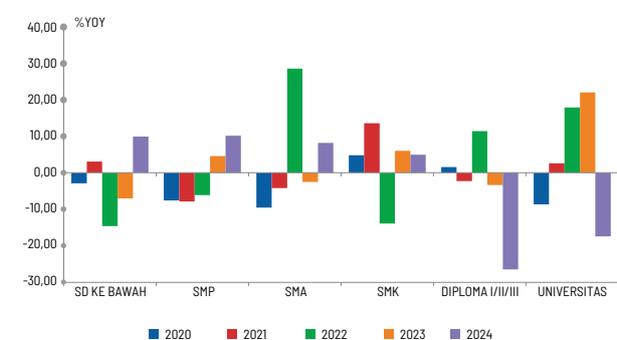
Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah
Grafik 7.4 Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: BPS, diolah
Grafik 7.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



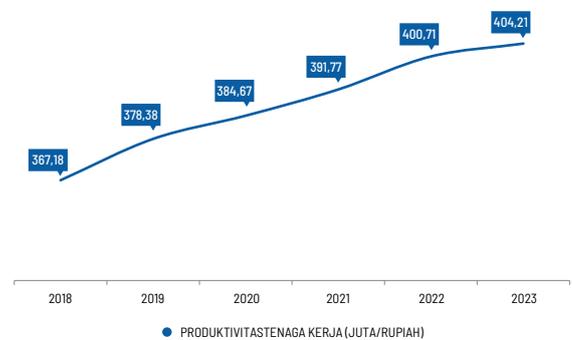
Sumber: BPS, diolah
Grafik 7.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3,06 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 7.2).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan. Jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan hingga tamat SMA memiliki pangsa sebesar 28,23% terhadap total penduduk bekerja dan tercatat tumbuh sebesar 8,22% (yoy) mencatat pertumbuhan positif tertinggi. Peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja lulusan SMK dengan pangsa sebesar 23,04%. Distribusi penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2024.

Lebih lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja yang membaik tersebut turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp404,21 juta rupiah, meningkat dibandingkan 5 tahun sebelumnya (Grafik 7.7). Secara spasial, produktivitas tertinggi di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Pusat (Grafik 7.8).

Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan

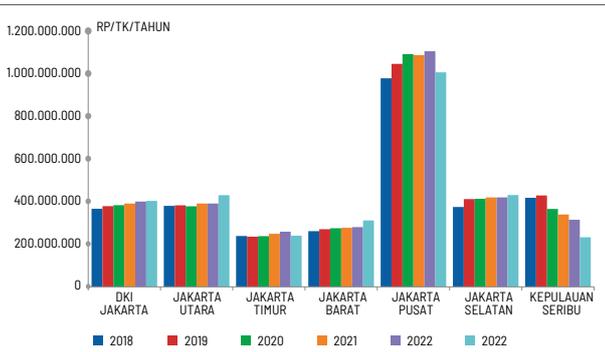


Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta
Grafik 7.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)

Tabel 7.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	FEBRUARI	AGUSTUS										
Pekerja Sektor Formal	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.285,17	3.253,39
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	226,63	182,54	252,49	152,65	203,20	151,53	186,23	154,15	269,38	186,11	306,94	193,65
Buruh/karyawan/pegawai	3.157,96	3.149,18	3.274,00	2.725,78	2.943,60	2.773,22	2.799,15	2.923,16	2.898,61	3.048,53	2.958,23	3.059,74
Pekerja Sektor Informal	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39
Berusaha sendiri	1.163,75	1.039,46	1.129,09	1.136,33	1.112,88	1.111,80	1.080,50	1.183,10	1.084,94	1.162,88	1.115,36	1.173,98
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	224,32	213,64	227,02	241,51	254,75	253,86	249,18	195,35	253,32	248,45	343,32	267,78
Pekerja bebas pertanian	3,04	0,35	2,19	0,23	0,10	0,88	3,62	2,49	-	1,55	-	1,49
Pekerja bebas non pertanian	66,12	98,46	75,69	150,29	135,26	191,32	126,84	174,41	90,72	140,26	121,92	127,23
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	328,63	169,33	227,97	252,47	259,39	254,81	278,04	242,45	260,65	284,95	261,01	283,91

Sumber: BPS, diolah



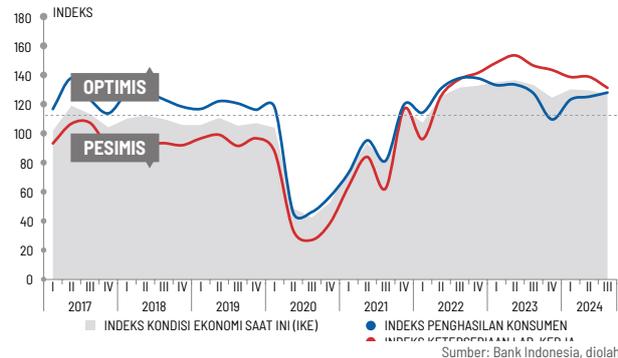
Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

Grafik 7.8 Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)

pertumbuhan positif sektor tersebut. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 23,05% terhadap total penduduk bekerja Agustus 2024. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (12,71%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,84%), LU Industri Pengolahan (11,84%), LU Jasa Lainnya (9,21%) (Grafik 7.9 dan 7.10).

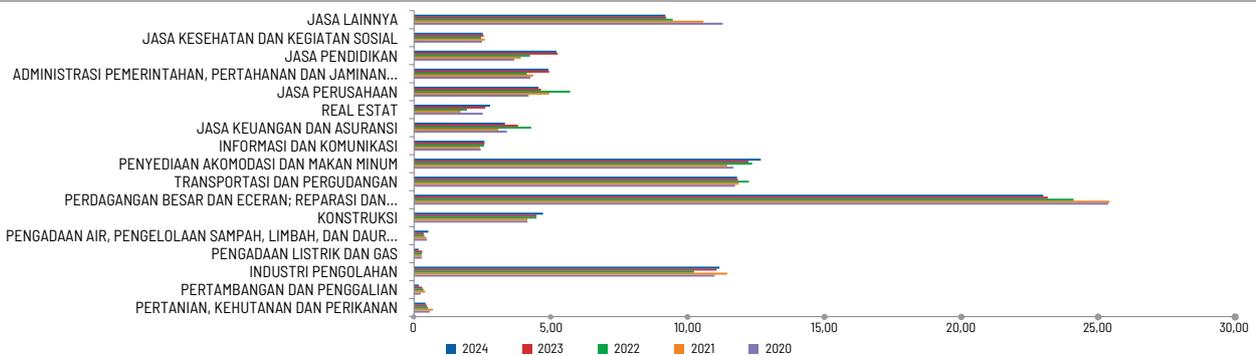
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2024 tercatat mencapai 6,21%, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,53%.

Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) masih berada diatas batas level optimis (100) pada triwulan III 2024 walau tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 7.11). Meskipun membaik, level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi ketiga tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 7.12).



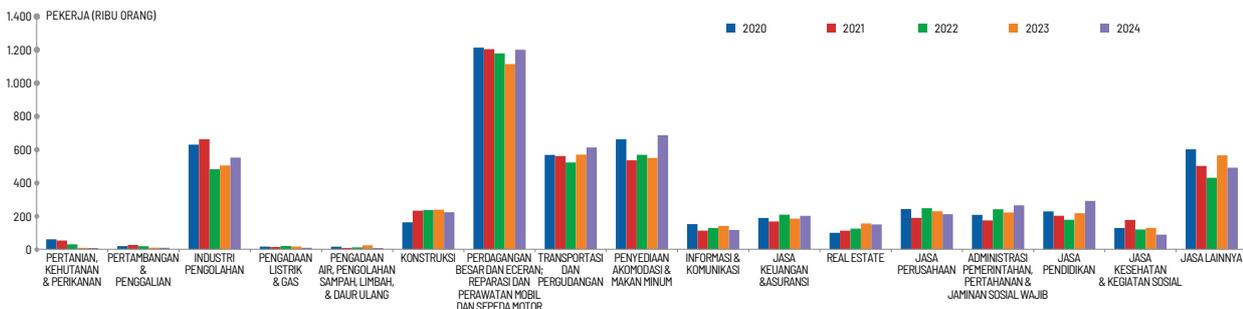
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.11 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja



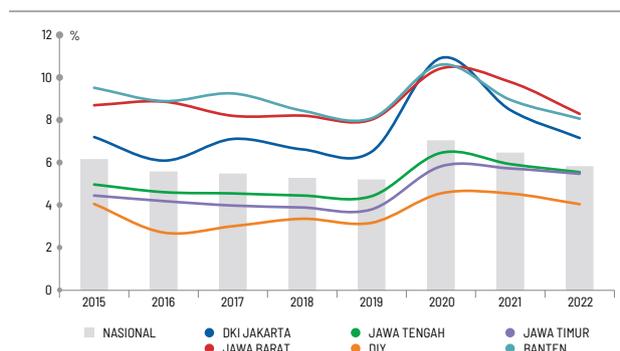
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha



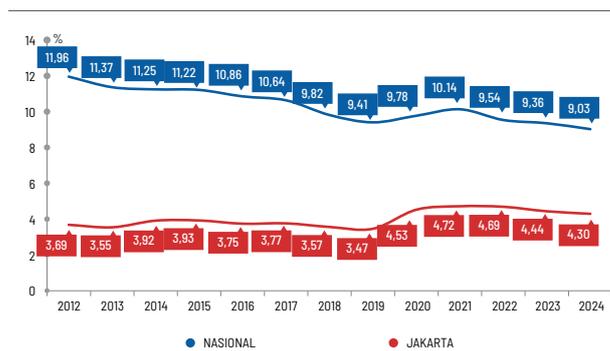
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.10 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta



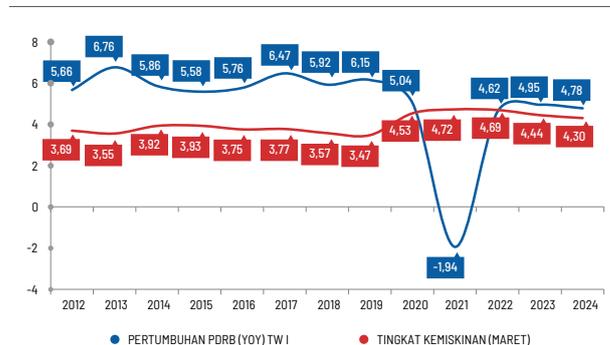
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.13 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional

B. KEMISKINAN

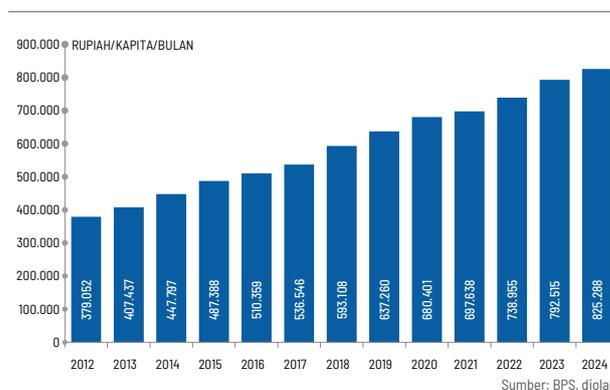
Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan data Maret 2024, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,34%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 4,44% (Tabel 7.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2023 berada pada level 9,03% (Grafik 7.13). Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 dan pengurangan jumlah pengangguran (Grafik 7.14). Selain itu, Gencarnya program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan penting dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten melaksanakan berbagai program, termasuk Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Karta Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan insentif bagi UMKM, serta pelatihan kerja gratis.

Angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka GK Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp825.288 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 4,14% (yoy) dari angka GK Maret 2023 yang tercatat Rp792.515 per kapita per bulan (Grafik 7.15 dan Grafik 7.16). Pertumbuhan angka GK tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan baik dari sisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (4,20%, yoy) maupun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (4,00%, yoy) (Grafik 7.17).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta



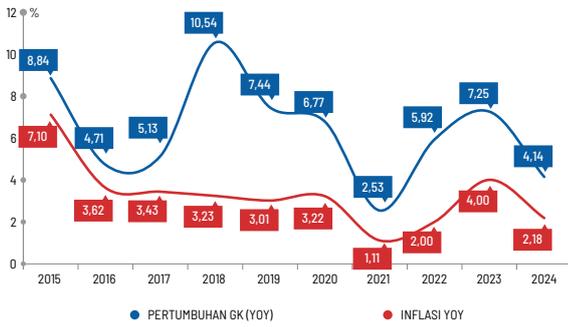
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.15 Garis Kemiskinan DKI Jakarta

Tabel 7.3 Profil Kemiskinan DKI Jakarta

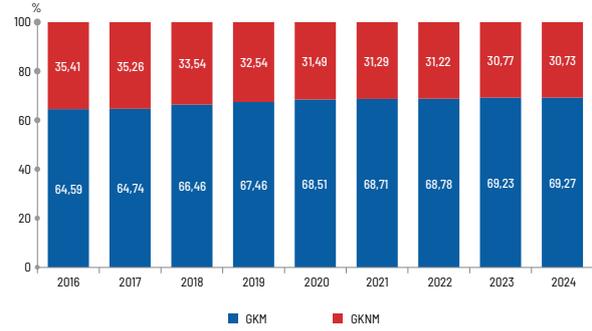
PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA	2019		2020		2021		2022		2023	2024
	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	MARET
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan orang)	365,55	362,30	480,86	496,84	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93
Presentase Penduduk Miskin (%)	3,47	3,42	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	637.260	663.355	680.401	683.339	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288
Makanan	429.915	451.918	466.156	467.847	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647
Non Makanan	207.345	189.163	214.245	215.491	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,50	0,40	0,59	0,67	0,64	0,75	0,77	0,68	0,70	0,65
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11	0,07	0,11	0,15	0,14	0,18	0,19	0,16	0,18	0,13

Sumber: BPS, diolah



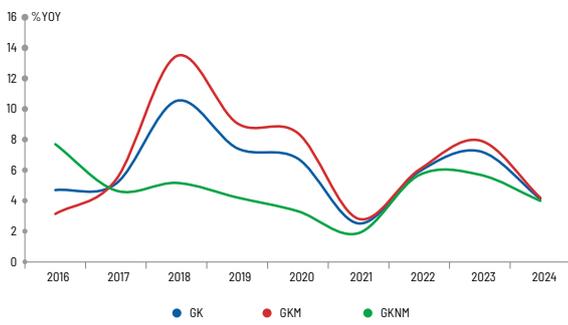
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.16 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta



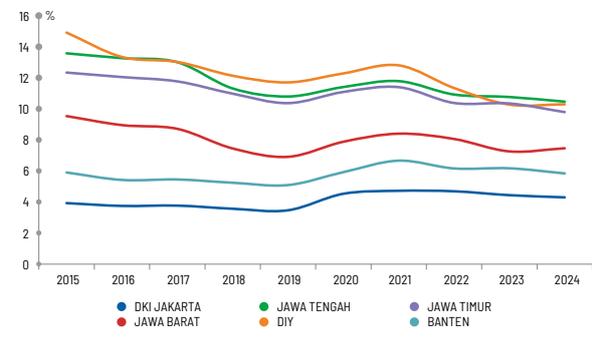
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.19 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan



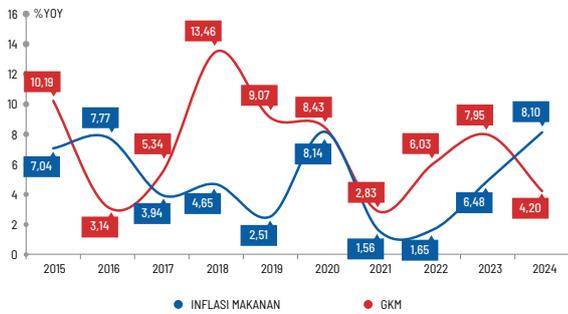
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.17 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya



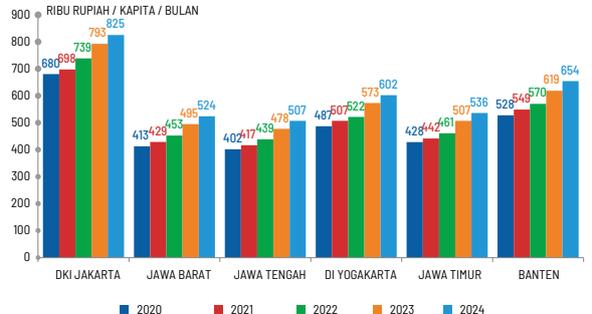
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.20 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.18 Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan



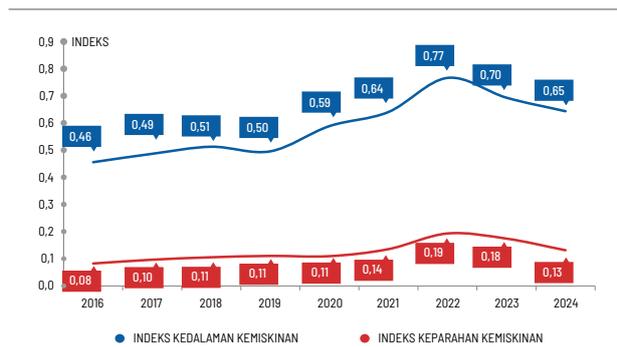
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.21 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa

Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan, yakni mencapai 69,27% pada Maret 2024 (Grafik 7.19).

Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah namun dengan Garis Kemiskinan (GK) yang paling tinggi (Grafik 7.20 dan Grafik 7.21). Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2024 juga menurun masing-masing sebesar 0,65 dan 0,13, lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang masing-masing sebesar 0,70 dan 0,18 (Grafik 7.22).

Di tengah penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2024 juga mengalami penurunan. Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang menurun menjadi 0,65 dari sebelumnya 0,70 pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 7.23). Lebih lanjut, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami penurunan, tercermin dari indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2024 tercatat 0,13, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,18.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.22 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

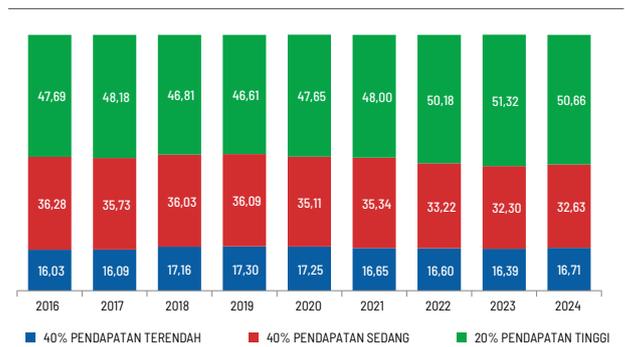
Penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2024 diikuti oleh penurunan rasio gini. *Gap* antara pengeluaran penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin rendah, menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan semakin merata di antara masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya penurunan ketimpangan ekonomi, di mana distribusi sumber daya menjadi lebih seimbang di seluruh lapisan penduduk. Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,423. Indeks tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (0,431) (Grafik 7.24). Indeks rasio gini tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,379. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5.

Ketimpangan pengeluaran antara kelompok pengeluaran terendah dan kelompok pengeluaran atas masih cukup besar. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yakni sebesar 16,99% pada Maret



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.23 Rasio Gini Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.24 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.25 Perkembangan UMP DKI Jakarta

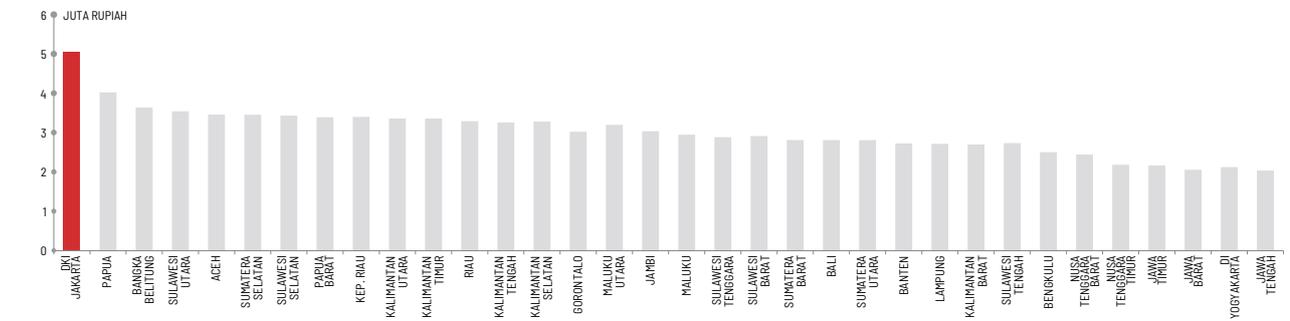
2023 (Grafik 7.25). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yakni sebesar 16,71%. Sebaliknya, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas menurun dari 51,32% menjadi 50,66%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40% masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.

C. UPAH TENAGA KERJA

Pada tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.067.381, meningkat 3,38% dibandingkan tahun 2023 (Rp4.901.798) (Grafik 7.26). Ketentuan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 818/2023 tentang UMP Jakarta 2024 tanggal 21 November 2023.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan

terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi. UMP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.26 UMP Provinsi di Indonesia



BAB 8

PROSPEK PEREKONOMIAN

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,6-5,4% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu dan pilkada serentak, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD, serta meningkatnya kinerja investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara, terhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara terkait isu uji keamanan produk, serta masih berlangsungnya tensi geopolitik. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global serta peningkatan ketegangan tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan.

Inflasi IHK DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan akan tetap terkendali pada sasaran 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



**Proyeksi Ekonomi Global
WEO IMF (yoy)**

3,2%

Tahun 2024, yoy

3,3%

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan Volume
Perdagangan Dunia WEO IMF (yoy)**

3,1%

Tahun 2024, yoy

0,8%

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi DKI Jakarta (yoy)**

4,6% - 5,4%

Tahun 2024, yoy

**Proyeksi Inflasi IHK
DKI Jakarta**

2,5% ± 1%

Tahun 2024, yoy

A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

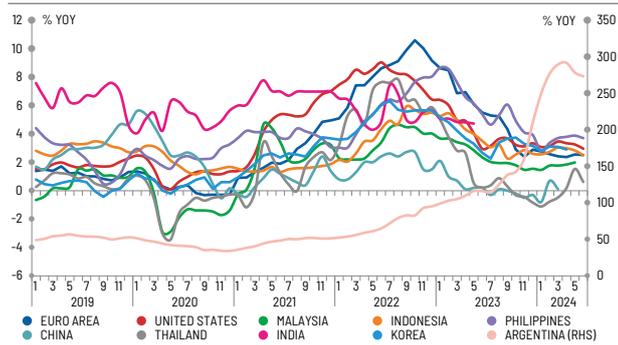
Prospek Perekonomian Global

Perekonomian dunia diperkirakan tumbuh sesuai dengan proyeksi sebelumnya dengan kecenderungan melambat yaitu sebesar 3,2% pada 2024 (WEO IMF) (Tabel 8.1). Meskipun masih tumbuh sesuai dengan proyeksi sebelumnya, risiko perekonomian global semakin tinggi disertai dengan meningkatnya ketegangan politik dan fragmentasi perdagangan. Perkembangan politik di AS diperkirakan akan diikuti dengan arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan strategi ekonomi berorientasi domestik (*inward looking policy*), termasuk penerapan tarif perdagangan yang tinggi dan kebijakan imigrasi yang ketat. Perkembangan ini akan berdampak pada risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi dan kembali meningkatnya inflasi dunia.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun tetap melambat dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, sejalan dengan rencana penerapan tarif perdagangan yang tinggi dan kebijakan imigrasi yang ketat, masih terdapat risiko perekonomian AS dapat tumbuh

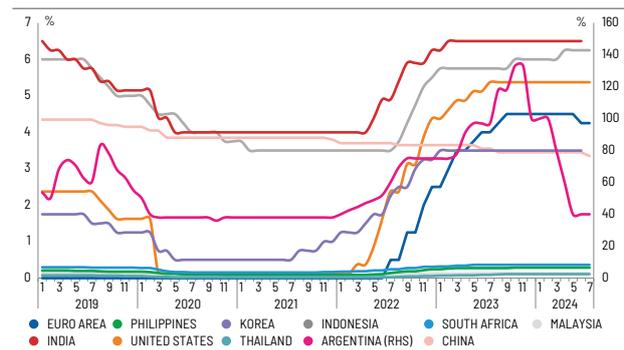
lebih rendah. Proses penurunan inflasi di AS juga akan berjalan lebih lambat akibat fragmentasi perdagangan sehingga penurunan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) ke depan diperkirakan juga akan lebih terbatas. Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan akan tetap besar dengan pengetatan kebijakan fiskal yang moderat pada tahun 2024 setelah ekspansi fiskal yang tidak terduga pada tahun 2023. Defisit anggaran yang besar dan tingginya utang meningkatkan risiko fiskal AS. Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar mendorong kembali meningkatnya *yield* US Treasury baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perubahan politik di AS tersebut juga telah berdampak pada menguatnya mata uang dolar AS secara luas serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS sehingga menyebabkan tekanan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia dan aliran keluar portofolio asing termasuk dari negara *emerging market*.

Di Kawasan Euro (EA), pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan masih tumbuh lemah. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi EA pada 2024 terutama bersumber dari masih lemahnya kinerja konsumsi



Sumber : Trading Economics

Grafik 8.1 Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia



Sumber : Bank of International Settlement (BIS), data as of Jul'24

Grafik 8.2 Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia

Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))

	REALISASI					WEO IMF		WORLD BANK		OECD	
	2019	2020	2021	2022	2023	JUL-24	OCT-24	JAN-24	JUN-24	MAY-24	SEP-24
						2024	2024	2024	2024	2024	2024
Dunia	2,8	-3,2	5,9	3,5	3,3	3,2	3,2	2,4	2,6	3,1	3,2
Negara Maju	1,6	-4,3	5,3	2,6	1,7	1,7	1,8	1,2	1,5		
Amerika Serikat	2,2	-2,8	5,9	2,1	2,5	2,6	2,8	1,6	2,5	2,6	2,6
Kawasan Euro	1,3	-6,1	5,3	3,3	0,5	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Jepang	0,3	-4,3	2,2	1,0	1,9	0,7	0,3	0,9	0,7	0,5	-0,1
Negara Berkembang	3,6	-1,5	6,7	4,1	4,4	4,3	4,2	3,9	4,0		
Tiongkok	5,8	2,2	8,1	3,0	5,2	4,5	4,8	4,5	4,8	4,9	4,9
India	4,7	-6,6	8,7	7,2	8,2	6,5	7,0	6,4	6,6	6,6	6,7
Volume Perdagangan Dunia	1,0	-8,2	10,1	5,2	0,8	3,1	3,1	2,3	2,5		
Harga Minyak (USD)		42,3	70,4	39,2	-16,4	0,8	0,9	81,0	84,0		

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

RT dan ekspor. Ketegangan geopolitik yang meningkat mendorong semakin tingginya ketidakpastian sehingga mempengaruhi optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik juga memberikan dampak pada masih lemahnya kinerja ekspor barang di tengah meningkatnya ekspor jasa. Di sisi lain, tekanan inflasi akibat meredanya harga energi mulai menurun sehingga diharapkan dapat mendorong konsumsi RT tumbuh lebih tinggi. Dari sisi fiskal, kebijakan fiskal EA akan tetap ketat selama 2024 dengan dukungan fiskal difokuskan untuk meredam dampak biaya energi yang tinggi, pemberian insentif fiskal untuk reformasi struktural serta investasi untuk memastikan keamanan energi dan mempercepat transisi hijau.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan produksi dan kinerja ekspor sejalan dengan adanya permasalahan kualitas dan keamanan pada industri otomotif. Penutupan pabrik mobil besar Jepang akibat kerusakan sistem produksi semakin menahan pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2024. Perlambatan juga bersumber dari menurunnya kinerja ekspor khususnya ekspor barang juga disebabkan oleh lemahnya permintaan dari negara utama tujuan ekspor Jepang seperti Asia dan Kawasan Euro (EA). Sementara itu, ekspor Jasa juga masih lemah dipengaruhi oleh masih rendahnya jumlah wisatawan Tiongkok meskipun total jumlah wisatawan yang datang ke Jepang sudah melampaui level pra-pandemi. Di sisi lain, kinerja investasi khususnya investasi swasta diperkirakan meningkat didukung oleh penghasilan swasta yang meningkat serta meningkatnya rencana investasi ke depan.

Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan masih akan lemah sejalan dengan masih berlanjutnya penurunan kinerja sektor *real estate* dan perumahan. Perlambatan juga dipengaruhi oleh tertahannya pertumbuhan konsumsi RT di tengah peningkatan konsumsi swasta dan ekspor pada triwulan I 2024. Meskipun demikian, kinerja investasi khususnya pada sektor infrastruktur dan manufaktur masih tumbuh stabil dan moderat. Pemulihan impor pariwisata yang lemah juga berdampak positif pada tertahannya pertumbuhan impor sehingga mendorong surplus transaksi berjalan. Pemulihan ekonomi Tiongkok diperkirakan juga akan ditopang oleh kebijakan makroekonomi yang mendukung termasuk stimulus fiskal yang cukup besar pada 2024 untuk mendorong permintaan domestik.

Perekonomian India pada 2024 diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian yang masih tetap tumbuh tinggi diperkirakan bersumber dari masih kuatnya permintaan domestik terutama pada area pedesaan serta pertumbuhan investasi terutama pada sektor transportasi, energi dan jasa didukung oleh meningkatnya kepercayaan bisnis di India. Permintaan *real estate* dari pihak swasta juga diperkirakan masih akan tumbuh kuat. Namun demikian, berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan konflik di Laut Merah diperkirakan akan menahan perdagangan India.

Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) (Grafik 8.2). Prospek ini didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga khususnya kelas menengah atas, meningkatnya investasi terutama investasi bangunan ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah. Kenaikan stimulus fiskal 2024 dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian. Sementara itu, kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas sejalan dengan harga komoditas yang turun dan permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok, yang masih lemah. Berlanjutnya perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh kuatnya kinerja berbagai lapangan usaha seperti sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah diperkirakan tetap baik namun perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih baik pada 2024 didukung oleh keyakinan konsumen yang tetap optimis terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Inflasi yang diperkirakan tetap terkendali juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli masyarakat.

Dukungan fiskal untuk mendukung perekonomian masih kuat. Pada 2024, arsitektur kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis

pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Berdasarkan hal tersebut, keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Untuk mendukung perkembangan terkini antara lain dengan memperhatikan penurunan harga komoditas serta beberapa tambahan belanja (a.l belanja bansos, belanja pupuk subsidi dan realisasi dari pinjaman luar negeri), maka Pemerintah telah meningkatkan target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 menjadi Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB dari sebelumnya hanya Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.

Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 juga diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan 3/3 fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat juga didorong oleh peningkatan kinerja investasi pada 2024. Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan meningkatkan investasi khususnya investasi swasta. Selain itu, masuknya investasi asing untuk mendorong proyek *green investment* juga diperkirakan akan mendorong kinerja investasi. Selain itu, kinerja investasi juga didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia.

Kinerja ekspor pada tahun 2024 diperkirakan masih akan tumbuh positif, yang terutama ditopang oleh ekspor jasa. Ekspor jasa diperkirakan akan terus membaik di 2024 seiring dengan pelaksanaan berbagai MICE dan *event* skala internasional. Di sisi lain, ekspor barang diperkirakan masih akan tertahan seiring dengan melambatnya perekonomian global dan masih tertahannya perekonomian negara tujuan ekspor a.l Tiongkok.

Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetap positifnya kinerja impor ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan

Tabel 8.2 Proyeksi PDB Nasional

	2021	2022	2023				2023	2024*
			I	II	III	IV		
Pertumbuhan Ekonomi	3,70	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	4,7-5,5
Konsumsi Swasta	2,01	4,94	4,57	5,30	5,08	4,78	4,93	4,7-5,5
Konsumsi Pemerintah	4,24	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,81	2,95	3,6-4,4
Investasi	3,80	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	5,1-5,9
Ekspor	17,95	16,28	11,94	-2,97	-4,26	1,64	1,32	0,3-1,1
Impor	24,87	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-0,15	-1,65	-1,0-2,0

Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia.
*Angka Sementara

dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi nasional di 2024 akan ditopang sejumlah sektor yang diperkirakan akan tumbuh kuat, seperti Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi ditopang oleh anggaran belanja negara serta berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah.

Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Perkembangan tersebut seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi pangan juga diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter *pro-stability* dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

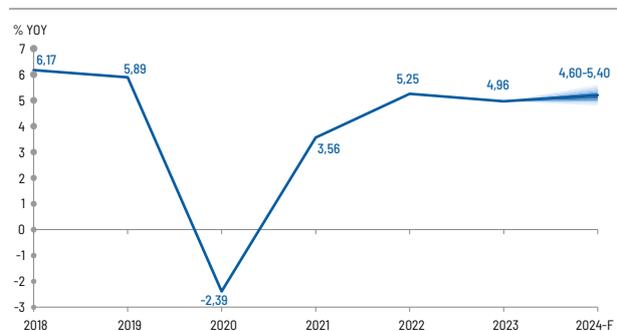
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Prakiraan tersebut direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya yang berada pada kisaran 4,8-5,6%. Revisi ke bawah terutama dipengaruhi oleh kinerja investasi yang diperkirakan tidak setinggi proyeksi sebelumnya, dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan pada periode pilkada serentak. Selain itu, revisi ke bawah juga dipengaruhi oleh perkiraan kinerja impor yang lebih tinggi. Kondisi tersebut didorong oleh tingginya impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan prakiraan masih tingginya pertumbuhan konsumsi RT dan ekspor.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024 ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan penghasilan

(UMP dan gaji ASN) serta terkendalinya laju inflasi. Meningkatnya aktivitas MICE dan event baik skala nasional maupun internasional di Jakarta juga turut mendorong pertumbuhan positif pada konsumsi RT. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung pemilu. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan masih akan tumbuh meningkat didorong terutama oleh masih masuknya investasi untuk berbagai pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitalahun. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan tumbuh melambat dipengaruhi terutama oleh dinamika perkembangan ekonomi global pada 2024 yaitu antara lain (i) pembatasan kuota ekspor; (ii) isu kualitas produk yang berdampak terhadap berhentinya produksi dan berhentinya ekspor ke negara-negara tertentu; (iii) *shortage* bahan baku seiring dengan adanya kebijakan pembatasan impor di tengah produksi dalam negeri yang masih terbatas; serta (iv) meluasnya tensi geopolitik sehingga berdampak pada terhambatnya jalur perdagangan di Laut Merah.

Dari sisi lapangan usaha, 3 (tiga) sektor utama Jakarta yaitu sektor perdagangan, konstruksi dan jasa keuangan diperkirakan tumbuh lebih baik dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024. Selain itu, sektor akmamin juga diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024 sejalan dengan berlangsungnya beberapa event (konser musik dan olahraga) skala internasional yang diselenggarakan di Jakarta antara lain Event musik : Bruno Mars, Jonas Brothers, Ed Sheeran dan Event Olahraga : Indonesia International Open 2024, Jakarta International Marathon 2024, Asian Rifle/Pistol Championship 2024, dan UFC 2024. LU konstruksi juga diperkirakan tumbuh lebih baik sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta. Sementara itu, LU utama lainnya yaitu industri pengolahan dan infokom diperkirakan tumbuh melambat pada 2024.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2024 diperkirakan masih tetap tumbuh kuat. Kondisi tersebut terindikasi dari beberapa indikator ekonomi seperti proyeksi penjualan mobil oleh Gaikindo pada tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024

kegiatan konsumsi yang masih tumbuh tinggi, serta indeks ekspektasi konsumen yang masih optimis. Kondisi tersebut juga didukung oleh meningkatnya penghasilan masyarakat sejalan dengan adanya kenaikan UMP Jakarta sebesar 3,38% dan kenaikan gaji ASN sebesar 8% serta berlanjutnya kebijakan pemberlakuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil listrik. Semakin meningkatnya penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE dan event skala nasional dan internasional pada 2024, termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas pemilu juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi RT. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta pada 2024 yaitu Bruno Mars, Jonas Brother Concert, dan The 38th Golden Disc Awards. Untuk event olahraga terdapat 9 event olahraga yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di DKI Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain Indonesia Master 2024 (Super 500), Jakarta International Marathon, dan Indonesia International Open 2024. Sama halnya dengan konser musik dan event olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah terjadwal sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 event untuk pameran dan 1822 event untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di 2023.

Setelah tumbuh negatif pada tahun 2023, konsumsi Pemerintah pada 2024 diperkirakan tumbuh positif. Kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan postur belanja APBD dan APBN serta meningkatnya belanja antara lain belanja pegawai sejalan dengan kenaikan gaji ASN dan belanja barang dan jasa serta bantuan sosial untuk mendukung aktivitas pemilu dan pilkada serentak. Meningkatnya belanja modal dalam rangka akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah sebelum pergantian kepemimpinan juga diperkirakan akan mendorong konsumsi Pemerintah pada 2024. Kinerja konsumsi Pemerintah juga diperkirakan didukung oleh defisit APBN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan meningkat menjadi sebesar 2,7% terhadap PDB. Dari sisi APBD, konsumsi Pemerintah pada 2024 juga diperkirakan akan ditopang oleh pagu belanja operasi APBD DKI Jakarta terutama pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta rencana penyerapan anggaran belanja yang lebih optimis untuk minimalisasi SILPA.

Adapun kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan juga akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja investasi terutama didorong oleh investasi bangunan sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta. Masih berlanjutnya proyek strategis Pemerintah multitalahun di DKI Jakarta seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028), MRT fase II, III, dan IV, LRT Jakarta, *Transit Oriented Development* (TOD) serta berbagai proyek *green economy* dan *renewable energy* seperti infrastruktur EV, *waste management*, dan *green commercial/industrial zone* diperkirakan akan mendorong kinerja investasi pada tahun 2024.

Di sisi lain, kinerja ekspor pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor Jakarta, meluasnya ketegangan geopolitik termasuk konflik di Laut Merah, berhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara tertentu akibat permasalahan keamanan dan kualitas produk serta pembatasan kuota ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor. Melambatnya kinerja ekspor lebih lanjut diperkirakan akan tertahan oleh ekspor jasa yang masih tetap tumbuh tinggi didorong oleh meningkatnya kunjungan wisman ke DKI Jakarta, baik untuk tujuan *leisure* maupun bisnis sejalan dengan berlangsungnya berbagai kegiatan MICE dan *event* (musik dan olahraga) baik skala domestik maupun internasional di 2024.

Berbeda dengan kinerja ekspor yang melambat, kinerja impor DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh meningkat bersumber dari meningkatnya seluruh komponen impor baik impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, meningkatnya investasi serta membaiknya kinerja ekspor.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih akan ditopang oleh kinerja lapangan usaha utama seperti LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Jasa Keuangan.

Pada 2024, LU perdagangan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada 2024 yang juga diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

LU Konstruksi pada 2024 diperkirakan juga akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya LU konstruksi terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah di DKI Jakarta yang bersifat multitaluh yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan infrastruktur yang akan selesai pada 2024 yaitu LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome - Manggarai dan jalan tol JORR 2 yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

LU utama lainnya seperti LU Jasa Keuangan diperkirakan masih akan tumbuh meningkat seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit perbankan. LU Infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop, dan

beberapa aplikasi *mobile streaming*) sehingga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU Infokom. Selain itu, meningkatnya penggunaan paket data pada periode pemilu dan pilkada serentak juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU infokom. Pertumbuhan LU Infokom juga didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung.

Sementara itu, LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan melambatnya kinerja ekspor. Tertahannya kinerja industri pengolahan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja industri otomotif akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan produk serta pembatasan kuota ekspor. Di sisi lain, beberapa jenis industri diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum, industri tekstil, dan industri kimia.

LU Transportasi dan Pergudangan juga diperkirakan tumbuh meningkat, didorong oleh kinerja transportasi logistik dalam mendukung kegiatan perdagangan *online* serta meningkatnya transportasi penumpang sejalan dengan mobilitas yang semakin meningkat di tengah melambatnya transportasi barang untuk ekspor. Adapun lapangan usaha lainnya juga diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif pada tahun 2024 seperti LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman yang didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat pada pelaksanaan *event* dan MICE skala internasional serta berlangsungnya pemilu dan pilkada serentak, LU Jasa Perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai *event* sehingga meningkatkan kinerja *event organizer*/EO, dan LU lainnya.

Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2024

Pada 2024, pagu anggaran APBD DKI Jakarta meningkat sebesar 2,71% dari Rp 79,56 Triliun menjadi Rp 81,72 Triliun. Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 70,66 Triliun menjadi Rp 72,45 Triliun. Kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 dari sisi pendapatan bersumber dari kenaikan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tumbuh mencapai 50,77%. Sementara itu komponen pajak dan retribusi juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,17% dan 7,53%. Kenaikan pagu pendapatan dalam RAPBD DKI Jakarta 2024 diperkirakan akan mendorong belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024.

Dari sisi belanja, pagu APBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 72,14 Triliun menjadi Rp 72,60 Triliun. Berdasarkan komponennya, kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 terutama bersumber dari kenaikan komponen belanja tidak terduga yang naik mencapai 83,88%, sejalan dengan berlangsungnya periode pemilu 2024. Selain itu komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan

masing-masing sebesar 6,85% dan 0,24% sejalan dengan naiknya gaji ASN di 2024 serta meningkatnya belanja barang dan jasa untuk aktivitas pemilu. Di sisi lain, belanja subsidi, hibah, dan bansos turun masing-masing sebesar 5,16%; 10,82%; dan 30,02%. Penurunan pada belanja bansos terutama disebabkan karena adanya evaluasi/perbaikan data penerima bansos untuk optimalisasi penerimaan bansos yang lebih tepat sasaran di 2024.

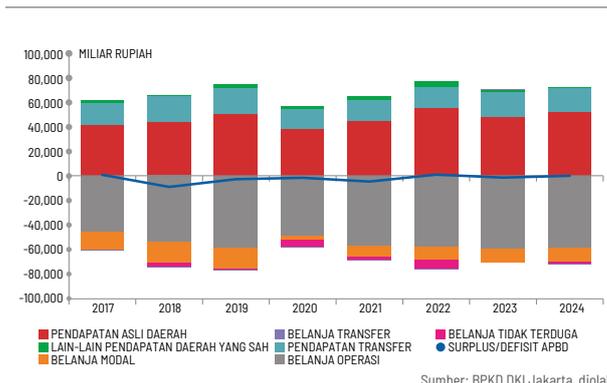
Pada akhir Agustus 2024, Pemerintah mengesahkan APBD Perubahan 2024 menjadi sebesar Rp85,1 Triliun. APBD-P tersebut mengalami kenaikan Rp3,4 Triliun atau naik 4,16% dari APBD Murni 2024 yang sebesar Rp81,7 Triliun.

Anggaran APBD-P mengalami kenaikan baik dari pos pendapatan maupun pos belanja. Dari pos pendapatan, APBD-P mengalami kenaikan sebesar 3,45% dengan kenaikan terutama pada pendapatan transfer (23,03%). Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) turun 3,69% dengan penurunan pada seluruh komponen kecuali retribusi daerah yang naik 34,10%. Penurunan pada komponen PAD terutama pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (22,92%), kemudian diikuti dengan lain-lain PAD (13,34%) dan pajak daerah (2,72%).

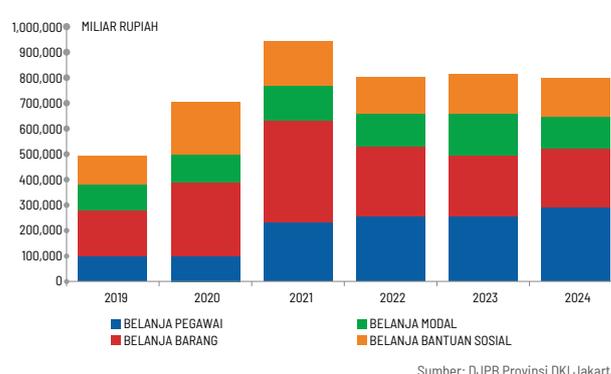
Seiring dengan kenaikan pendapatan, pos belanja juga mengalami kenaikan dalam APBD-P yaitu sebesar 4,71%. Kenaikan terutama pada belanja tidak terduga (27,64%). Belanja operasi juga mengalami kenaikan sebesar 2,72% dengan kenaikan tertinggi terdapat pada belanja bantuan sosial (14,03%) dan belanja subsidi (12,80%). Sedangkan belanja pegawai dan belanja bunga turun masing-masing sebesar 0,17% dan 27,34%. Dari sisi belanja modal, juga mengalami kenaikan mencapai 12,41% dengan kenaikan tertinggi berada pada belanja modal tanah (mencapai 53,73%) dan belanja modal peralatan dan mesin (43,04%).

Sementara itu, pagu anggaran belanja Pemerintah Pusat melalui APBN di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mengalami penurunan. Pagu belanja Pemerintah Pusat melalui APBN ditetapkan sebesar Rp1.589,33 Triliun atau turun 6,58% (yoy) dibandingkan belanja Pemerintah Pusat melalui APBN-P tahun 2023 yang sebesar Rp1.701,32 Triliun. Adapun penurunan total pagu tersebut terutama bersumber dari penurunan Belanja Modal (-15,93% yoy), diikuti oleh Belanja Bantuan Sosial (-3,39%) di tengah peningkatan Belanja Pegawai yang mencapai 13,67% (yoy) dan Belanja Barang (6,56% yoy) (Grafik 8.5).

Sama halnya dengan APBD, pagu APBN juga mengalami penyesuaian dengan kenaikan total belanja sebesar 11,37% terhadap pagu 2024. Kenaikan terdapat pada seluruh komponen belanja terutama belanja modal yang naik 30,26%; diikuti oleh kenaikan belanja barang sebesar 28,11%; dan belanja pegawai yang juga meningkat sebesar 13,31%.



Grafik 8.4 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024

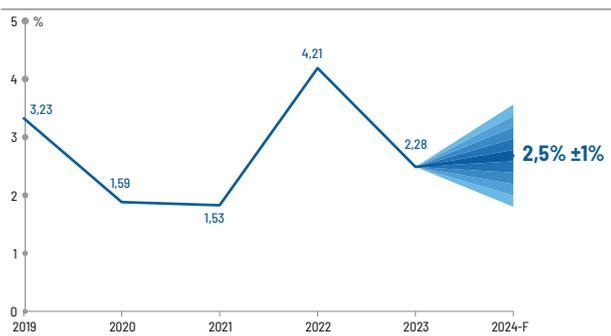


Grafik 8.5 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024

Prospek Inflasi Jakarta

Pada 2024, inflasi Jakarta diperkirakan masih akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah pada kisaran 2,5±1% (yoy) (Grafik 8.6). Prakiraan tersebut terutama disebabkan oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui GNPIP.

Terkendalnya laju inflasi di DKI Jakarta pada 2024 tidak terlepas dari dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta untuk menjaga kestabilan inflasi melalui 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain berupa pasar murah dan program pangan bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan *talkshow* untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta melakukan *Capacity Building* TPID. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bank Indonesia bersama dengan TPID dan TPID Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten melaksanakan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan melalui Operasi Pasar, hilirisasi pangan dan diversifikasi produk olahan, penyaluran alsintan dan saprodi untuk peningkatan produksi pangan, fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur digitalisasi informasi pangan, dan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.6 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024

Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko yang muncul pada 2024 yaitu perlambatan ekonomi global dan berlanjutnya ketegangan geopolitik memberikan potensi risiko menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024. Di samping itu, dari sisi domestik, juga terdapat berbagai tantangan yang dapat berdampak terhadap perekonomian Jakarta dan perlu untuk diwaspadai, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural bersumber dari daya dukung Jakarta seperti ketersediaan lahan, tingkat upah minimum, ketersediaan air yang semakin terbatas, serta masalah struktural lainnya seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan yang bersifat siklikal bersumber dari berlangsungnya tahun politik seiring dengan dilaksanakannya pemilu serta transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Oleh karena itu, untuk dapat semakin memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta di tengah berbagai tantangan yang terutama bersumber dari eksternal, serta dalam rangka meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, perlu dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui :

1. Mendorong kegiatan MICE dan *event* (musik, olahraga, dan lainnya) di Jakarta, serta *urban tourism* yang dibagi menjadi 8 kategori yaitu wisata rekreasi (Ancol, TMII), sejarah (Kampung Tugu, Kampung Marunda), belanja (Pasar Barang Antik di Jl. Surabaya), olahraga (Aquatic Centre, Jakarta Velodrome), religi (Masjid Istiqlal, Gereja Katedral), alam dan air (Muara Angke, Pulau Seribu), alam terbuka (Urban Forest Cipete), dan MICE (Balai Sidang Jakarta Convention Centre);
2. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor potensial yaitu sektor perdagangan (*hub ecommerce*), sektor informasi komunikasi (ekosistem digital dan *start up*), sektor keuangan (*regional financial center*), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan Urban), sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan; termasuk UMKM go digital dan go ekspor;
3. Mendorong iklim investasi melalui optimalisasi sektor prioritas melalui kemudahan iklim investasi;

4. Percepatan program sinkronisasi (pengelolaan sampah, penanganan banjir, infrastruktur, air minum, dan energi) Jabodetabekpunjur melalui kawasan aglomerasi;
5. Mendorong digitalisasi pemda dan masyarakat, melalui: (i) Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama QRIS) terutama di beberapa sektor potensial (pariwisata, kesehatan dan pendidikan); (ii) Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS a.l Jakarta Kreatif Festival, QRIS Fun Zumba dan QRIS Jelajah Indonesia; serta (iii) Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui QRIS, akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sementara itu terkait inflasi, dengan berbagai permasalahan struktural di Jakarta antara lain terkait dengan populasinya yang bertambah ketika siang hari dari daerah sekitar (bodetabek), serta karakteristik Jakarta yang bukan merupakan wilayah sentra produksi sehingga 99% pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil, maka diperlukan strategi khusus pengendalian inflasi daerah nonprodusen yaitu melalui penguatan strategi 4K dalam inflasi pangan, yaitu :

1. Menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas dengan program *urban farming* dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah surplus;
2. Menjaga keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara massif, integratif, dan berdampak luas;
3. Menjaga kelancaran distribusi melalui perluasan distribusi via kanal TPID-BUMD pangan, serta;
4. Melaksanakan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian ekspektasi inflasi

Selain itu, dalam rangka pengendalian inflasi Jakarta tahun 2024, TPID Provinsi DKI Jakarta juga perlu melakukan beberapa upaya yaitu :

1. Menimbang kembali rencana penyesuaian tarif layanan publik a.l dengan memperhatikan besaran dan waktu yang tepat hingga komunikasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat;
2. Sinergi pengendalian inflasi dengan Bodetabek utamanya melalui rapat koordinasi, penguatan KAD, hingga penguatan pertukaran data dan informasi; serta (iv) monitoring potensi dan dampak rambatan global.

Di samping itu, penguatan ekosistem digital juga perlu untuk terus didorong yang tidak hanya terkait dengan transaksi Pemerintah Daerah, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi bantuan sosial namun juga menasar pada sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan UMKM juga akan terus didorong dan diarahkan untuk menjadi pemasok sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Di sisi lain, dalam

rangka upaya stabilisasi harga, UMKM dapat dikembangkan dengan berfokus untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga pasokan bahan pangan. Inovasi juga perlu diperkuat dalam mengakselerasi perkembangan digitalisasi UMKM melalui program pengembangan UMKM digital dan UMKM ekspor. Lebih lanjut, inovasi

kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan keuangan hijau juga diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan serta mendukung penguatan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

Tabel 8.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS	KETERANGAN
Pertumbuhan ekonomi			
Proses transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak berjalan dengan lancar	Menahan kinerja konsumsi Pemerintah dan investasi	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
Berlanjutnya PHK di berbagai industri : makanan dan minuman, e-commere, teknologi, media, dan startup sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat	Menahan kinerja konsumsi RT	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
Transisi pergantian kepemimpinan pasca pilkada serentak tidak berjalan dengan baik	Menahan kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari timeline	Menahan kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
Perlambatan ekonomi yang lebih dalam pada negara tujuan ekspor dan impor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	Moderate	Menahan pertumbuhan ekonomi
Berlanjutnya pembatasan kuota ekspor di beberapa negara	Menahan kinerja ekspor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Menahan kinerja ekspor dan impor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Inflasi			
Meningkatnya harga sewa rumah dan kontrak rumah seiring dengan meningkatnya permintaan	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Meningkatnya harga berbagai bahan pangan didorong oleh meningkatnya permintaan dalam rangka mendukung pilkada serentak	Kenaikan inflasi pangan	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Berlanjutnya peningkatan harga emas	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga minyak dunia sejalan dengan tensi geopolitik yang masih berlanjut	Kenaikan harga energi	High	Meningkatkan tekanan inflasi
Bergesernya musim tanam dan panen pasca berlangsungnya El-Nino sehingga akan mempengaruhi produksi pangan	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi
Anomali cuaca	Kenaikan harga bahan pangan strategis	High	Meningkatkan tekanan inflasi

Tim Penyusun

PENGARAH

Arlyana Abubakar

PENANGGUNG JAWAB

Musni Hardi K. Atmaja

KOORDINATOR PENYUSUN

Muhamad Shiroth

TIM PENULIS

Reska Prasetya

Dewa Ayu Komang Bintari Dewi

Greis Dewi Roma Ito Simamora

Muhamad Rifki Maulana

Binar Tyas Aini

Alfonsus Aristo Wibowo

Andi Nahla Malika Nurilah

Chendy Dea Andriany

Olivia Citra

Fikri Mauli Utomo

KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42
Jakarta - 10410



SCAN HERE



LPP BI DKI JAKARTA

Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian
google atau pindai QR code atau tautan berikut:

bit.ly/LPP-DKI

